



Katalog BPS : 2302004



# INDIKATOR PASAR TENAGA KERJA INDONESIA FEBRUARI 2012



Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia



Indikator  
Pasar Tenaga Kerja  
Indonesia  
Februari 2012

#

# Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia Februari 2012

ISSN. 2088-5679

No. Publikasi: 04120.1201

Katalog BPS: 2302004

Ukuran Buku: 29,5 cm X 21,5 cm

Jumlah Halaman: xvi + 103 halaman

Naskah: Sub Direktorat Statistik Ketenagakerjaan

Gambar Kulit: Sub Direktorat Statistik Ketenagakerjaan

Diterbitkan oleh: Badan Pusat Statistik RI

Dicetak oleh: CV. Invitama Abadi

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

## KATA PENGANTAR

Pada periode 2005-2010, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dilaksanakan secara semesteran dan sejak Februari 2011 dilaksanakan secara triwulanan. Survei ini mencakup seluruh wilayah Indonesia dan diharapkan dapat memonitor dinamika ketenagakerjaan secara lebih cepat dan berkesinambungan. Sakernas Triwulanan I, II dan IV menghasilkan angka estimasi nasional sampai dengan level provinsi, sedangkan Sakernas Agustus selain terdiri dari 50.000 rumah tangga sampel Triwulan III, juga terdapat 150.000 rumah tangga sampel tambahan/komplemen mampu menyajikan angka estimasi hingga tingkat kabupaten/kota.

Sejak Februari 2011, Badan Pusat Statistik (BPS) menerbitkan publikasi Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia edisi Triwulan I dan kali ini hadir dengan edisi Februari 2012 yang menggambarkan keadaan Triwulan I tahun 2012. Dalam publikasi ini juga disajikan series *Key Indicator of the Labour Market* (KILM) Triwulan I dan III tahun 2011. Indikator-indikator yang ditampilkan dalam publikasi ini mengacu pada KILM yang direkomendasikan ILO, dengan harapan bisa dijadikan sebagai sistem peringatan dini (*early warning system*) mengenai kondisi pasar tenaga kerja di Indonesia. Jenis tabel yang ditampilkan dalam publikasi ini dirinci menurut jenis kelamin, daerah perkotaan dan perdesaan, serta hanya mencakup penduduk usia kerja. Beberapa indikator KILM menurut provinsi dan tabel pendukung dalam indikator KILM yang ditetapkan, disajikan pada lampiran publikasi ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya publikasi ini, disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih. Kritik dan saran dari pengguna sangat diharapkan demi kesempurnaan publikasi edisi berikutnya.

Jakarta, Juni 2012  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Republik Indonesia

**DR. Suryamin**  
**NIP. 1956 0805 1979 03 1 001**



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	v
Daftar Tabel .....	vii
Daftar Grafik .....	ix
Daftar Lampiran .....	x
Daftar Istilah dan Singkatan (Akronim) .....	xii
Ringkasan Eksekutif .....	xiii
1. Pendahuluan .....	1
1.1. Sakernas Dan Analisis Ketenagakerjaan .....	1
1.2. Sakernas dan KILM .....	2
1.3. Peran KILM di Bidang Ketenagakerjaan .....	4
1.4. Analisis Pasar Tenaga Kerja Menggunakan KILM .....	6
2. Penjelasan Teknis .....	9
2.1. Penjelasan Umum .....	9
2.2. Indikator Kunci Pasar Tenaga Kerja .....	12
2.2.1. Partisipasi di Dunia Kerja .....	13
2.2.2. Indikator Pekerja .....	14
2.2.3. Indikator Pengangguran, Underemployment dan Ketidaktifan .....	18
2.2.4. Indikator Pendidikan dan Melek Huruf .....	21
2.2.5. Indikator Upah dan Biaya Tenaga Kerja .....	22
2.2.6. Produktifitas Tenaga Kerja .....	23
2.2.7. Indikator Elastisitas Tenaga Kerja .....	23
2.2.8. Indikator Kemiskinan, Pekerja Miskin dan Distribusi Pendapatan .....	24
3. Partisipasi Di Dunia Kerja (KILM 1) .....	25
4. Indikator Tenaga Kerja (KILM 2-7) .....	29
4.1. KILM 2. Rasio Pekerja Terhadap Jumlah Penduduk .....	29
4.2. KILM 3. Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama .....	33
4.3. KILM 4. Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha .....	37

4.4. KILM 5. Pekerja Paruh Waktu .....	41
4.5. KILM 6. Jam Kerja .....	44
4.6. KILM 7. Pekerja Sektor Informal .....	48
5. Indikator Pengangguran .....	51
5.1. KILM 8. Pengangguran .....	51
5.2. KILM 9. Pengangguran Pada Kelompok Usia Muda .....	55
5.3. KILM 11. Pengangguran dan Pendidikan .....	57
5.4. KILM 12. Setengah Penganggur .....	62
5.5. KILM 13. Tingkat Ketidaktifan .....	66
6. Indikator Pendidikan Dan Melek Huruf .....	69
KILM 14. Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf .....	69
LAMPIRAN .....	73



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kelompok Umur, 2011-2012 .....	26
Tabel 2. Penduduk Usia 15 Tahun ke atas dan yang Bekerja Menurut Kelompok Umur, 2011-2012 .....	30
Tabel 3. Rasio Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja Terhadap Total Penduduk (EPR) Menurut Kelompok Usia, 2011-2012 .....	31
Tabel 4. Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, 2011-2012 .....	34
Tabel 5. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, 2011-2012 .....	35
Tabel 6. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, 2011-2012 .....	38
Tabel 7. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, 2011-2012 .....	39
Tabel 8. Tingkat Pekerja Paruh Waktu, 2011-2012 .....	42
Tabel 9. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja, 2011-2012 .....	45
Tabel 10. Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Kategori Sektor (Formal/Informal), 2011-2012 .....	49
Tabel 11. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Kategori Sektor (Formal/Informal), 2011-2012 .....	49
Tabel 12. Tingkat Pengangguran Terbuka, 2011-2012 .....	52
Tabel 13. Indikator Pengangguran Usia Muda di Indonesia, 2011-2012 .....	56
Tabel 14. TPT Menurut Tingkat Pendidikan, 2011-2012 .....	57
Tabel 15. Persentase Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan, 2011-2012 .....	59
Tabel 16. Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang termasuk Setengah Penganggur, 2011-2012 .....	62
Tabel 17. Indikator Setengah Penganggur, 2011-2012 .....	63
Tabel 18. Persentase Setengah Penganggur Menurut Pendidikan, 2011-2012 .....	65

---

Tabel 19. Indikator Ketidakaktifan, 2011-2012 .....	67
Tabel 20. Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan, 2011-2012 .....	70

<http://www.bps.go.id>

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Pola TPAK Agustus 2011 dan Februari 2012 .....	27
Grafik 2. TPAK Menurut Provinsi Agustus 2011 dan Februari 2012 .....	28
Grafik 3. Pola EPR Agustus 2011 dan Februari 2012 .....	32
Grafik 4. EPR Provinsi Agustus 2011 dan Februari 2012 .....	32
Grafik 5. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang termasuk Pekerja Rentan Menurut Provinsi, Agustus 2011 dan Februari 2012 .....	36
Grafik 6. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Provinsi, Agustus 2011 dan Februari 2012 .....	40
Grafik 7. <i>Share</i> Perempuan Pada Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi, Agustus 2011 dan Februari 2012 .....	42
Grafik 8. Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi, Agustus 2011 dan Februari 2012 .....	43
Grafik 9. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Jam Kerja dan Provinsi, Februari 2012 .....	47
Grafik 10. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Sektor (Formal/ Informal), Agustus 2011 dan Februari 2012 .....	50
Grafik 11. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Sektor (Formal/ Informal) dan Provinsi, Februari 2012 .....	50
Grafik 12. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi, Agustus 2011 dan Februari 2012 ....	54
Grafik 13. Persentase Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan dan Provinsi, Agustus 2011 dan Februari 2012 .....	61
Grafik 14. Persentase Setengah Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan, Agustus 2011 dan Februari 2012 .....	64
Grafik 15. Pola Tingkat Ketidaktifan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Agustus 2011 dan Februari 2012 .....	68
Grafik 16. Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Kelompok Umur, Agustus 2011 dan Februari 2012 .....	71
Grafik 17. Perbandingan Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, Februari 2012 .....	71

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2011-2012 ....	75
Lampiran 2. Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Menurut Kelompok Umur, 2011-2012 .....	76
Lampiran 3. Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang termasuk Angkatan Kerja Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2011-2012 .....	77
Lampiran 4. Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang termasuk Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur, 2011-2012 .....	78
Lampiran 5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2011-2012 .....	79
Lampiran 6. Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2011-2012 .....	80
Lampiran 7. Rasio Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja Terhadap Total Penduduk (EPR) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2011-2012 .....	81
Lampiran 8. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, 2011-2012 .....	82
Lampiran 9. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2011-2012 .....	84
Lampiran 10. Indikator Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang termasuk Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi, 2011-2012 .....	87
Lampiran 11. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja, Agustus 2011 dan Februari 2012 .....	88
Lampiran 12. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Sektor (Formal/Informal), Agustus 2011 dan Februari 2012 .....	91
Lampiran 13. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2011-2012 ....	92
Lampiran 14. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2011-2012 .....	93
Lampiran 15. Persentase Pengangguran Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2011-2012 .....	94
Lampiran 16. Persentase Setengah Penganggur Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2011-2012 .....	95

Lampiran 17. Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang termasuk Bukan Angkatan Kerja Menurut Provinsi, 2011-2012 .....	96
Lampiran 18. Tingkat Ketidaktifan Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2011-2012 .....	97
Lampiran 19. Persentase Angkatan Kerja Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2011-2012 ...	98
Lampiran 20. Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin, Agustus 2011 dan Februari 2012 .....	99
Lampiran 21. Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Lapangan Usaha dan Klasifikasi Daerah, Agustus 2011 dan Februari 2012 .....	100
Lampiran 22. Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Agustus 2011 dan Februari 2012 .....	101
Lampiran 23. Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Klasifikasi Daerah, Agustus 2011 dan Februari 2012 .....	102

## DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN (AKRONIM)

AK	Angkatan Kerja
BAK	Bukan Angkatan Kerja
BPS	Badan Pusat Statistik
EPR	<i>Employment-to-Population Ratio</i>
ICLS	<i>The International Conference of Labour Statisticians</i>
ILO	<i>International Labor Organization</i>
ISCED	<i>International Standard Classification of Education</i>
ISIC	<i>International Standard Industrial Classification</i>
KBLI	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
KILM	<i>Key Indicator of The Labor Market</i>
MDG's	<i>Millenium Development Goals</i>
OECD	<i>Organisation for Economic Co-Operation and Development</i>
Sakernas	Survei Angkatan kerja Nasional
SP	Sensus Penduduk
STP	Setengah Penganggur
SUPAS	Survey Penduduk Antar Sensus
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

## RINGKASAN EKSEKUTIF

TPAK di Indonesia pada Februari 2012 mencapai 69,66 persen atau mengalami kenaikan apabila dibandingkan pada kondisi Agustus 2011 (68,34 persen). Hal ini dapat diartikan bahwa persentase tenaga kerja yang terlibat aktif di pasar tenaga kerja naik sebesar 1,32 persen poin. Namun demikian TPAK mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan kondisi selama setahun terakhir, meski penurunannya tidak terlalu signifikan, yaitu sebesar 0,30 persen poin dibanding Februari 2011 (69,96 persen).

Secara nasional, angka EPR pada Februari 2012 ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan keadaan Februari maupun keadaan Agustus 2011. Dibandingkan dengan keadaan Februari 2011, EPR hanya meningkat tipis sebesar 0,04 persen, dan jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2011 EPR meningkat sebesar 1,4 persen poin menjadi 65,25 persen. Angka ini bisa diinterpretasikan dari 100 orang penduduk usia 15 tahun ke atas, terdapat sekitar 65 orang yang bekerja pada Februari 2012.

Kenaikan EPR ini terlihat baik pada kelompok umur 25 tahun ke atas (penduduk dewasa) maupun pada penduduk usia muda (15-24 tahun). Jika dirinci berdasarkan jenis kelamin dan klasifikasi daerah, juga terjadi kenaikan EPR baik pada laki-laki maupun perempuan pada masing-masing kelompok umur serta menurut daerah perkotaan dan perdesaan.

Berdasarkan series data baik pada Februari 2011 dan Agustus 2011 komposisi penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan didominasi oleh pekerja berstatus wiraswasta, kemudian disusul pekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/ pegawai) dan terakhir adalah pekerja keluarga. Hasil Sakernas Februari 2012 menunjukkan hal yang sama, proporsi penduduk yang bekerja sebagai wiraswasta mencapai 48,91 persen, disusul oleh pekerja dengan upah/gaji (33,81 persen), sedangkan sisanya pekerja keluarga hanya sebesar 17,29 persen.

Sementara itu, secara nasional pada Februari 2012, proporsi penduduk bekerja yang tergolong "pekerja rentan/vulnerable employment " mencapai 62,71 persen, yang berarti dari 100 orang pekerja yang termasuk kategori pekerja rentan sekitar 62 orang.

Komposisi sektoral hasil Sakernas Februari 2012 ternyata tidak terjadi pergeseran berarti dibandingkan dengan keadaan Februari 2011 maupun Agustus 2011. Dibandingkan dengan keadaan Februari 2011, semua sektor mengalami kenaikan persentase kecuali untuk sektor

pertanian yang turun sebesar 1,67 persen dan subsektor angkutan yang turun tipis sebesar 0,42 persen. Jika dibandingkan keadaan Agustus 2011, Sektor jasa-jasa mengalami kenaikan tipis sebesar 0,22 persen, begitu juga dengan sektor pertanian yang hanya naik sekitar 0,67 persen poin. Sektor manufaktur justru mengalami penurunan 0,89 persen. Penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh adanya musim panen di sekitar bulan Februari-Maret, sehingga pekerja informal di sektor manufaktur beralih ke sektor pertanian.

Pekerja paruh waktu baik secara absolut maupun tingkat/persentase selama periode Februari 2011 sampai Februari 2012 sedikit berfluktuatif. Tingkat pekerja paruh waktu pada Februari 2011 sebesar 16,59 persen, meningkat sehingga pada Agustus 2011 menjadi 19,21 persen, kemudian kembali menurun menjadi 18,33 persen pada Februari 2012.

Pada Sakernas Februari 2011 proporsi pekerja informal sebesar 58,37 persen mengalami penurunan sebesar 2,53 persen pada Februari 2012 ini. Dibandingkan keadaan Agustus 2011, proporsi pekerja informal mengalami kenaikan yang tentunya diikuti dengan penurunan proporsi pekerja formal. Persentase pekerja sektor informal pada Agustus 2011 adalah 54,66 persen, pada Februari 2012 ini naik menjadi 55,84 persen. Sektor formal pada Agustus 2011 mencapai 45,34 persen dan turun 1,18 persen poin pada Februari 2012 menjadi 44,16 persen.

Selama periode Februari 2011 sampai Februari 2012 TPT di Indonesia terus mengalami penurunan secara konsisten dan perlahan. TPT pada Februari 2011 sebesar 6,80 persen, turun menjadi 6,56 persen pada Agustus 2011 terus turun menjadi sebesar 6,32 persen pada Februari 2012. Angka 6,32 persen tersebut mempunyai arti bahwa dari 100 orang angkatan kerja di Indonesia ada sekitar 6 orang yang masuk kategori penganggur.

Pada Februari dan Agustus 2011, TPT usia muda masing-masing sebesar 23,92 dan 19,99 persen sedangkan pada Februari 2012 TPT usia muda menurun menjadi 19,08 persen. Berdasarkan klasifikasi jenis kelamin Laki-Perempuan, TPT usia muda cenderung mengalami penurunan dari Februari maupun Agustus 2011, kecuali TPT usia muda laki-laki yang mengalami kenaikan dari Agustus 2011 sebesar 19,27 persen, pada Februari 2012 ini naik menjadi 19,33 persen. Dari Februari 2011 TPT usia muda di wilayah perkotaan mengalami penurunan yang relatif besar yaitu 6,63 persen poin.

Penurunan jumlah penganggur usia muda secara absolut mengakibatkan turunnya *share* penganggur usia muda terhadap total penganggur dan turunnya *share* penganggur usia muda



terhadap total penduduk usia muda. Jika dibandingkan dengan keadaan setahun yang lalu pada Februari 2011, *share* penganggur usia muda terhadap total penganggur menurun sekitar 7 persen menjadi 53,57 persen. Pada Agustus 2011 *share* penganggur usia muda terhadap total penganggur adalah 54,23 persen dan turun sebesar 0,66 persen poin pada Februari 2012 menjadi 53,57 persen. Artinya, pada Februari 2012, dari 100 penganggur, terdapat sekitar 54 orang penganggur diantaranya berusia antara 15 sampai 24 tahun.

Secara umum dapat dikatakan bahwa TPT menurut tingkat pendidikan cenderung turun dari waktu ke waktu, kecuali TPT pada tingkat sekolah dasar yang naik dari 4,86 persen pada Februari 2011 menjadi 5,04 persen pada Februari 2012, namun mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan kondisi Agustus 2011 yaitu sebesar 0,04 persen. TPT terbesar berdasarkan tingkat pendidikan dapat ditemui pada tingkat pendidikan sekolah menengah dimana pada Februari 2011 TPT pada tingkat pendidikan ini adalah 11,37 persen, sedangkan pada Agustus 2011 turun menjadi 10,59 persen dan mencapai 10,05 pada Februari 2012.

Pada Februari 2012 jumlah setengah penganggur di Indonesia mencapai 14,87 juta jiwa, dimana 8,07 juta jiwa berjenis kelamin laki-laki dan sisanya adalah perempuan. Apabila dibandingkan dengan Agustus 2011 jumlah setengah penganggur di Indonesia naik 1,34 juta orang. Sementara itu kondisi selama kurun waktu setahun terakhir memperlihatkan adanya penurunan jumlah setengah penganggur sekitar 870 ribu orang. Penurunan angka secara nasional ini ditandai dengan penurunan pada jumlah setengah penganggur menurut jenis kelamin baik perempuan maupun laki-laki.

Pada Februari 2012 tingkat ketidakaktifan adalah 30,34 persen yang turun sebesar 1,32 persen poin dibanding Agustus 2011 (31,66 persen). Penurunan 1,27 persen poin terjadi pada tingkat ketidakaktifan perempuan yaitu dari 48 per seratus penduduk pada Agustus 2011 menjadi 46 per seratus penduduk pada Februari 2012.

Secara nasional, angka Sakernas Februari 2012 tidak menunjukkan perubahan komposisi angkatan kerja berdasarkan pendidikan yang signifikan. Komposisi angkatan kerja menurut tingkat pendidikan pada periode satu tahun terakhir relatif tidak mengalami perubahan berarti. Bahkan, hanya terjadi kenaikan tipis pada tingkat pendidikan tinggi (8,15 persen pada Agustus 2011 menjadi 9,28 persen pada Februari 2012).



## 1. PENDAHULUAN

Data ketenagakerjaan merupakan aspek penting untuk menggambarkan indikator pasar tenaga kerja di Indonesia. Salah satu sumber penyajian indikator ini berasal dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam usaha monitoring dinamika ketenagakerjaan, agar para pengambil keputusan dapat lebih cepat mengambil kebijakan dalam usaha mengatasi dan memperbaiki permasalahan ketenagakerjaan khususnya di Indonesia, Badan Pusat Statistik, mulai Triwulan I Februari 2011 menyusun publikasi yang merujuk pada publikasi Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organization-ILO*), yaitu Indikator Kunci Pasar Tenaga Kerja/KILM (*Key Indicators of the Labor Market*). ILO telah meluncurkan Indikator Kunci Pasar Tenaga Kerja/KILM pada tahun 1999 untuk melengkapi program reguler pengumpulan data dan untuk meningkatkan penyebaran data pada elemen kunci dari pasar tenaga kerja dunia. Edisi KILM Indonesia ini merujuk pada KILM yang diterbitkan ILO pada tahun 2005.

### 1.1. SAKERNAS DAN ANALISIS KETENAGAKERJAAN

Data ketenagakerjaan yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui sensus dan survei antara lain: Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS). Dari survei-survei tersebut, hanya Sakernas yang dirancang khusus untuk mengumpulkan data yang dapat menggambarkan keadaan umum ketenagakerjaan antar periode pencacahan.

Kegiatan pengumpulan data ketenagakerjaan pertama kali dilaksanakan tahun 1976. Sampai dengan saat ini, Sakernas mengalami berbagai perubahan baik dalam periode pencacahan maupun cakupan sampel wilayah dan rumah tangga. Tahun 1986 sampai dengan 1993 Sakernas dilaksanakan secara Triwulanan, tahun 1994 sampai dengan 2001 secara tahunan setiap bulan Agustus, sedangkan tahun 2002 sampai dengan 2004 selain secara tahunan juga dilaksanakan secara Triwulanan. Mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 Sakernas dilakukan secara semesteran.

Dengan semakin mendesaknya tuntutan data ketenagakerjaan baik variasi, kontinuitas, kemutakhiran dan peningkatkan akurasi data yang dihasilkan maka pengumpulan data Sakernas mulai tahun 2011 dilakukan kembali secara Triwulanan yaitu; bulan Februari (Triwulan I), Mei

(Triwulan II), Agustus (Triwulan III), dan November (Triwulan IV) yang penyajian data dirancang sampai tingkat provinsi. Pelaksanaan Sakernas Triwulan III (bulan Agustus) selain sampel Triwulan juga terdapat sampel tambahan, untuk kepentingan angka estimasi penyajian data sampai tingkat kabupaten/kota.

Secara umum, tujuan pengumpulan data melalui Sakernas adalah menyediakan data pokok ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Secara khusus, untuk memperoleh informasi data jumlah penduduk yang bekerja, pengangguran dan penduduk yang pernah berhenti/pindah bekerja serta perkembangannya di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun nasional.

Selama periode Februari 2011-Februari 2012 Sakernas dilaksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan jumlah sampel sekitar 50.000 rumah tangga (Sakernas Triwulan) dan 200.000 rumah tangga (Sakernas Agustus). Untuk Sakernas Agustus, jumlah sampel tersebar pada 20.000 blok sensus di seluruh provinsi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Dari 20.000 blok sensus tersebut diantaranya 5.000 blok sensus adalah sampel Sakernas Triwulan III dan 15.000 blok sensus merupakan sampel Sakernas tambahan. Penambahan jumlah sampel ini bertujuan untuk memperoleh estimasi data hingga tingkat kabupaten/kota. Sebagai catatan, rumah tangga korps diplomatik, rumah tangga yang tinggal baik blok sensus khusus dan rumah tangga khusus yang berada di blok sensus biasa tidak dipilih dalam sampel.

Dari setiap rumah tangga terpilih dikumpulkan keterangan mengenai keadaan umum setiap anggota rumah tangga yang mencakup nama, hubungan dengan kepala rumah tangga, jenis kelamin, dan umur. Khusus untuk anggota rumah tangga yang berumur 10 tahun keatas akan ditanyakan keterangan mengenai status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, pengangguran dan pengalaman kerja.

## 1.2. SAKERNAS DAN KILM

Dengan berbagai macam variabel yang dikumpulkan pada Sakernas, dapat disusun serangkaian indikator kunci yang merujuk pada publikasi internasional (ILO) yaitu KILM. Tetapi, yang perlu menjadi catatan adalah, pada saat melakukan interpretasi data hasil Sakernas dengan data ketenagakerjaan dari sumber lain (SP dan SUPAS) perlu memperhatikan beberapa hal, karena data-data tersebut tidak dapat dibandingkan secara langsung. Beberapa faktor perlu dipertimbangkan oleh para pemakai data dalam menginterpretasi dan menganalisa data ketenagakerjaan yang tersedia. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan meliputi:

### 1) Tujuan Survei

Sakernas merupakan survei khusus untuk mengumpulkan data ketenagakerjaan. Sedangkan SP maupun Supas bertujuan untuk mengetahui sifat demografi secara umum. Dengan demikian informasi yang dikumpulkan dalam SP dan Supas lebih banyak dan beragam, antara lain meliputi data pendidikan, migrasi, keluarga berencana dan ketenagakerjaan. Begitu pula informasi yang dikumpulkan melalui Susenas lebih beragam sifatnya, seperti data pengeluaran/konsumsi, ketenagakerjaan, kesehatan dan perumahan. Perbedaan tujuan survei ini menyebabkan kualitas data ketenagakerjaan antar berbagai survei tersebut relatif berbeda.

### 2) Ukuran Sampel

Ukuran sampel dalam Sakernas berbeda dengan ukuran sampel dalam SP dan Supas maupun Susenas. Perbedaan ini menyebabkan sampling error yang dikandung oleh angka perkiraan dari masing-masing sumber data juga berbeda. Semakin kecil ukuran sampel, maka akan semakin besar sampling errornya.

### 3) Faktor Pengali

Faktor pengali yang digunakan dalam publikasi ini, berdasarkan jumlah penduduk hasil SP2010 final yang diproyeksikan ke bulan Agustus 2011.

### 4) Kualitas Petugas Lapangan

Sampai dengan Semester II (Agustus) 2006, petugas Sakernas hanya terdiri dari pencacah dan pengawas/pemeriksa. Mulai Sakernas Semester I (Februari) 2007 hingga Sakernas Semester II (Agustus) 2010 pencacahan dilakukan secara tim, dalam 1 (satu) tim terdiri dari 2 pencacah dan 1 (satu) koordinator tim. Petugas-petugas tersebut pada umumnya adalah pegawai Badan Pusat Statistik yang ada di kecamatan (Koordinator Statistik Kecamatan) dan BPS Kabupaten/Kota setempat. Sebagian besar dari mereka umumnya telah mempunyai pengalaman dalam berbagai survei maupun sensus serta lebih menguasai medan/lapangan. Mulai 2011, petugas Sakernas tidak lagi secara tim, tetapi terdiri dari pencacah dan pengawas dimana seorang pengawas membawahi 2-3 orang pencacah.

#### 5) Perencanaan Kuesioner

Cara menyusun pertanyaan mengenai ketenagakerjaan dalam kuesioner dapat berpengaruh terhadap hasil survei maupun sensus. Ini meliputi bentuk kalimat/pertanyaan yang tertulis, urutan pertanyaan, pemilihan kata-kata yang tepat dalam pertanyaan, dan banyaknya pertanyaan maupun jenis keterangan yang ditanyakan. Dalam Sakernas, telah diusahakan bentuknya ringkas/ sederhana, mudah dimengerti serta pertanyaan pokoknya tidak berubah-ubah.

#### 6) Waktu Pelaksanaan/Pencacahan

Waktu pelaksanaan lapangan antara Sakernas, Susenas, SP, dan Supas berbeda. Hal tersebut dapat menyebabkan perbedaan hasil yang diperoleh karena pengaruh musimannya.

Mengingat bahwa sejak tahun 2011 Sakernas telah dilakukan secara triwulanan dengan maksud sebagai *early warning system* di bidang ketenagakerjaan, perlu disusun rangkaian indikator ketenagakerjaan dengan memanfaatkan data Sakernas tersebut. Di sisi lain, penyusunan indikator kunci ketenagakerjaan/KILM pada awalnya dirancang dengan dua tujuan utama, yaitu:

- 1) Menyajikan indikator inti pasar tenaga kerja.
- 2) Meningkatkan ketersediaan indikator-indikator ketenagakerjaan untuk memantau perkembangan pasar tenaga kerja terkini. Indikator-indikator ini merupakan hasil kolaborasi yang melibatkan ILO bersama para ahli dari Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (*Organization for Economic Co-operation and Development-OECD*) dan beberapa perwakilan nasional dari Departemen Tenaga Kerja dan kantor statistik berbagai negara.

### 1.3. PERAN KILM DI BIDANG KETENAGAKERJAAN

Identifikasi dan kuantifikasi inefisiensi dalam pasar tenaga kerja seperti underutilisasi tenaga kerja dan defisit pekerjaan yang layak (*decent work*) adalah langkah pertama dalam merancang kebijakan ketenagakerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Pandangan luas dunia kerja menuntut pengumpulan data yang lengkap, pengorganisasian dan analisa informasi pasar tenaga kerja. Dalam konteks ini, KILM dapat berfungsi sebagai alat dalam memantau dan menilai banyak hal yang terkait dengan fungsi pasar tenaga kerja. Berikut ini adalah beberapa contoh bagaimana KILM dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan di bidang ketenagakerjaan.

Beberapa peran KILM dalam analisis pasar tenaga kerja antara lain:

1) Mempromosikan Agenda ILO : Pekerjaan yang Layak (*Decent Work*).

Salah satu tujuan agenda ILO mempromosikan pekerjaan yang layak adalah untuk memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan produktif, dalam kondisi kebebasan, kesetaraan dan keamanan. Menerapkan konsep "layak" untuk segala bentuk kegiatan ekonomi merupakan sesuatu yang multitafsir. Persepsi mengenai upah yang layak dapat berbeda secara signifikan dari satu orang ke orang lainnya.

Selain pekerjaan yang layak, permasalahan yang muncul dalam dunia ketenagakerjaan adalah kurangnya kesempatan kerja. Kurangnya kesempatan kerja bisa diidentifikasi menggunakan pendekatan indikator pengangguran (KILM 8 dan KILM 9), tetapi juga bisa menggunakan indikator yang lebih rinci yaitu tingkat ketidakaktifan (KILM 13). Untuk mengetahui kualitas dan jenis pekerjaan dapat dilakukan pendekatan, misalnya, dengan mengidentifikasi individu yang masuk dalam kelompok pekerja rentan (*vulnerable employment*), yaitu pekerja berdasarkan status dan sektor (KILM 3 dan KILM 4), jam kerja yang berlebih/*exceeds working hours* (KILM 6), pekerja sektor informal (KILM 7) dan setengah penganggur (KILM 12).

2) Pemantauan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDG's).

Tujuan utama kebijakan nasional serta strategi nasional pembangunan sebagai bagian dari upaya untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (MDG's) adalah meningkatnya jumlah pekerja penuh (*full employment*), pekerja yang produktif dan penyediaan pekerjaan yang layak (*decent work*) untuk semua. Pekerjaan yang layak dan produktif bagi semua merupakan isu sentral untuk mengatasi kemiskinan dan kelaparan. MDG pertama memasukkan target baru (disepakati pada tahun 2008) yaitu "mencapai pekerja penuh dan layak bagi semua, termasuk perempuan dan orang-orang muda". Empat indikator yang dipilih untuk memantau kemajuan menuju sasaran 1b dalam MDG's tersedia dalam KILM, yaitu rasio penduduk bekerja terhadap total penduduk (*Employment to Population Ratio/EPR*), proporsi pekerja yang hidup di bawah garis kemiskinan, tingkat pekerja rentan (*vulnerable employment*), dan tingkat pertumbuhan produktivitas tenaga kerja, sesuai dengan indikator KILM 2, KILM 3, KILM 18 dan KILM 20.

- 3) Memantau kesetaraan gender di pasar tenaga kerja.

Wanita menghadapi tantangan khusus dalam mencapai pekerjaan yang layak. Sebagian besar indikator KILM dipisahkan menurut jenis kelamin, yang memungkinkan untuk melakukan perbandingan kesempatan kerja laki-laki dan perempuan.

- 4) Mengkaji tenaga kerja di era globalisasi.

Globalisasi memiliki potensi manfaat bagi semua, namun sampai saat ini hal tersebut tidak mencakup orang banyak. Oleh karena itu, perlu satu cara untuk menghadapi era globalisasi dengan tetap mendorong penciptaan kesempatan kerja yang layak untuk semua. Salah satu cara untuk melakukannya adalah membuat tenaga kerja menjadi tujuan sentral dari kebijakan ekonomi makro dan sosial. Indikator KILM dapat bermanfaat dalam hal ini dengan memonitor dinamika ketenagakerjaan yang terkait dengan globalisasi. Misalnya, ada penelitian yang menunjukkan bahwa kehilangan pekerjaan/penciptaan serta perubahan upah dan produktivitas dipengaruhi oleh globalisasi. Jika indikator mencerminkan konsekuensi negatif dari globalisasi, maka pembuat kebijakan memiliki pilihan untuk mengubah kebijakan ekonomi makro sehingga dapat meminimalkan biaya penyesuaian (*adjustment cost*) dan mendistribusikan keuntungan dari globalisasi secara lebih adil.

#### 1.4. ANALISIS PASAR TENAGA KERJA MENGGUNAKAN KILM

Semakin banyak negara yang mempublikasikan angka pengangguran nasional dan data ketenagakerjaan agregat. Namun, pengguna harus bijaksana menggunakan statistik ini dalam rangka melihat dinamika pasar tenaga kerja. Salah satu keuntungan menggunakan tingkat pengangguran agregat, misalnya, relatif lebih mudahnya dalam hal pengumpulan dan komparasi antardaerah. Tetapi, melihat angka pengangguran saja dengan mengabaikan unsur-unsur lain dari pasar tenaga kerja yang lain merupakan suatu kekeliruan. Adalah penting untuk menyadari bahwa pengangguran “**hanya**” merupakan salah satu aspek dalam indikator ketenagakerjaan. Oleh karena itu, langkah pertama dalam analisis pasar kerja, adalah menentukan rincian status tenaga kerja dalam populasi. Penduduk usia kerja dapat didekomposisi menjadi orang-orang yang tidak aktif secara ekonomi (di luar tenaga kerja/bukan angkatan kerja, KILM 13); bekerja (KILM 2) atau tidak bekerja dan mencari pekerjaan (menganggur, KILM 8). Semakin besar penduduk yang termasuk dalam kelompok pengangguran atau bukan angkatan kerja, atau keduanya, menunjukkan *underutilisasi* yang besar dari angkatan kerja yang potensial. Pemerintah



yang menghadapi situasi ini semestinya berusaha untuk menganalisis alasan untuk tidak aktif, yang pada gilirannya bisa menentukan pilihan kebijakan yang penting untuk mengubah situasi.

Jika mayoritas penduduk aktif terdiri dari perempuan yang tidak bekerja karena mereka memiliki tanggung jawab rumah tangga, pemerintah mungkin ingin mendorong lingkungan yang memfasilitasi partisipasi ekonomi perempuan melalui, misalnya, pembentukan pusat-pusat penitipan anak atau jam kerja fleksibel bagi perempuan. Atau, program untuk menggalakkan pekerjaan pada penyandang cacat dapat membantu menurunkan tingkat ketidakaktifan, jika cacat adalah alasan umum untuk tidak aktif. Hal yang lebih sulit adalah mengembalikan orang yang telah meninggalkan pasar kerja ke dalam angkatan kerja karena alasan "putus asa" / *discourage worker*, yaitu karena mereka merasa bahwa tidak ada pekerjaan yang sesuai yang tersedia bagi mereka, dan mereka tidak memiliki kualifikasi yang tepat, atau karena mereka tidak tahu ke mana harus mencari pekerjaan.

Pengangguran juga harus dianalisis menurut jenis kelamin (KILM 8), usia (KILM 9), lamanya menganggur (KILM 10) dan tingkat pendidikan (KILM 11) untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari komposisi pengangguran sehingga bisa menentukan kebijakan pengangguran yang tepat. Karakteristik lain dari pengangguran yang tidak ditampilkan dalam KILM, seperti latar belakang sosial-ekonomi, pengalaman kerja, dll, juga penting untuk dianalisa, jika data karakteristik tersebut tersedia, untuk menentukan kelompok mana yang menghadapi kesulitan tertentu. Paradoksnya, tingkat pengangguran yang rendah mungkin menyamarkan tingkat kemiskinan dalam suatu negara (KILM 20), sedangkan tingkat pengangguran tinggi dapat terjadi di negara-negara dengan perkembangan ekonomi yang signifikan dengan insiden kemiskinan rendah. Di negara-negara berkembang dengan skema perlindungan sosial atau bila tabungan atau cara lain dukungan yang tersedia, pekerja yang lebih baik mampu untuk meluangkan waktu untuk mencari pekerjaan lebih diinginkan. Oleh karena itu, **masalah di banyak negara berkembang bukanlah tingkat pengangguran yang tinggi, melainkan kurangnya kesempatan kerja yang layak dan produktif bagi mereka yang bekerja.** Hal ini membawa kita pada kebutuhan untuk membedah jumlah total lapangan kerja serta untuk menilai kesejahteraan penduduk yang bekerja, di bawah premis bahwa tidak semua pekerjaan adalah "pekerjaan yang layak". Jika penduduk yang bekerja terdiri dari sebagian besar bekerja sendiri atau pekerja keluarga (lihat KILM 3), lalu, dibandingkan dengan total penduduk yang bekerja (KILM 2), apakah indikator ini akan kehilangan nilainya sebagai ukuran

normatif? Apakah orang-orang ini bekerja? Ya, menurut definisi internasional. Apakah mereka dalam pekerjaan yang layak? Mungkin tidak. Meskipun secara teknis bekerja, beberapa pekerja yang berusaha sendiri atau pekerja keluarga akan bertahan pekerjaan mereka saat ini sehingga batas antara bekerja dan menganggur sangat tipis. Hal ini terlihat ketika terbuka lowongan untuk pekerjaan yang bergaji (buruh/ karyawan/pegawai) di ekonomi formal, rombongan tenaga kerja ini akan berlomba-lomba untuk mengajukan lamaran.

Identifikasi lebih lanjut harus dilakukan untuk menentukan apakah pekerja tersebut umumnya miskin (KILM 20), terlibat dalam kegiatan pertanian tradisional (KILM 4), menjual barang-barang di pasar informal tanpa keamanan kerja (KILM 7), jam kerja yang berlebihan (KILM 6) atau ingin menambah jam kerja (KILM 12).

<http://www.bps.go.id>

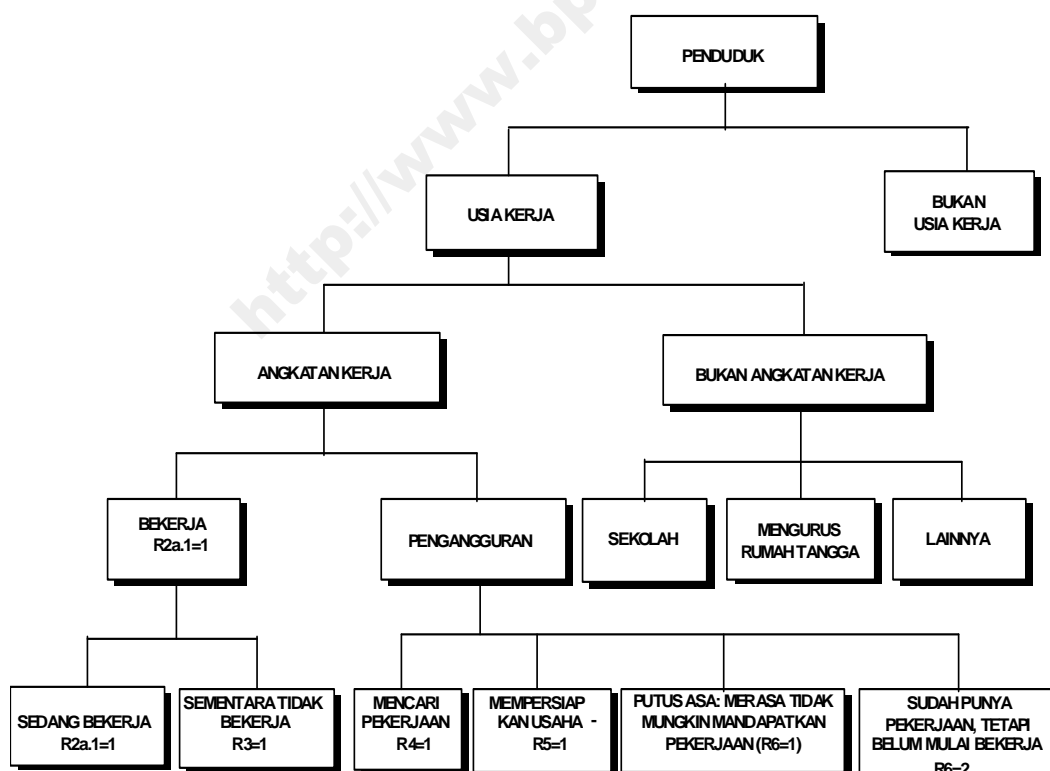
## 2. PENJELASAN TEKNIS

Pada subbab ini, akan disampaikan penjelasan teknis terkait dengan konsep dan definisi yang digunakan dalam Sakernas maupun konsep dan definisi yang digunakan dalam KILM.

### 2.1. PENJELASAN UMUM

Konsep/definisi ketenagakerjaan yang digunakan BPS merujuk pada rekomendasi *International Labor Organization (ILO)* sebagaimana tercantum dalam buku “*Surveys of Economically Active Population, Employment, Unemployment and Under employment*” *An ILO Manual on Concepts and Methods, ILO 1992*. Hal ini dimaksudkan terutama agar data ketenagakerjaan yang dihasilkan dari berbagai survei di Indonesia dapat dibandingkan secara internasional, tanpa mengesampingkan kondisi ketenagakerjaan spesifik Indonesia.

Pendekatan teori ketenagakerjaan yang digunakan dalam Sakernas adalah Konsep Dasar Angkatan Kerja (*Standard Labor Force Concept*), seperti pada diagram dibawah ini:



Beberapa konsep umum yang digunakan dalam Sakernas yang juga diadopsi untuk penyusunan KILM, meliputi konsep dan definisi mengenai penduduk, usia kerja, periode referensi dan kriteria satu jam.

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Berdasarkan konsep dasar ketenagakerjaan, penduduk dikelompokkan menjadi penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja dibedakan atas dua kelompok, angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Pengukurannya didasarkan pada periode rujukan (*time reference*), yaitu kegiatan yang dilakukan selama seminggu yang lalu sehari sebelum pencacahan.

Usia kerja adalah batas umur yang ditetapkan untuk pengelompokan penduduk yang aktif secara ekonomi. Indonesia menggunakan batas bawah usia kerja (*economically active population*) 15 tahun (meskipun dalam survei dikumpulkan informasi mulai dari usia 10 tahun) dan tanpa batas atas usia kerja. Di negara lain, penentuan batas bawah dan batas atas usia kerja bervariasi sesuai dengan kebutuhan/situasinya. Sebagai contoh, beberapa negara yang menggunakan batas bawah adalah Mesir (6 tahun), Brazil (10 tahun), Swedia, USA (16 tahun), Kanada (14 dan 15 tahun), India (5 dan 15 tahun), Venezuela (10 dan 15 tahun), sedangkan negara-negara yang menggunakan batas atas adalah Denmark, Swedia, Norwegia, Finlandia (74 tahun), Mesir, Malaysia, Mexico (65 tahun). Banyak negara seperti Indonesia tidak menggunakan batas atas.

Angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja dan pengangguran. Sedangkan bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk yang pada periode rujukan tidak mempunyai/melakukan aktivitas ekonomi, baik karena sekolah, mengurus rumah tangga atau lainnya (olahraga, kursus, piknik, dan kegiatan sosial (berorganisasi, kerja bakti)).

Yang dimaksud dengan bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu yang lalu. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus. Penghasilan atau keuntungan mencakup upah/gaji/pendapatan termasuk semua tunjangan dan bonus bagi pekerja/karyawan/ pegawai dan hasil usaha berupa sewa, bunga atau keuntungan, baik berupa uang atau barang bagi pengusaha. Kegiatan bekerja ini mencakup, baik yang sedang bekerja maupun yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu

yang lalu sementara tidak aktif bekerja, misal karena sakit, cuti, menunggu panen, mogok kerja, tugas belajar dan sejenisnya.

Pengangguran meliputi penduduk yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus asa), atau sudah diterima bekerja, tetapi belum mulai bekerja. Yang dimaksud mencari pekerjaan adalah upaya yang dilakukan untuk memperoleh pekerjaan pada suatu periode rujukan. Mempersiapkan usaha baru adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha yang 'baru', yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/karyawan/pegawai dibayar maupun tak dibayar. Mempersiapkan suatu usaha yang dimaksud adalah apabila 'tindakannya nyata' seperti mengumpulkan modal atau perlengkapan/alat, mencari lokasi/tempat, mengurus surat ijin usaha dan sebagainya, telah/sedang dilakukan. Merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa) adalah alasan bagi mereka yang berkali-kali mencari pekerjaan tetapi tidak berhasil mendapatkan pekerjaan sehingga ia merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan yang diinginkan. Atau mereka yang merasa karena keadaan situasi/kondisi/iklim/musim menyebabkan tidak mungkin mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Sudah diterima bekerja, tetapi belum mulai bekerja adalah alasan bagi mereka tidak mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha karena sudah diterima bekerja, tapi pada saat pencacahan belum mulai bekerja.

Periode referensi merupakan periode waktu yang ditetapkan untuk membatasi keterangan responden. Dalam survei rumah tangga atau individu, periode referensi yang pendek (*a short recent reference period*) akan meminimumkan kesalahan responden dalam mengingat (*recall*) dan juga mengurangi masalah (statistik) yang timbul oleh karena perpindahan penduduk dan perubahan status aktivitas, pekerjaan dan karakteristik penduduk lainnya. Standar internasional untuk periode referensi yang pendek adalah satu hari atau satu minggu. Periode referensi satu minggu (yang lalu) paling banyak diterapkan di negara-negara yang melaksanakan survei angkatan kerja nasional, termasuk Indonesia.

Selain periode referensi seminggu yang lalu, dalam Sakernas juga dikenal Kriteria Satu Jam. Kriteria satu jam digunakan dengan pertimbangan untuk mencakup semua jenis pekerjaan yang mungkin ada pada suatu negara, termasuk di dalamnya adalah pekerjaan dengan waktu singkat (*short-time work*), pekerja bebas, *stand-by work* dan pekerjaan yang tak beraturan lainnya. Kriteria satu jam juga dikaitkan dengan definisi bekerja dan penganggur yang digunakan, di

mana penganggur adalah situasi dari ketiadaan pekerjaan secara total (*lack of work*) dari jumlah jam kerja dinaikkan maka akan mengubah definisi penganggur yaitu bukan lagi ketiadaan pekerjaan secara total.

Di samping itu, juga untuk memastikan bahwa pada suatu tingkat agregasi tertentu input tenaga kerja total berkaitan langsung dengan produksi total. Hal ini diperlukan terutama ketika dilakukan analisis gabungan antara statistik ketenagakerjaan dan statistik produksi.

Berdasarkan argumen teknis, ILO merekomendasikan untuk memperhatikan *the one hour criterion*, yaitu digunakannya konsep/definisi satu jam dalam periode referensi tertentu untuk menentukan seseorang dikategorikan sebagai *employed* (bekerja). BPS menggunakan konsep/definisi “bekerja paling sedikit 1 jam dalam seminggu yang lalu” untuk mengkategorikan seseorang (*currently economically active population*) sebagai bekerja, tanpa melihat lapangan usaha, jabatan, maupun status pekerjaannya.

## 2.2. INDIKATOR KUNCI PASAR TENAGA KERJA

Organisasi Perburuhan Internasional (*International Labour Organization-ILO*) meluncurkan Indikator Kunci Pasar Tenaga Kerja/KILM (*Key Indicator of Labor Market*) pada tahun 1999 untuk melengkapi program reguler pengumpulan data dan untuk meningkatkan penyebaran data pada elemen kunci dari pasar tenaga kerja dunia.

Terdapat 20 (dua puluh) indikator yang disusun oleh ILO yang dikelompokkan ke dalam 8 (delapan) kelompok, yaitu:

- 1) Partisipasi di dunia kerja, yang terdiri dari KILM 1, yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja;
- 2) Indikator pekerja, terdiri dari KILM 2 (rasio pekerja terhadap jumlah penduduk), KILM 3 (penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan utama), KILM 4 (lapangan usaha tenaga kerja), KILM 5 (pekerja paruh waktu), KILM 6 (jam kerja) dan KILM 7 (tenaga kerja di ekonomi informal);
- 3) Indikator pengangguran, *underemployment* dan ketidakaktifan, yang terdiri dari KILM 8 (pengangguran), KILM 9 (pengangguran pada kelompok pemuda), KILM 10 (pengangguran jangka panjang), KILM 11 (pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan), KILM 12 (*underemployment*), dan KILM 13 (tingkat ketidakaktifan);

- 4) Indikator pendidikan dan melek huruf, yang terdiri dari KILM 14 (pencapaian pendidikan dan melek huruf);
- 5) Indikator upah dan biaya tenaga kerja, yang terdiri dari KILM 15 (indeks upah sektor manufaktur), KILM 16 (indikator upah dan pendapatan berdasarkan jabatan) dan KILM 17 (upah per jam);
- 6) Produktifitas Tenaga Kerja yang terdiri dari KILM 18 (produktifitas tenaga kerja);
- 7) Indikator elastisitas tenaga kerja yang termuat dalam KILM 19 (elastisitas tenaga kerja); dan
- 8) Indikator kemiskinan, pekerja miskin dan distribusi pendapatan yang tertuang dalam KILM 20 (indikator kemiskinan, pekerja miskin dan distribusi pendapatan).

### 2.2.1. PARTISIPASI DI DUNIA KERJA

#### **KILM 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**

TPAK adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat aktif di pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan, yang memberikan indikasi ukuran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa. Rincian angkatan kerja menurut jenis kelamin dan kelompok umur memberikan profil distribusi penduduk yang aktif secara ekonomi. Secara umum, kegunaan indikator ini adalah untuk mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah dan menunjukkan besaran relatif dan pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk produksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (*labor supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Beberapa konsep yang berkaitan dengan indikator ini adalah sebagai berikut:

#### ***Angkatan Kerja (AK)***

Konsep angkatan kerja merujuk pada kegiatan utama yang dilakukan oleh penduduk usia kerja selama periode tertentu. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan penganggur.

Dalam angkatan kerja terdapat penduduk yang kegiatannya adalah bekerja. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan paling sedikit 1 (satu) jam secara tidak terputus selama seminggu yang lalu. Kegiatan bekerja ini mencakup, baik yang sedang bekerja maupun yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu sementara tidak bekerja, misalnya karena cuti, sakit dan sejenisnya. Konsep bekerja satu jam selama seminggu yang lalu juga digunakan oleh banyak negara antara lain Pakistan, Filipina, Bulgaria, Hungaria, Polandia, Romania, Federasi Rusia, dan lainnya.

### ***Bukan Angkatan Kerja (BAK)***

Penduduk usia kerja yang tidak termasuk angkatan kerja mencakup penduduk yang bersekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya.

## 2.2.2. INDIKATOR PEKERJA

### **KILM 2. Rasio Pekerja Terhadap Jumlah Penduduk/ *Employment to Population Ratio* (EPR)**

Rasio pekerja terhadap jumlah penduduk (EPR) didefinisikan sebagai proporsi penduduk usia kerja suatu negara yang berstatus bekerja terhadap penduduk usia kerja. Rasio yang tinggi berarti sebagian besar penduduk suatu negara adalah bekerja, sementara rasio rendah berarti bahwa sebagian besar penduduk tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang berhubungan dengan pasar, karena mereka menganggur atau (lebih mungkin) tidak termasuk dalam angkatan kerja yang sering disebut sebagai Bukan Angkatan Kerja (BAK).

Rasio ini memberikan informasi tentang kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja, karena di banyak negara indikator ini menghasilkan analisis yang lebih mendalam dibandingkan dengan tingkat pengangguran. Meskipun secara keseluruhan rasio tinggi biasanya dianggap sebagai positif, indikator ini saja tidak cukup untuk menilai tingkat pekerjaan yang layak atau tingkat defisit pekerjaan yang layak. Indikator tambahan diperlukan untuk menilai isu-isu seperti upah/gaji, jam kerja, lapangan kerja sektor informal, setengah pengangguran dan kondisi kerja. Bahkan, nilai rasio ini bisa tinggi untuk alasan yang tidak selalu positif misalnya, pilihan pendidikan yang terbatas sehingga kaum muda mengambil pekerjaan yang tersedia daripada tinggal di sekolah untuk membangun modal manusia mereka (memilih bekerja demi



melanjutkan sekolah/ membiayai sekolah). Untuk alasan ini, sangat disarankan bahwa indikator ini harus ditinjau ulang secara kolektif dalam setiap evaluasi kebijakan tenaga kerja di suatu negara/wilayah.

### **KILM 3. Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama**

Kategorisasi menurut status pekerjaan dapat membantu dalam memahami dinamika pasar tenaga kerja dan tingkat pembangunan suatu negara. Selama bertahun-tahun, dan dengan kemajuan pembangunan, suatu negara biasanya akan mengharapkan untuk dapat melihat pergeseran pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa, dengan peningkatan pada jumlah pekerja yang digaji (buruh/karyawan/pegawai) dan penurunan jumlah pekerja keluarga yang sebelumnya berkontribusi/bekerja di sektor pertanian.

Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Informasi mengenai status dalam pekerjaan yang dikumpulkan dalam Sakernas adalah :

- 1) Berusaha sendiri.
- 2) Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar.
- 3) Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar.
- 4) Buruh/Karyawan/Pegawai.
- 5) Pekerja bebas di pertanian.
- 6) Pekerja bebas di nonpertanian.
- 7) Pekerja keluarga/tak dibayar.

Dalam publikasi ini, pengelompokan status dalam pekerjaan utama adalah sebagai berikut:

- 1) Penduduk yang bekerja dengan upah/gaji adalah penduduk bekerja dengan status pekerjaan buruh/karyawan/pegawai;
- 2) Penduduk yang berusaha, terdiri dari :
  - i. Pengusaha, yaitu penduduk bekerja dengan status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar;
  - ii. Berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar;
  - iii. Pekerja bebas yang terdiri dari pekerja bebas di pertanian dan non-pertanian;

3) Pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar.

Selain itu, disajikan juga rasio pekerja rentan (*vulnerable employment*) terhadap total penduduk bekerja. Konsep pekerja rentan mengacu pada publikasi KILM-ILO, yaitu penduduk bekerja dengan status dalam pekerjaan utama adalah berusaha sendiri, pekerja bebas baik di pertanian dan non-pertanian, serta pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar.

#### **KILM 4. Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor**

Informasi sektoral biasanya berguna untuk mengidentifikasi pergeseran yang besar dalam ketenagakerjaan dan tingkat pembangunan. Dalam buku teks pembangunan ekonomi, tenaga kerja berpindah dari pertanian dan aktifitas tenaga kerja intensif lainnya ke sektor industri dan akhirnya menuju ke sektor jasa-jasa; dalam prosesnya, pekerja berpindah dari desa ke kota.

Klasifikasi baku yang digunakan dalam penggolongan lapangan pekerjaan/lapangan usaha adalah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Untuk kepentingan penyajian/publikasi, digunakan kategori/sektor sebagai berikut:

- 1) Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan;
- 2) Pertambangan dan penggalian;
- 3) Industri pengolahan;
- 4) Listrik, gas dan air;
- 5) Bangunan;
- 6) Perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel;
- 7) Angkutan, pergudangan dan komunikasi;
- 8) Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan;
- 9) Jasa kemasyarakatan.

Untuk kepentingan analisis, sektor dalam perekonomian dibagi menjadi 3 (tiga) sektor yaitu **A(griculture)**/Pertanian, **M(anufacture)**/ Manufaktur dan **S(ervices)**/Jasa-Jasa, berdasarkan pada definisi sektor *International Standard Industrial Classification (ISIC) System* (Revisi 2 dan Revisi 3).

### **KILM 5. Pekerja Paruh Waktu**

Jumlah jam kerja berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan pekerja serta pada tingkat produktivitas dan biaya tenaga kerja yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Mengukur tingkat dan tren di jam-jam bekerja di masyarakat, untuk berbagai kelompok pekerja dan untuk pekerja secara individu menjadi penting ketika melakukan pemantauan kerja dan kondisi hidup maupun ketika menganalisis perkembangan ekonomi. Indikator pekerja paruh waktu berfokus pada individu dengan jumlah jam kerja kurang dari *full time*, yang merupakan proporsi dari total pekerja. Dalam hal ini pekerja paruh waktu yang tanpa disertai kegiatan mencari pekerjaan yang lain dan tidak bersedia untuk menerima pekerjaan tambahan. Karena tidak ada definisi yang disepakati secara internasional untuk jumlah minimum jam dalam seminggu yang merupakan pekerjaan penuh-waktu (*full time*), garis pemisah tersebut ditentukan, baik atas dasar negara-oleh-negara atau melalui penggunaan estimasi khusus. Tetapi, jika tidak ada kesepakatan, biasanya digunakan batas 35 jam seminggu sebagai jam kerja normal. Beberapa negara yang menggunakan batas 35 jam adalah Republik Korea, Amerika dan El Salvador<sup>1</sup>. Untuk kasus Indonesia, batas yang digunakan adalah kurang dari 35 jam seminggu dan mencari pekerjaan.

### **KILM 7. Tenaga Kerja Sektor Informal**

Pekerja di sektor informal terkait perkiraan jumlah orang yang bekerja di sektor informal dibandingkan dengan jumlah orang bekerja. Dalam hal ukuran dan pertumbuhan, sektor informal merupakan bagian penting dari kehidupan ekonomi, sosial dan politik di sebagian besar negara berkembang, serta beberapa negara maju. Di negara-negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk atau urbanisasi yang tinggi, ekonomi informal cenderung tumbuh untuk menyerap sebagian besar tenaga kerja. Konferensi Internasional Statistik Perburuhan (ICLS) ke-15 mendefinisikan sektor informal sebagai unit produksi dalam usaha rumah tangga yang dimiliki oleh rumah tangga. Mereka yang bekerja di sektor informal terdiri semua orang yang, selama periode acuan tertentu, yang bekerja di setidaknya satu unit produksi yang memenuhi konsep sektor informal, terlepas dari status mereka dalam pekerjaan dan apakah itu pekerjaan utama atau pekerjaan sekunder. Resolusi ICLS memperbolehkan beberapa variasi

---

<sup>1</sup> Hussmanns, R., Mehran, F., Verma, V. Surveys of economically active population, employment, unemployment and underemployment : An ILO manual in concepts and methods. Geneva, International Labour Office, 1990.

konsep nasional. Akibatnya, informasi untuk indikator sering didasarkan pada definisi nasional dan pengukuran ekonomi informal.

BPS melakukan pendekatan khusus dalam menentukan pekerja sektor formal/informal, yaitu berdasarkan status dalam pekerjaan utama dan jenis pekerjaan/jabatan<sup>2</sup>.

### 2.2.3. INDIKATOR PENGANGGURAN, UNDEREMPLOYMENT DAN KETIDAKAKTIFAN

#### **KILM 8. Pengangguran**

Tingkat pengangguran menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari dan bersedia untuk bekerja. Ini tidak boleh disalahartikan sebagai kesulitan ekonomi, meskipun korelasi antara tingkat pengangguran dan kemiskinan sering ada dan cenderung memiliki korelasi negatif<sup>3</sup>. Definisi baku untuk penganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, dan bersedia untuk bekerja.

Secara spesifik, penganggur terbuka dalam Sakernas, terdiri atas:

- 1) Mereka yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan;
- 2) Mereka yang tidak bekerja dan mempersiapkan usaha;
- 3) Mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan
- 4) Mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja, tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat pengangguran oleh banyak negara digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan. Jika bekerja diambil sebagai situasi yang diinginkan bagi orang-orang dalam populasi yang secara ekonomi aktif (angkatan kerja), maka pengangguran menjadi situasi yang tidak diinginkan. Namun, beberapa pengangguran jangka pendek dapat diinginkan dan diperlukan untuk memastikan penyesuaian (*adjustment*) terhadap fluktuasi ekonomi. Tingkat pengangguran pada kelompok tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan usia,

---

<sup>2</sup> Lihat lampiran untuk matriks penentuan sektor formal/informal

<sup>3</sup> Tingkat pengangguran relatif rendah pada orang-orang miskin

jenis kelamin, dan pendidikan berguna dalam mengidentifikasi kelompok pekerja dan sektor-sektor yang paling rentan terhadap pengangguran.

Sementara tingkat pengangguran tenaga kerja, dapat dianggap sebagai indikator yang paling informatif yang mencerminkan indikasi pasar umum dan kinerja pasar tenaga kerja dan ekonomi secara keseluruhan, tidak harus ditafsirkan sebagai ukuran kesulitan ekonomi atau kesejahteraan. Bila didasarkan pada standar internasional yang direkomendasikan, tingkat pengangguran hanya memberikan gambaran proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tapi bersedia dan secara aktif mencari pekerjaan. Angka ini menggambarkan tentang sumber daya ekonomi pekerja menganggur atau anggota keluarga mereka. Penggunaannya harus dibatasi sebagai ukuran pemanfaatan tenaga kerja serta indikasi kegagalan untuk mencari pekerjaan. Tindakan-tindakan lain, termasuk indikator pendapatan yang terkait, akan diperlukan untuk mengevaluasi kesulitan ekonomi.

Tingkat pengangguran secara matematis didefinisikan sebagai hasil bagi yang dihasilkan dari membagi jumlah pengangguran (untuk negara atau kelompok pekerja tertentu) dengan jumlah angkatan kerja. Harus ditekankan bahwa denominator/faktor pembagi yang berfungsi sebagai dasar statistik ini adalah tenaga kerja atau penduduk yang aktif secara ekonomi, *bukan* jumlah penduduk. Perbedaan ini tidak selalu dipahami oleh publik. Memang, istilah "angkatan kerja" dan "bekerja" kadang-kadang keliru digunakan secara bergantian. Misalnya, tingkat pengangguran adalah 6 persen, maka dapat dikatakan bahwa terdapat 6 persen dari penduduk yang aktif secara ekonomi (angkatan kerja) yang saat ini sedang tidak bekerja dan mencari pekerjaan atau bersedia bekerja.

### **KILM 9. Pengangguran Pada Kelompok Pemuda**

Tingkat pengangguran memberikan gambaran kepada kita mengenai proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari dan tersedia untuk bekerja. Pemuda yang menganggur merupakan salah satu masalah yang memerlukan penangan kebijakan khusus yang penting bagi banyak negara, terlepas dari tahap pembangunan. Untuk tujuan indikator ini, istilah "pemuda" mencakup orang yang berusia 16 sampai 30 tahun<sup>4</sup>, sedangkan "orang dewasa" didefinisikan sebagai orang yang berusia 31 tahun ke atas.

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan

### **KILM 10. Pengangguran Jangka Panjang**

Pengangguran jangka panjang merupakan stok tenaga kerja yang tidak dapat dimanfaatkan, merupakan bagian dari angkatan kerja, tetapi tidak memiliki pekerjaan (menganggur) dalam jangka waktu tertentu. Sayangnya, Sakernas tidak mengumpulkan informasi mengenai berapa lama seseorang menganggur. Indikator ini tidak dapat disajikan karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan dalam Sakernas.

### **KILM 11. Pengangguran Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Indikator ini melihat hubungan antara pencapaian pendidikan pekerja dan pengangguran yang memberikan gambaran mengenai perubahan dalam permintaan pekerja. Informasi mengenai tingkat pengangguran berdasarkan pendidikan memiliki implikasi penting bagi pekerja dan kebijakan pendidikan. Jika dikonfirmasi bahwa orang dengan tingkat pendidikan yang rendah berada pada risiko yang lebih tinggi menjadi pengangguran, reaksi politik yang mungkin adalah meningkatkan tingkat pendidikan mereka atau menciptakan lebih banyak pekerjaan dengan keterampilan rendah (*low skilled job*) di dalam negeri. Di sisi lain, komposisi pengangguran yang lebih tinggi di kalangan orang-orang dengan pendidikan tinggi bisa menunjukkan kurangnya pekerjaan teknis yang profesional dan tingkat tinggi. Tabel yang biasanya disajikan menunjukkan distribusi persentase dari total pengangguran suatu negara sesuai dengan lima tingkat sekolah, tingkat pra-dasar, kurang dari satu tahun, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tersier (dalam publikasi ini hanya dikategorikan dalam empat tingkat sekolah). Sebagai catatan, angka yang ditampilkan bisa berupa distribusi dan bisa berupa *rate*.

### **KILM 12. Setengah Penganggur**

Mereka yang dikategorikan dalam setengah penganggur adalah mereka yang jumlah jam kerjanya di bawah ambang batas jam kerja normal (bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu yang lalu), dengan kondisi:

- 1) Mereka yang dengan suka rela mencari pekerjaan tambahan yang meliputi:
  - i. Mereka yang menginginkan pekerjaan lain untuk menambah jam kerjanya dari pekerjaannya yang sekarang;

- ii. Mereka yang menginginkan mendapat ganti dari pekerjaannya yang sekarang dengan pekerjaan lain yang mempunyai jam kerja lebih banyak.
- 2) Mereka yang bersedia menerima pekerjaan tambahan.

### **KILM 13. Tingkat Ketidakaktifan**

Tingkat ketidakaktifan adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja suatu negara yang tidak terlibat aktif dalam pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan. Tingkat ketidakaktifan yang merupakan proporsi penduduk usia kerja yang tidak termasuk dalam angkatan kerja, jika dijumlahkan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (lihat KILM 1) maka hasilnya adalah 100 persen, dengan perkataan lain tingkat ketidakaktifan sama dengan 1 dikurang TPAK ( $1 - \text{TPAK}$ ).

Dalam beberapa situasi, tingkat ketidakaktifan tinggi untuk kelompok populasi tertentu tidak harus selalu dilihat sebagai "buruk", misalnya, tingkat ketidakaktifan yang relatif tinggi untuk wanita usia 25-34 tahun mungkin karena mereka meninggalkan pasar kerja untuk mengurus keluarga dan melaksanakan tanggung jawab seperti melahirkan anak dan pengasuhan anak. Dengan menggunakan data dalam KILM 13, pengguna dapat melihat sejauh mana ibu berkaitan dengan pola tenaga kerja perempuan. Telah lama diakui bahwa aspek-aspek struktur rumah tangga terkait dengan aktivitas pasar tenaga kerja. Misalnya, perempuan kepala rumah tangga cenderung memiliki tingkat aktivitas yang relatif tinggi. Pada pasangan yang menikah, suami biasanya memiliki tingkat ketidakaktifan yang rendah, terutama jika ada anak-anak dalam keluarga. Tingkat ketidakaktifan yang rendah pada wanita bisa berkorelasi dengan tingginya tingkat ketidakaktifan untuk laki-laki, yaitu suami, jika laki-laki sedang menyelesaikan pendidikan atau secara fisik tidak mampu bekerja, sehingga membuat istri sebagai pencari nafkah utama.

## **2.2.4. INDIKATOR PENDIDIKAN DAN MELEK HURUF**

### **KILM 14. Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf**

Informasi tentang tingkat pencapaian pendidikan saat ini adalah indikator terbaik yang tersedia untuk melihat tingkat keahlian tenaga kerja. Pendidikan merupakan salah satu faktor penentu penting untuk menilai kemampuan suatu negara untuk bersaing dengan sukses di pasar dunia dan membuat efisiensi penggunaan kemajuan teknologi yang cepat. Tabel KILM 14 menyajikan informasi mengenai tingkat pendidikan angkatan kerja dengan lima tingkat

pendidikan yaitu tidak pernah bersekolah, tingkat pra-dasar, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tinggi (dalam publikasi ini hanya dikategorikan dalam empat tingkat pendidikan, yaitu tidak pernah bersekolah, tingkat dasar, tingkat menengah dan tingkat tinggi).

Kategori yang digunakan dalam indikator ini secara konseptual berdasarkan tingkat Standar Internasional Klasifikasi Pendidikan (**ISCED-97**). Pengelompokan tingkat pendidikan berdasarkan ISCED-97 adalah sebagai berikut :

- 1) Tidak pernah bersekolah adalah mereka yang tidak/belum pernah bersekolah sama sekali;
- 2) Sekolah dasar, yaitu mereka yang memiliki pendidikan tidak/belum tamat SD, SD/Ibtidaiyah, Paket A, SMP/Tsanawiyah, SMP Kejuruan dan Paket B;
- 3) Sekolah menengah, yaitu mereka dengan pendidikan SMA/Aliyah, SMK, Paket C; dan
- 4) Sekolah tinggi, yaitu mereka yang memiliki ijazah Diploma I/II, Diploma III, Diploma IV/Sarjana dan S2/S3.

## 2.2.5. INDIKATOR UPAH DAN BIAYA TENAGA KERJA

### **KILM 15. Indeks Upah Sektor Manufaktur**

Sektor manufaktur yang dikenal sebagai sektor formal dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kesejahteraan pekerja melalui indeks upah pada sektor ini. Tetapi, terdapat survey khusus (Survey Upah dan Survey Struktur Upah) ---yang bukan merupakan bagian dari Sakernas--- yang dilakukan untuk mengumpulkan data terkait dengan indikator ini. Oleh karena itu, indikator ini tidak dapat disajikan pada publikasi KILM ini.

### **KILM 16. Indikator Upah dan Pendapatan Berdasarkan Jabatan**

Salah satu keterbatasan variabel pada Sakernas adalah hanya menanyakan upah/pendapatan pada status pekerjaan tertentu. Akibatnya, tidak semua penduduk bekerja mempunyai informasi pendapatan/upah. Estimasi pendapatan dapat saja dilakukan dengan menggunakan teknik statistik (*Two Step Heckman*). Oleh karena itu, indikator ini juga tidak dapat disajikan pada publikasi ini.



### **KILM 17. Upah Per Jam**

Seperti KILM 15 dan 16 mengenai informasi upah, Sakernas tidak memiliki informasi upah per jam. Tidak adanya pertanyaan mengenai informasi upah per jam dikarenakan kebanyakan di Indonesia, pekerja tidak dibayar berdasarkan jam kerja, tetapi hari kerja. Hanya sedikit sekali lapangan pekerjaan yang membayar pekerja berdasarkan hitungan jam. Selain itu, dalam Sakernas, yang ditanyakan adalah pendapatan sebulan terakhir, sementara untuk jam kerja, ditanyakan jumlah jam kerja seminggu terakhir. Estimasi upah kerja per jam akan sangat beresiko menimbulkan bias statistik. Oleh karena itu, indikator ini tidak dipublikasikan pada publikasi KILM ini.

## **2.2.6. PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA**

### **KILM 18. Produktifitas Tenaga Kerja**

Tingkat produktifitas tenaga kerja merupakan ukuran penting untuk melihat sejauh mana faktor produksi L (Labor/Tenaga Kerja) berperan dalam proses produksi. Tingkat produktifitas tenaga kerja memberikan gambaran mengenai output yang dihasilkan oleh satu unit tenaga kerja. Semakin tinggi output yang dihasilkan, maka semakin produktif tenaga kerja tersebut, demikian sebaliknya. Indikator ini juga penting untuk melihat sektor mana saja yang memiliki tenaga kerja dengan produktifitas tinggi, dan sektor mana yang tidak. Identifikasi ini memberikan gambaran sektor yang memerlukan tenaga kerja yang banyak (*labour intencive*) dan sektor padat modal (*capital intencive*). Tetapi, keterbatasan variabel yang dikumpulkan pada Sakernas mengakibatkan tidak bisanya indikator ini disajikan pada publikasi kali ini.

## **2.2.7. INDIKATOR ELASTISITAS TENAGA KERJA**

### **KILM 19. Elastisitas Tenaga Kerja**

Tingkat elastisitas tenaga kerja memberikan gambaran mengenai banyaknya tenaga kerja yang terserap pada proses produksi untuk menghasilkan nilai tambah tertentu. Dengan kata lain, elastisitas tenaga kerja adalah banyaknya tenaga kerja terserap setiap peningkatan satu persen pertumbuhan ekonomi. Untuk melakukan analisis ini, diperlukan data nilai tambah (PDB/PDRB). Analisis ini merupakan analisis lintas sektor, sehingga tidak bisa ditampilkan dalam publikasi ini.

## 2.2.8. INDIKATOR KEMISKINAN, PEKERJA MISKIN DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN

### **KILM 20. Indikator Kemiskinan, Pekerja Miskin dan Distribusi Pendapatan**

Sebagaimana indikator elastisitas tenaga kerja, indikator kemiskinan, pekerja miskin dan distribusi pendapatan juga memerlukan beberapa variabel tambahan yang tidak ditanyakan pada Sakernas. Selain itu, data lintas sektor juga penting untuk melengkapi analisis ini. Indikator ini tidak dapat disajikan karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan dalam Sakernas.

<http://www.bps.go.id>

### 3. PARTISIPASI DI DUNIA KERJA (KILM 1)

#### KILM 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat secara aktif di pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja, mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha. Ukuran ini merupakan indikasi relatif dari pasokan tenaga kerja tersedia yang terlibat dalam produksi barang dan jasa. Data angkatan kerja menurut jenis kelamin dan kelompok umur memberikan profil distribusi penduduk yang aktif secara ekonomi.

TPAK dihitung dengan menyatakan jumlah orang dalam angkatan kerja sebagai persentase dari penduduk usia kerja. Angkatan kerja adalah jumlah orang yang bekerja ditambah jumlah pengangguran. Penduduk usia kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang ditentukan untuk pengukuran karakteristik ekonomi.

Tabel publikasi standar yang dikeluarkan ILO (*KILM 6<sup>th</sup> ed*) menyajikan estimasi tingkat partisipasi angkatan kerja menurut jenis kelamin menurut kelompok umur dengan standar sebagai berikut: 15+, 15–24, 15–64, 25–54, 25–34, 35–54, 55–64 dan 65 tahun ke atas. Penggunaan kelompok umur ini digunakan di lebih dari 190 negara selama tahun 1980 sampai 2010.

Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk dalam angkatan kerja pada Februari 2012 sebesar 120,42 juta orang, secara absolut naik 3,04 juta orang apabila dibandingkan dengan keadaan Agustus 2011 (117,37 juta orang) dan naik sebesar 1,02 juta orang dibanding kondisi setahun yang lalu (Lampiran 3).

Demikian halnya TPAK di Indonesia mengalami kenaikan pada Februari 2012 sebesar 1,32 persen poin dari 68,34 persen pada Agustus 2011 menjadi 69,66 persen pada Februari 2012. Hal ini dapat diartikan bahwa persentase tenaga kerja yang aktif secara ekonomi naik sebesar 1,32 persen poin dibanding kondisi Agustus 2011. Namun angka ini mengalami sedikit penurunan pada kondisi setahun terakhir (Februari 2011) yaitu sebesar 0,30 persen poin.

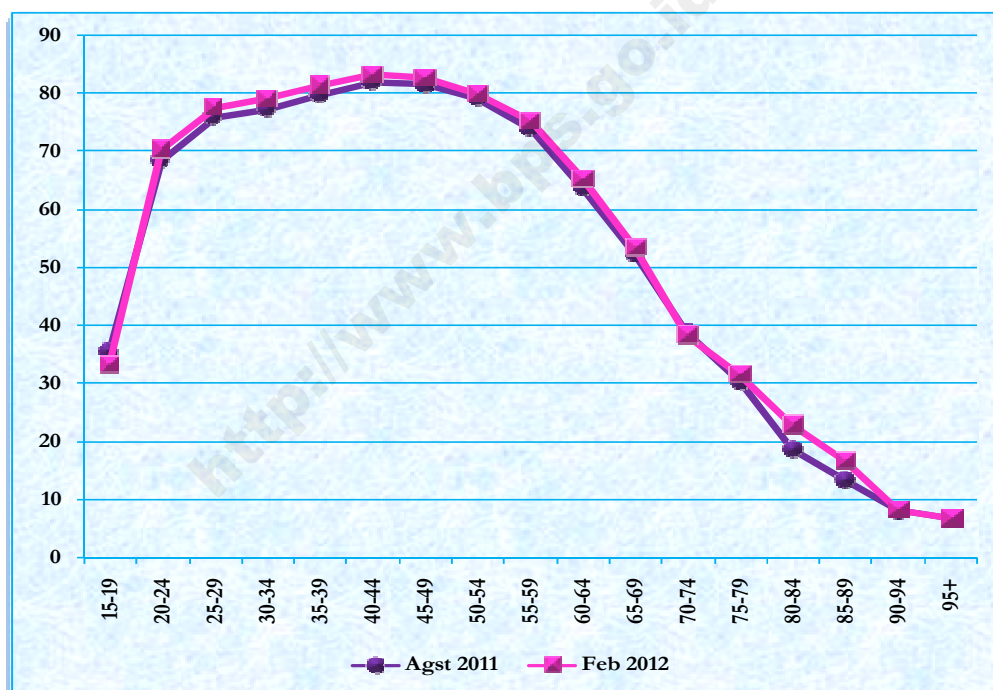
Jika ditinjau berdasarkan jenis kelamin dan klasifikasi daerah, terjadi kenaikan TPAK pada masing-masing kategori seiring kenaikan pada TPAK nasional. Kelompok laki-laki mengalami kenaikan sedikit lebih tinggi dibanding perempuan, masing-masing sebesar 1,37 persen poin dan 1,27 persen poin pada periode Agustus 2011-Februari 2012.

Tabel 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kelompok Umur, 2011-2012  
(dalam persen)

Indikator	2011		2012
	Februari	Agustus	Februari
<b>Total</b>	<b>69,96</b>	<b>68,34</b>	<b>69,66</b>
Laki-laki	84,86	84,30	85,67
Perempuan	55,13	52,44	53,71
Perkotaan	67,60	66,61	67,78
Perdesaan	72,35	70,07	71,55
<b>(15-24)</b>	<b>50,28</b>	<b>50,40</b>	<b>51,21</b>
Laki-laki	59,81	59,66	62,29
Perempuan	40,64	41,03	39,99
Perkotaan	48,98	49,66	50,47
Perdesaan	51,71	51,13	51,94
<b>(15-64)</b>	<b>72,06</b>	<b>70,59</b>	<b>71,89</b>
Laki-laki	86,67	86,34	87,61
Perempuan	57,30	54,65	55,96
Perkotaan	69,64	69,03	70,30
Perdesaan	74,58	72,16	73,50
<b>(25-54)</b>	<b>80,81</b>	<b>78,83</b>	<b>80,34</b>
Laki-laki	97,48	97,21	98,07
Perempuan	63,98	60,25	62,42
Perkotaan	78,84	77,44	79,16
Perdesaan	82,87	80,24	81,54
<b>(25-34)</b>	<b>78,41</b>	<b>76,43</b>	<b>78,19</b>
Laki-laki	97,02	96,92	97,84
Perempuan	59,81	55,91	58,51
Perkotaan	77,88	76,60	78,53
Perdesaan	79,00	76,25	77,84
<b>(35-54)</b>	<b>82,44</b>	<b>80,46</b>	<b>81,80</b>
Laki-laki	97,80	97,40	98,23
Perempuan	66,84	63,23	65,09
Perkotaan	79,53	78,01	79,60
Perdesaan	85,34	82,93	84,02
<b>(55-64)</b>	<b>71,44</b>	<b>69,58</b>	<b>70,79</b>
Laki-laki	85,82	85,21	85,51
Perempuan	56,86	53,61	55,55
Perkotaan	63,74	63,98	63,51
Perdesaan	77,91	75,13	78,17
<b>65 Tahun ke atas</b>	<b>41,78</b>	<b>38,70</b>	<b>39,41</b>
Laki-laki	57,62	54,07	55,67
Perempuan	28,80	26,24	26,53
Perkotaan	34,16	34,11	32,36
Perdesaan	47,19	43,15	46,04

Hal serupa terjadi pada kelompok-kelompok umur penting dengan kenaikan terbesar pada kelompok umur 25-34 sebesar 1,76 persen poin dari 76,43 persen pada Agustus 2011 menjadi 78,19 persen pada Februari 2012, namun justru turun sebesar 0,22 persen poin pada Februari 2011 (78,41 persen).

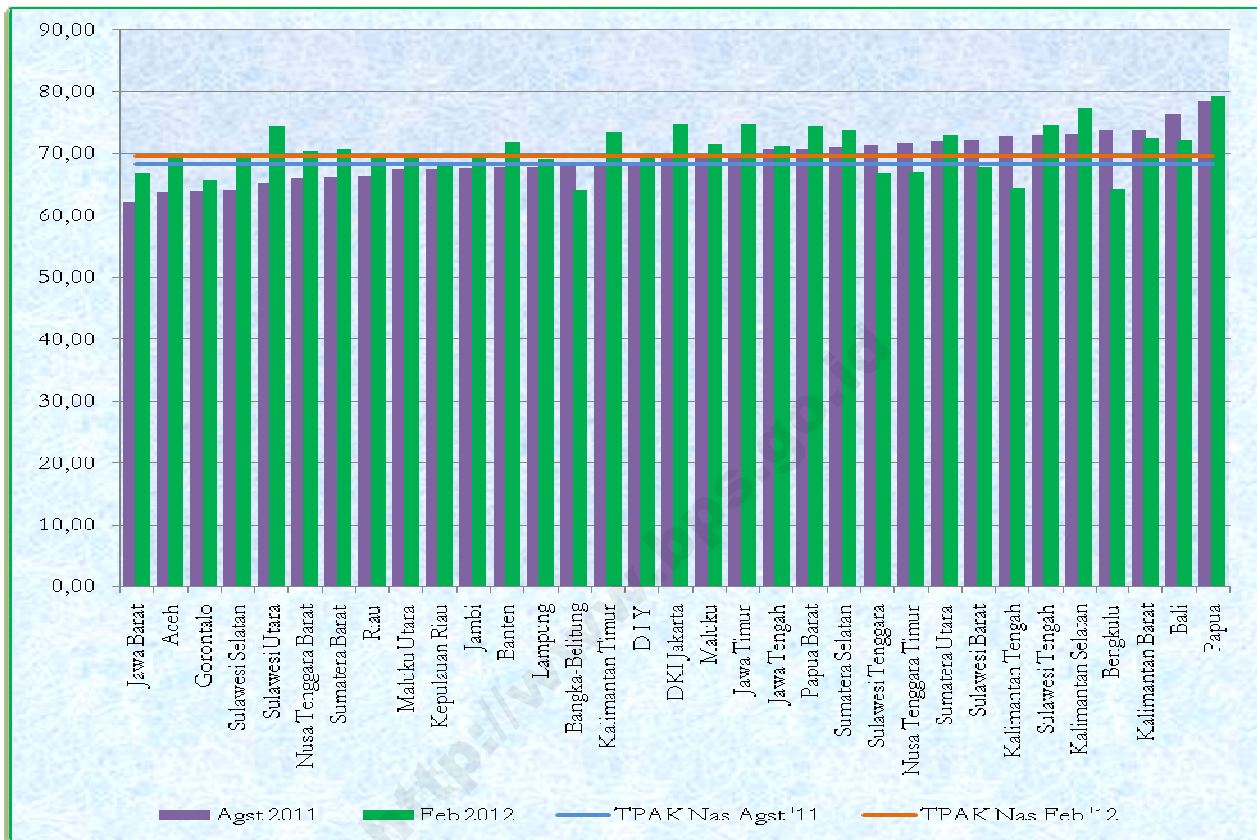
Perubahan pola yang jelas terlihat pada grafik TPAK berdasarkan kelompok umur. Terlihat terjadinya pergeseran TPAK pada kelompok-kelompok umur tua. Hal ini mengindikasikan terjadinya perpindahan penduduk dari Angkatan Kerja ke Bukan Angkatan Kerja yang terjadi pada kelompok umur tua. Kondisi selama enam bulan terakhir memperlihatkan adanya peningkatan pada hampir semua kelompok umur tua. Puncak TPAK antara Agustus 2011 dan Februari 2012 tidak terjadi perubahan yang mencolok, dimana mencapai puncak pada kelompok umur 40-44 tahun.



Grafik 1. Pola TPAK Agustus 2011 dan Februari 2012

Adanya pergeseran TPAK menurut provinsi-provinsi di Indonesia dapat terlihat pada Grafik 2. Pada Februari 2012, provinsi-provinsi dengan TPAK tertinggi adalah Papua (79,27 persen), Bali (77,42 persen) dan Bengkulu (74,85 persen), sedangkan pada Agustus 2011 posisi ini diduduki oleh Provinsi Papua (78,45 persen), Bali (76,45 persen), dan Kalimantan Barat (73,93 persen). Sementara itu provinsi dengan TPAK terendah pada Februari 2012 adalah Jawa

Barat (64,26 persen), Gorontalo (64,36 persen), dan Sulawesi Selatan (64,56 persen), yang pada kondisi Agustus 2011 diduduki oleh Provinsi Jawa Barat (62,27 persen), Provinsi NAD (63,78 persen) dan Provinsi Gorontalo (64,12 persen).



Grifik 2. TPAK Menurut Provinsi Agustus 2011 dan Februari 2012

## 4. INDIKATOR TENAGA KERJA (KILM 2-7)

### 4.1. KILM 2. RASIO PEKERJA TERHADAP JUMLAH PENDUDUK

Rasio pekerja terhadap jumlah penduduk (*employment to population ratio*) didefinisikan sebagai proporsi penduduk usia kerja suatu negara yang berstatus bekerja terhadap penduduk usia kerja. Rasio yang tinggi berarti sebagian besar penduduk suatu negara adalah bekerja, sementara rasio rendah berarti sebagian besar penduduk tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang berhubungan dengan pasar, karena mereka menganggur atau (lebih mungkin) tidak termasuk dalam angkatan kerja (BAK).

Rasio ini memberikan informasi tentang kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja, karena, di banyak negara, indikator ini menghasilkan analisis yang lebih mendalam dibandingkan dengan tingkat pengangguran. Meskipun secara keseluruhan rasio tinggi biasanya dianggap sebagai positif, indikator ini saja tidak cukup untuk menilai tingkat pekerjaan yang layak atau tingkat defisit pekerjaan yang layak. Indikator tambahan diperlukan untuk menilai isu-isu seperti upah/gaji, jam kerja, lapangan kerja sektor informal, setengah pengangguran dan kondisi kerja. Bahkan nilai rasio ini bisa tinggi untuk alasan yang tidak selalu positif, misalnya, pilihan pendidikan yang terbatas sehingga kaum muda mengambil pekerjaan yang tersedia daripada tinggal di sekolah untuk membangun modal manusia mereka (memilih bekerja demi melanjutkan sekolah/membiayai sekolah).

Secara nasional, angka EPR pada Februari 2012 ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan keadaan Februari maupun keadaan Agustus 2011. Dibandingkan dengan keadaan Februari 2011, EPR hanya meningkat tipis sebesar 0,04 persen, dan jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2011 EPR meningkat sebesar 1,4 persen poin menjadi 65,25 persen. Angka ini bisa diinterpretasikan dari 100 orang penduduk usia 15 tahun ke atas, terdapat sekitar 65 orang yang bekerja pada Februari 2012.

Peningkatan EPR ini terjadi pada penduduk usia muda (kelompok umur 15-24 tahun). Dari keadaan Februari 2011 EPR meningkat relatif signifikan sebesar 3,18 persen poin, dan dari keadaan Agustus 2011 EPR meningkat sebesar 1,11 persen poin menjadi 41,43 persen pada Februari 2012. Jika dirinci berdasarkan jenis kelamin dan wilayah tempat tinggal (desa-kota), EPR penduduk usia muda juga mengalami kenaikan. Kenaikan yang relatif besar terjadi pada

wilayah perkotaan yang meningkat sebesar 4,39 persen poin, dari 34,63 persen poin di Februari 2011 menjadi 39,02 persen di Februari 2012.

Tabel 2. Penduduk Usia 15 Tahun ke atas dan yang Bekerja Menurut Kelompok Umur, 2011-2012 (dalam juta)

Indikator	2011		2012
	Februari	Agustus	Februari
<b>Usia 15 Tahun ke Atas</b>	<b>170,66</b>	<b>171,76</b>	<b>172,87</b>
Laki-laki	85,16	85,71	86,27
Perempuan	85,50	86,05	86,59
Perkotaan	85,70	86,18	86,75
Perdesaan	84,95	85,57	86,12
<b>Usia Muda (15-24)</b>	<b>40,92</b>	<b>41,46</b>	<b>41,74</b>
Laki-laki	20,58	20,85	20,99
Perempuan	20,34	20,61	20,75
Perkotaan	21,45	20,72	20,86
Perdesaan	19,48	20,74	20,88
<b>Usia Dewasa (25+)</b>	<b>129,73</b>	<b>130,30</b>	<b>131,12</b>
Laki-laki	64,58	64,86	65,28
Perempuan	65,16	65,44	65,84
Perkotaan	64,25	65,47	65,89
Perdesaan	65,48	64,83	65,23
<b>Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja</b>	<b>111,28</b>	<b>109,67</b>	<b>112,80</b>
Laki-laki	67,62	67,99	69,48
Perempuan	43,66	41,68	43,32
Perkotaan	52,71	52,68	54,02
Perdesaan	58,57	56,99	58,78
<b>Usia Muda (15-24) yang Bekerja</b>	<b>15,65</b>	<b>16,72</b>	<b>17,30</b>
Laki-laki	9,48	10,04	10,55
Perempuan	6,18	6,68	6,75
Perkotaan	7,43	7,91	8,14
Perdesaan	8,23	8,81	9,15
<b>Usia Dewasa (25+) yang Bekerja</b>	<b>95,63</b>	<b>92,95</b>	<b>95,51</b>
Laki-laki	58,15	57,95	58,93
Perempuan	37,48	35,00	36,58
Perkotaan	45,28	44,77	45,88
Perdesaan	50,35	48,18	49,63



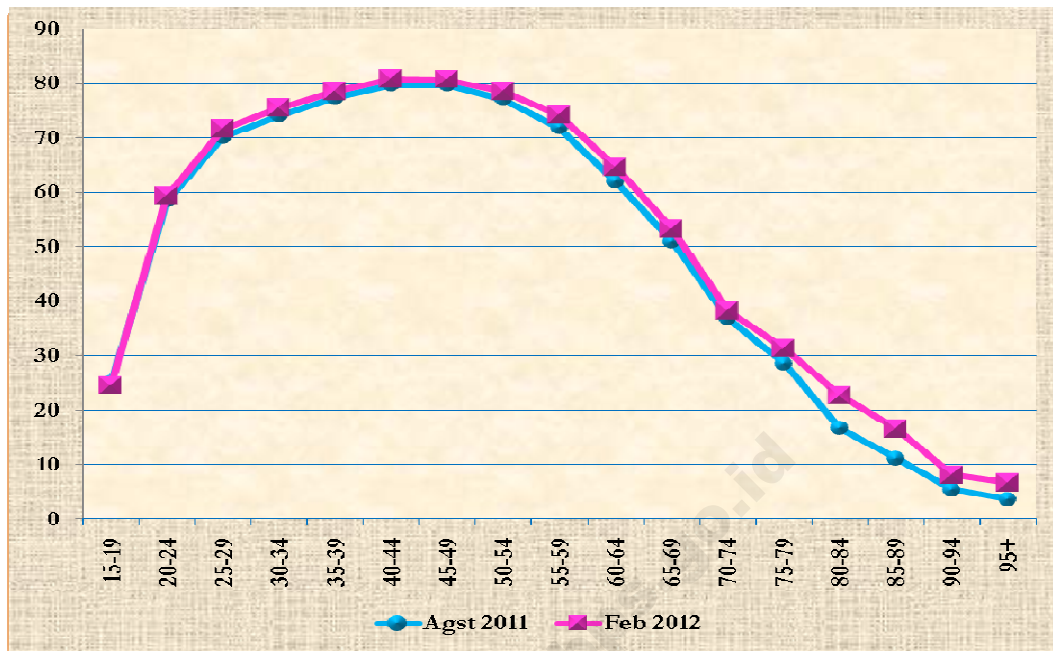
Tabel 3. Rasio Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja Terhadap Total Penduduk (EPR) Menurut Kelompok Usia, 2011-2012

Indikator	2011		2012
	Februari	Agustus	Februari
<b>Total</b>	<b>65,21</b>	<b>63,85</b>	<b>65,25</b>
Laki-laki	79,41	79,32	80,54
Perempuan	51,06	48,44	50,03
Perkotaan	61,50	61,13	62,27
Perdesaan	68,94	66,60	68,26
<b>Usia Muda (15-24)</b>	<b>38,25</b>	<b>40,32</b>	<b>41,43</b>
Laki-laki	46,05	48,16	50,24
Perempuan	30,37	32,40	32,52
Perkotaan	34,63	38,18	39,02
Perdesaan	42,24	42,47	43,84
<b>Usia Dewasa (25+)</b>	<b>73,71</b>	<b>71,34</b>	<b>72,84</b>
Laki-laki	90,04	89,34	90,28
Perempuan	57,52	53,49	55,55
Perkotaan	70,47	68,39	69,63
Perdesaan	76,89	74,32	76,08

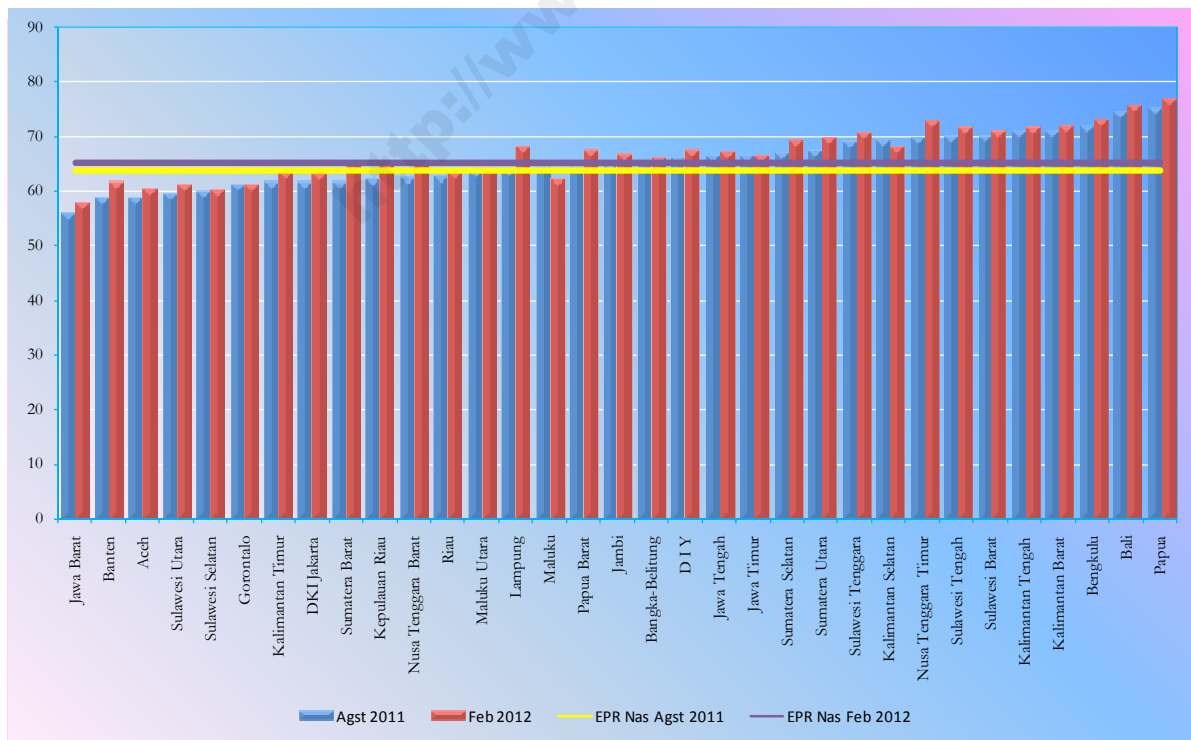
Fenomena yang berbeda terlihat pada penduduk dewasa (usia 25 tahun ke atas), dari keadaan Februari 2011, EPR malah mengalami penurunan sebesar 0,87 persen poin, diikuti dengan penurunan EPR perempuan sebesar 1,97 persen poin. Sedangkan dari keadaan Agustus 2011 EPR mengalami peningkatan, yaitu dari sekitar 71 orang bekerja per 100 penduduk menjadi sekitar 73 orang bekerja per 100 penduduk pada Februari 2012. Peningkatan EPR yang relatif besar terjadi pada penduduk dewasa berjenis kelamin perempuan, dimana EPR meningkat sekitar 2 persen poin. Sedangkan komposisi berdasarkan kota-desa, EPR penduduk dewasa di perdesaan meningkat sebesar 1,76 persen poin, lebih tinggi dibanding di wilayah perkotaan yang hanya meningkat sebesar 1,24 persen poin.

Pola EPR berdasarkan kelompok umur seperti terlihat pada grafik ternyata mirip dengan pola TPAK. Hal ini menunjukkan dominasi jumlah penduduk bekerja pada komponen angkatan kerja. Artinya, komponen pengangguran pada angkatan kerja relatif kecil. Dari grafik EPR terlihat bahwa puncak EPR juga terjadi pada kelompok umur 40-44 tahun. Terlihat juga bahwa antara Februari 2012 dan Agustus 2011 grafik EPR berhimpitan hingga kelompok umur 45-49,

dan mulai merenggang pada kelompok umur 50-54, dengan jarak terbesar terjadi pada kelompok umur 80-84.



Grafik 3. Pola EPR Agustus 2011 dan Februari 2012



Grafik 4. EPR Provinsi Agustus 2011 dan Februari 2012

#### 4.2. KILM 3. PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT STATUS PEKERJAAN UTAMA

Kategorisasi menurut status pekerjaan dapat membantu dalam memahami dinamika pasar tenaga kerja dan tingkat pembangunan suatu negara. Dengan kemajuan pembangunan, suatu negara biasanya akan mengharapkan untuk melihat pergeseran pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa, dengan peningkatan pada jumlah pekerja yang digaji (buruh/karyawan/pegawai), dan penurunan jumlah pekerja keluarga yang sebelumnya berkontribusi/bekerja di sektor pertanian. Kategori status pekerjaan utama pada publikasi ini dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu :

- 1) Pekerja dengan upah dan gaji.
- 2) Pekerja yang berusaha/wiraswasta.
- 3) Pekerja keluarga masing-masing yang dinyatakan sebagai proporsi dari total bekerja.

Selama Februari 2011 sampai Februari 2012 persentase pekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai) terlihat berfluktuatif, yaitu dari sebesar 31,01 persen pada Februari 2011, meningkat menjadi 34,44 persen pada Agustus 2011 dan pada Februari 2012 sedikit menurun menjadi 33,81 persen. Pola sebaliknya terjadi pada pekerja keluarga yaitu dari 17,96 persen pada Februari 2011, menurun menjadi 16,40 persen pada Agustus 2011 dan kembali meningkat menjadi 17,29 persen pada Februari 2012. Jika dibandingkan antara laki-laki dan perempuan, proporsi pekerja keluarga pada perempuan sebesar 33,03 persen jauh lebih tinggi dibanding proporsi pekerja keluarga pada laki-laki yang hanya 7,47 persen.

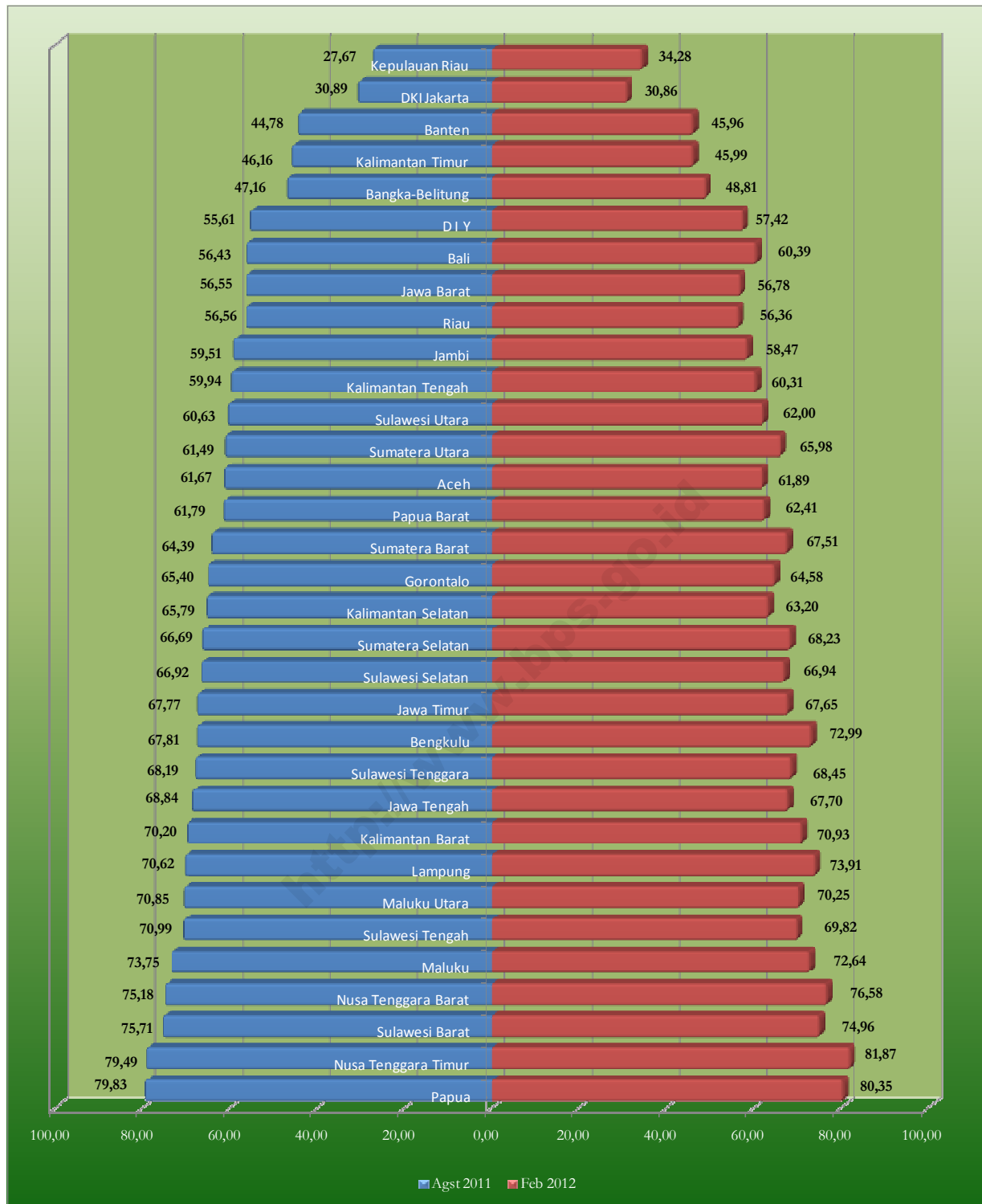
Sementara itu, secara nasional pada Februari 2012, proporsi penduduk bekerja yang tergolong "pekerja rentan/vulnerable employment " mencapai 62,71 persen, yang berarti dari 100 orang pekerja yang termasuk kategori pekerja rentan sekitar 62 orang. Menurut provinsi yang ada di Indonesia, proporsi pekerja rentan terbesar Agustus 2011 adalah Provinsi Papua (79,83 persen), disusul oleh Nusa Tenggara Timur (79,49 persen) dan Sulawesi Barat (75,71 persen). Sementara hasil Sakernas Februari 2012 menunjukkan perubahan dimana proporsi pekerja rentan terbesar adalah Nusa Tenggara Timur (81,87 persen), baru kemudian posisi kedua ditempati Provinsi Papua (80,35 persen) dan ketiga ditempati oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat (76,58 persen).

Tabel 4. Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, 2011-2012 (dalam juta)

Indikator	2011		2012
	Februari	Agustus	Februari
<b>Laki dan Perempuan</b>	<b>111,28</b>	<b>109,67</b>	<b>112,80</b>
a. Pekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai)	34,51	37,77	38,14
b. Wiraswasta (i+ii+iii)	56,79	53,91	55,17
i. Pengusaha	3,59	3,72	3,93
ii. Berusaha sendiri	42,46	39,08	39,91
iii. Pekerja bebas	10,73	11,12	11,33
c. Pekerja keluarga	19,98	17,99	19,50
d. Pekerja "rentan" (ii + iii + c)	73,17	68,18	70,74
<b>Laki-laki</b>	<b>67,62</b>	<b>67,99</b>	<b>69,48</b>
a. Pekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai)	22,22	24,38	24,77
b. Wiraswasta (i+ii+iii)	40,23	38,62	39,52
i. Pengusaha	2,92	3,00	3,14
ii. Berusaha sendiri	29,49	27,19	27,93
iii. Pekerja bebas	7,83	8,44	8,44
c. Pekerja keluarga	5,17	4,99	5,19
d. Pekerja "rentan" (ii + iii + c)	42,48	40,61	41,57
<b>Perempuan</b>	<b>43,66</b>	<b>41,68</b>	<b>43,32</b>
a. Pekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai)	12,29	13,39	13,37
b. Wiraswasta (i+ii+iii)	16,56	15,29	15,65
i. Pengusaha	0,68	0,72	0,79
ii. Berusaha sendiri	12,97	11,89	11,98
iii. Pekerja bebas	2,91	2,68	2,88
c. Pekerja keluarga	14,81	13,00	14,31
d. Pekerja "rentan" (ii + iii + c)	30,69	27,57	29,17

Tabel 5. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, 2011-2012

Indikator	2011		2012
	Februari	Agustus	Februari
<b>Laki dan Perempuan</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
a. Pekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai)	31,01	34,44	33,81
b. Wiraswasta (i+ii+iii)	51,03	49,16	48,91
i. Pengusaha	3,23	3,39	3,48
ii. Berusaha sendiri	38,15	35,63	35,38
iii. Pekerja bebas	9,65	10,14	10,04
c. Pekerja keluarga	17,96	16,40	17,29
d. Pekerja "rentan" (ii + iii + c)	65,76	62,17	62,71
<b>Laki-laki</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
a. Pekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai)	32,86	35,86	35,65
b. Wiraswasta (i+ii+iii)	59,49	56,81	56,88
i. Pengusaha	4,31	4,41	4,52
ii. Berusaha sendiri	43,61	39,99	40,20
iii. Pekerja bebas	11,58	12,41	12,15
c. Pekerja keluarga	7,64	7,33	7,47
d. Pekerja "rentan" (ii + iii + c)	62,82	59,73	59,83
<b>Perempuan</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
a. Pekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai)	28,15	32,13	30,85
b. Wiraswasta (i+ii+iii)	37,92	36,68	36,12
i. Pengusaha	1,56	1,73	1,82
ii. Berusaha sendiri	29,71	28,53	27,65
iii. Pekerja bebas	6,66	6,43	6,65
c. Pekerja keluarga	33,93	31,19	33,03
d. Pekerja "rentan" (ii + iii + c)	70,29	66,15	67,33



Grafik 5. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang termasuk Pekerja Rentan Menurut Provinsi, Agustus 2011 dan Februari 2012

### 4.3. KILM 4. PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN USAHA

Informasi sektoral atau lapangan usaha biasanya berguna untuk mengidentifikasi pergeseran yang besar dalam ketenagakerjaan dan tingkat pembangunan. Dalam buku teks pembangunan ekonomi, tenaga kerja berpindah dari pertanian dan aktifitas tenaga kerja intensif lainnya ke sektor industri dan akhirnya menuju ke sektor jasa-jasa; dalam prosesnya, pekerja berpindah dari desa ke kota.

Untuk kepentingan analisis, sektor dalam perekonomian dibagi menjadi 3 (tiga) sektor yaitu *Agriculture*, *Manufacture* dan *Services*, berdasarkan pada definisi sektor *International Standard Industrial Classification (ISIC) System (Revision 2 and Revision 3)*.

Hasil Sakernas Februari 2012 menunjukkan bahwa di Indonesia, sektor pertanian digeser oleh sektor jasa. Hal ini ditunjukkan secara sektoral oleh proporsi jumlah penduduk yang bekerja pada Sektor Jasa-Jasa sebesar 43,76 persen sedangkan Sektor Pertanian mencapai 36,53 persen dan Sektor Manufaktur sebesar 19,71 persen. Apabila diuraikan lebih lanjut, Sektor Perdagangan menjadi penyumbang terbesar tingginya persentase penduduk yang bekerja di Sektor Jasa-Jasa, selain ditunjang oleh Sektor Jasa Kemasyarakatan dan Sektor Angkutan. Sedangkan persentase Sektor Industri dan Bangunan menjadi penyumbang terbesar Sektor Manufaktur dengan persentase masing-masing sebesar 12,60 persen dan 5,41 persen.

Komposisi sektoral hasil Sakernas Februari 2012 ternyata tidak terjadi pergeseran berarti dibandingkan dengan keadaan Februari 2011 maupun Agustus 2011. Dibandingkan dengan keadaan Februari 2011, semua sektor mengalami kenaikan persentase kecuali untuk sektor pertanian yang turun sebesar 1,67 persen dan subsektor angkutan yang turun tipis sebesar 0,42 persen. Jika dibandingkan keadaan Agustus 2011, Sektor jasa-jasa mengalami kenaikan tipis sebesar 0,22 persen, begitu juga dengan sektor pertanian yang hanya naik sekitar 0,67 persen poin. Sektor manufaktur justru mengalami penurunan 0,89 persen. Penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh adanya musim panen di sekitar bulan Februari-Maret, sehingga pekerja informal di sektor manufaktur beralih ke sektor pertanian.

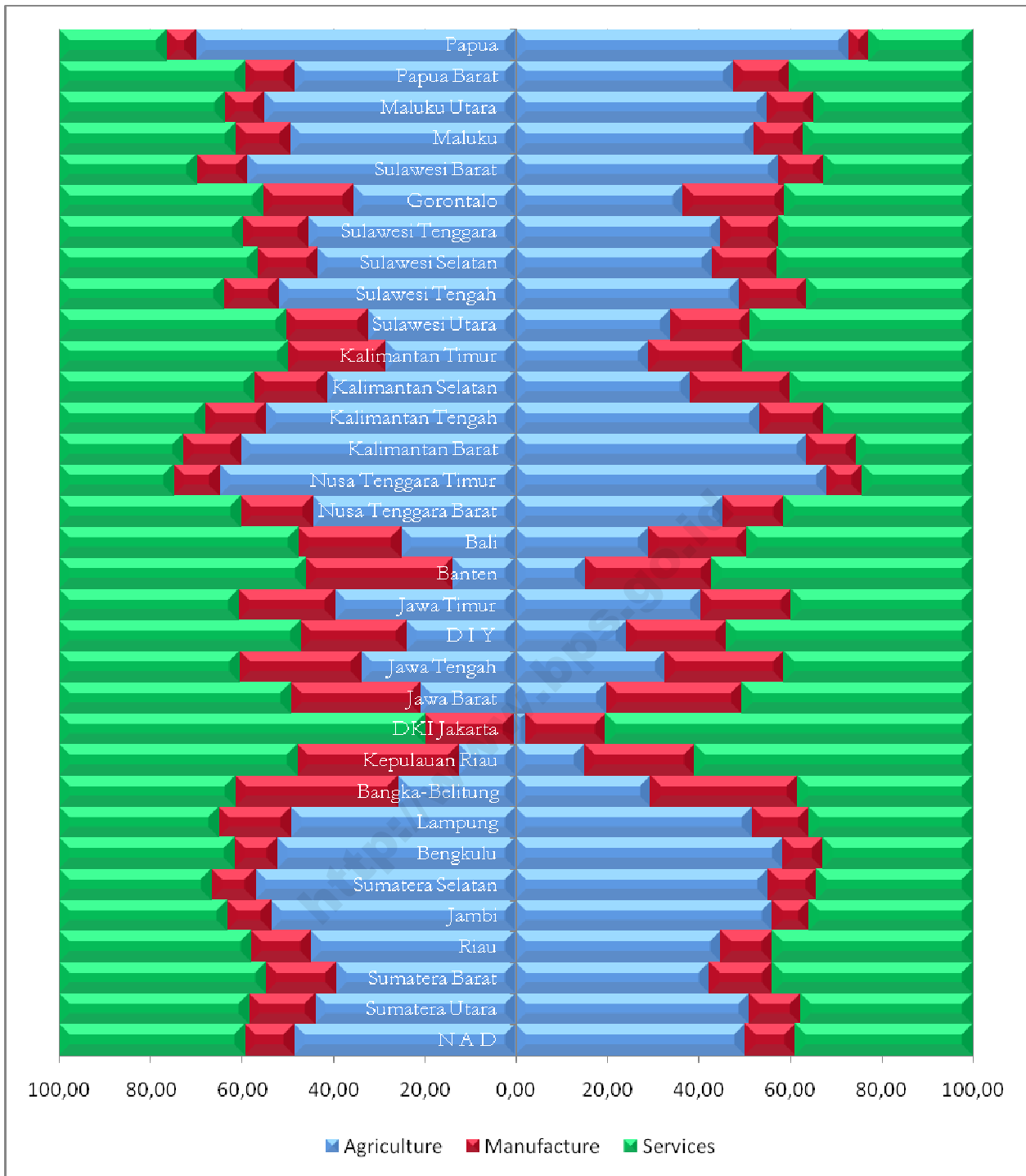
Tabel 6. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, 2011-2012  
(dalam juta)

Indikator	2011		2012
	Februari	Agustus	Februari
<b>Total</b>	<b>111,28</b>	<b>109,67</b>	<b>112,80</b>
a. Pertanian	42,48	39,33	41,21
b. Manufaktur	20,90	22,59	22,23
i. Pertambangan	1,35	1,47	1,62
ii. Industri	13,70	14,54	14,21
iii. Listrik, gas dan air	0,26	0,24	0,30
iv. Bangunan	5,59	6,34	6,10
c. Jasa-jasa	47,91	47,75	49,36
i. Perdagangan	23,24	23,40	24,02
ii. Angkutan	5,59	5,08	5,19
iii. Keuangan	2,06	2,63	2,78
iv. Jasa kemasyarakatan	17,03	16,65	17,37
<b>Laki-laki</b>	<b>67,62</b>	<b>67,99</b>	<b>69,48</b>
a. Pertanian	25,88	24,87	25,67
b. Manufaktur	14,86	16,14	16,12
i. Pertambangan	1,21	1,33	1,43
ii. Industri	7,97	8,45	8,46
iii. Listrik, gas dan air	0,23	0,21	0,25
iv. Bangunan	5,45	6,15	5,97
c. Jasa-jasa	26,88	26,98	27,70
i. Perdagangan	11,48	11,41	11,70
ii. Angkutan	5,14	4,78	4,89
iii. Keuangan	1,46	1,91	1,97
iv. Jasa kemasyarakatan	8,81	8,89	9,14
<b>Perempuan</b>	<b>43,66</b>	<b>41,68</b>	<b>43,32</b>
a. Pertanian	16,59	14,46	15,54
b. Manufaktur	6,04	6,45	6,12
i. Pertambangan	0,14	0,13	0,19
ii. Industri	5,73	6,09	5,75
iii. Listrik, gas dan air	0,02	0,03	0,05
iv. Bangunan	0,14	0,19	0,13
c. Jasa-jasa	21,03	20,78	21,67
i. Perdagangan	11,76	11,99	12,32
ii. Angkutan	0,45	0,30	0,30
iii. Keuangan	0,60	0,72	0,81
iv. Jasa kemasyarakatan	8,21	7,76	8,24



Tabel 7. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, 2011-2012

Indikator	2011		2012
	Februari	Agustus	Februari
<b>Laki dan Perempuan</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
a. Pertanian	38,17	35,86	36,53
b. Manufaktur	18,78	20,60	19,71
i. Pertambangan	1,22	1,34	1,44
ii. Industri	12,31	13,26	12,60
iii. Listrik, gas dan air	0,23	0,22	0,26
iv. Bangunan	5,02	5,78	5,41
c. Jasa-jasa	43,05	43,54	43,76
i. Perdagangan	20,88	21,33	21,29
ii. Angkutan	5,02	4,63	4,60
iii. Keuangan	1,85	2,40	2,46
iv. Jasa kemasyarakatan	15,30	15,18	15,40
<b>Laki-laki</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
a. Pertanian	38,27	36,58	36,94
b. Manufaktur	21,98	23,73	23,19
i. Pertambangan	1,79	1,96	2,06
ii. Industri	11,78	12,43	12,17
iii. Listrik, gas dan air	0,34	0,30	0,36
iv. Bangunan	8,07	9,04	8,60
c. Jasa-jasa	39,75	39,68	39,86
i. Perdagangan	16,97	16,78	16,84
ii. Angkutan	7,59	7,02	7,04
iii. Keuangan	2,15	2,81	2,83
iv. Jasa kemasyarakatan	13,03	13,07	13,15
<b>Perempuan</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
a. Pertanian	38,01	34,68	35,86
b. Manufaktur	13,83	15,47	14,12
i. Pertambangan	0,33	0,32	0,43
ii. Industri	13,13	14,61	13,28
iii. Listrik, gas dan air	0,06	0,08	0,11
iv. Bangunan	0,31	0,46	0,30
c. Jasa-jasa	48,17	49,84	50,02
i. Perdagangan	26,94	28,77	28,43
ii. Angkutan	1,03	0,73	0,70
iii. Keuangan	1,38	1,73	1,87
iv. Jasa kemasyarakatan	18,82	18,61	19,01



Grafik 6. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Provinsi, Agustus 2011 dan Februari 2012

#### 4.4. KILM 5. PEKERJA PARUH WAKTU

Jumlah jam kerja berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan pekerja serta pada tingkat produktivitas dan biaya tenaga kerja perusahaan. Mengukur tingkat dan tren jam kerja di masyarakat untuk berbagai kelompok pekerja dan untuk pekerja secara individu menjadi penting ketika melakukan pemantauan kerja dan kondisi hidup, maupun ketika menganalisis perkembangan ekonomi. Indikator pekerja paruh waktu terfokus pada individu dengan jumlah jam kerja kurang dari *full time*, sebagai proporsi dari total pekerja.

Pekerja paruh waktu baik secara absolut maupun tingkat/persentase selama periode Februari 2011 sampai Februari 2012 sedikit berfluktuatif. Tingkat pekerja paruh waktu pada Februari 2011 sebesar 16,59 persen, meningkat sehingga pada Agustus 2011 menjadi 19,21 persen, kemudian kembali menurun menjadi 18,33 persen pada Februari 2012.

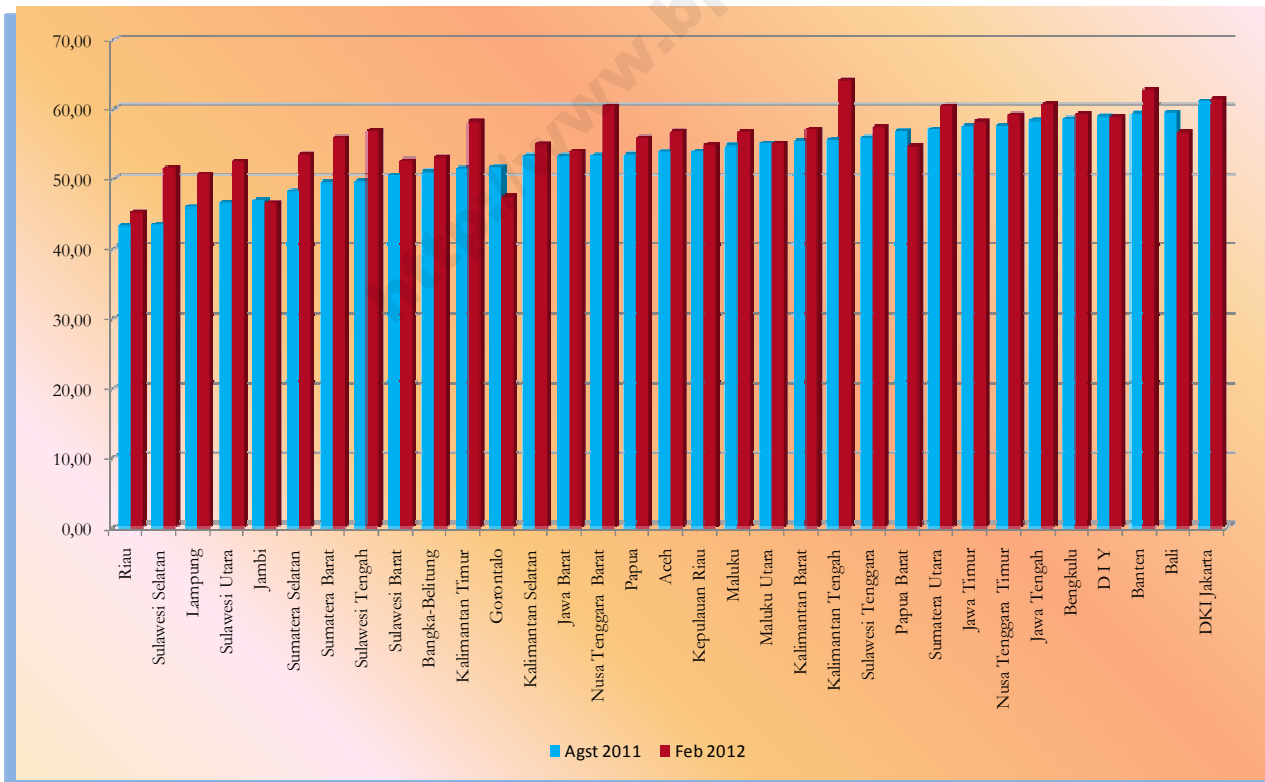
Pada Agustus 2011 tingkat pekerja paruh waktu mencapai 19,21 persen yang dapat diartikan bahwa dari 100 orang yang bekerja, terdapat sekitar 19 orang pekerja paruh waktu. Sementara *share* perempuan pada pekerja paruh waktu sebesar 54,21 persen yang berarti bahwa dari 100 pekerja paruh waktu, 54 orang adalah perempuan. Tingkat pekerja paruh waktu perempuan lebih tinggi daripada tingkat pekerja paruh waktu laki-laki, masing-masing sebesar 27,40 persen dan 14,19 persen.

Pada Februari 2012 tingkat pekerja paruh waktu menurun hingga mencapai 18,33 persen. Artinya dari 100 orang yang bekerja, terdapat sekitar 18 orang yang bekerja paruh waktu. Penurunan persentase pekerja paruh waktu ini terlihat seimbang baik untuk pekerja laki-laki (dari 14,19 persen pada Agustus 2011 menjadi 12,88 persen pada Februari 2012) dan pekerja perempuan (dari 27,40 persen pada Agustus 2011 menjadi 27,08 persen pada Februari 2012). Tetapi, jika dilihat berdasarkan klasifikasi daerah, penurunan persentase pekerja paruh waktu justru terjadi di daerah perdesaan (dari 27,54 persen pada Agustus 2011 menjadi 23,38 persen pada Februari 2012), sedangkan di daerah perkotaan, justru terjadi peningkatan (dari 10,19 persen pada Agustus 2011 menjadi 12,84 persen pada Februari 2012). Fenomena yang terjadi pada pekerja paruh waktu perempuan adalah meningkatnya *share* perempuan pada pekerja paruh waktu, yaitu dari 54 per 100 perempuan bekerja pada Agustus 2011 menjadi 57 orang per 100 perempuan bekerja pada Februari 2012. Akan tetapi, peningkatan ini juga mungkin disebabkan

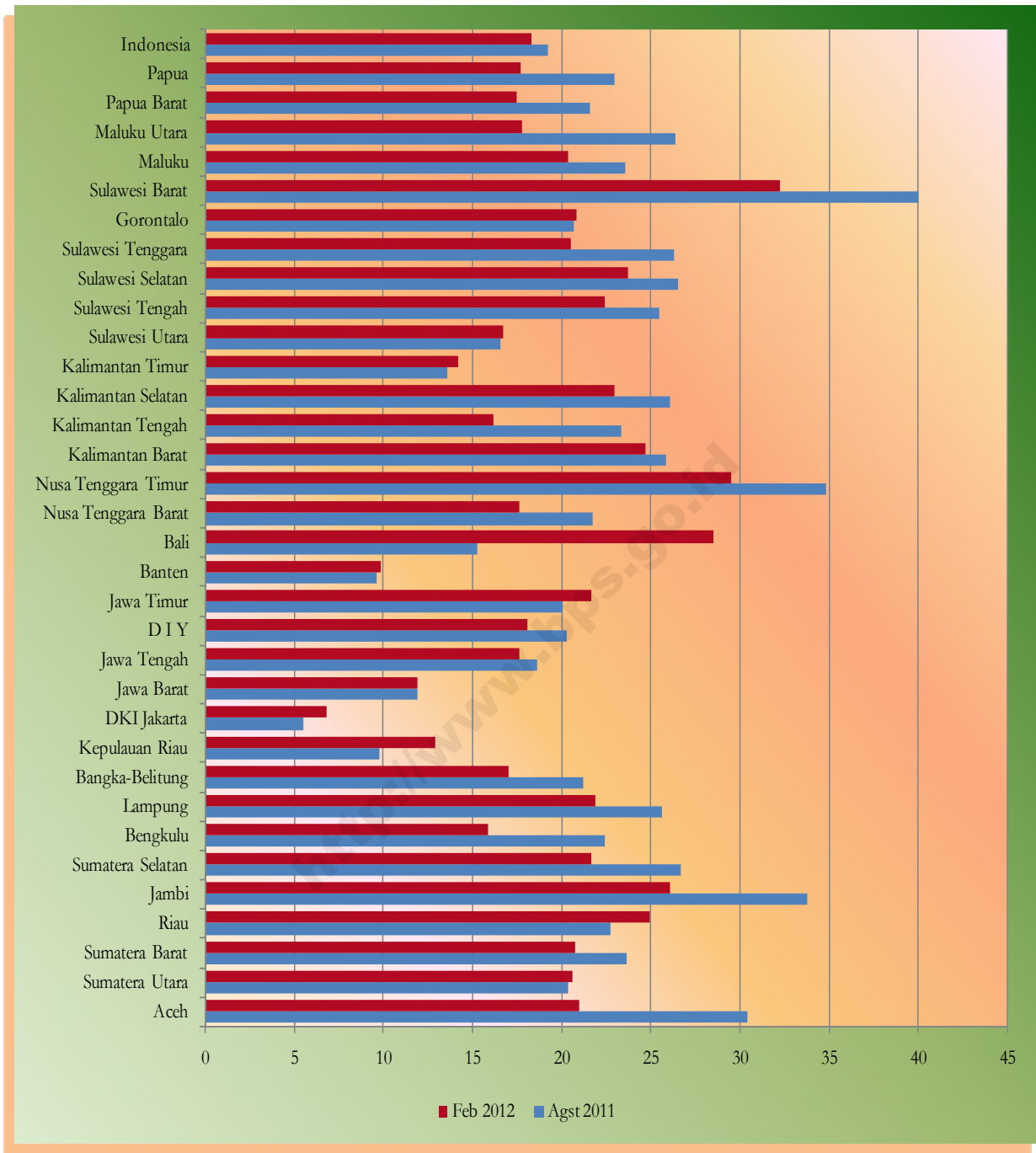
oleh meningkatnya tingkat partisipasi perempuan di pasar kerja, bukan semata-mata lebih panjangnya jam kerja perempuan.

Tabel 8. Tingkat Pekerja Paruh Waktu, 2011-2012  
(dalam Persen)

Indikator	2011		2012
	Februari	Agustus	Februari
<b>Tingkat Pekerja Paruh Waktu</b>	<b>16,59</b>	<b>19,21</b>	<b>18,33</b>
a. Laki-laki	11,12	14,19	12,88
b. Perempuan	25,06	27,40	27,08
c. Perkotaan	10,29	10,19	12,84
d. Perdesaan	22,25	27,54	23,38
<b>Share Perempuan Pada Pekerja Paruh Waktu</b>	<b>59,28</b>	<b>54,21</b>	<b>56,73</b>



Grafik 7. *Share* Perempuan Pada Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi, Agustus 2011 dan Februari 2012



Grafik 8. Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi, Agustus 2011 dan Februari 2012

#### 4.5. KILM 6. JAM KERJA

KILM ini bertujuan untuk menunjukkan jumlah orang yang dipekerjakan menurut jam bekerja (biasanya atau sebenarnya): kurang dari 25 jam kerja perminggu, antara 25 dan 34 jam, antara 35 dan 39 jam, antara 40 dan 48 jam, antara 49 dan 59 jam, 40 jam ke atas, 50 jam ke atas, dan 60 jam ke atas, sebagaimana data yang tersedia.

Hasil Sakernas Februari 2011 sampai Februari 2012 menunjukkan sebagian besar penduduk bekerja di atas 35 jam perminggu yaitu lebih dari dua per tiga dari total penduduk yang bekerja. Pada Februari 2012 terjadi penurunan jumlah penduduk bekerja di bawah 35 jam jika dibandingkan Agustus 2011 yaitu dari 33,94 persen pada Agustus 2011 menjadi 33,45 persen pada Februari 2012.

Baik pada Februari 2011, Agustus 2011 maupun Februari 2012 menunjukkan bahwa pekerja perempuan yang bekerja di bawah 35 jam perminggu lebih mendominasi dibanding pekerja laki-laki dan terlihat pada hampir setiap pengelompokan jumlah jam kerja 35 jam per minggu ke bawah. Sebagai gambaran pada Februari 2012, persentase pekerja perempuan yang jam kerjanya selama seminggu 1-14 jam sebesar 9,82 persen sementara persentase pekerja laki-laki dengan kategori jam kerja yang sama hanya sebesar 3,74 persen.

Berbeda dengan komposisi jam kerja berdasarkan jenis kelamin, komposisi pekerja yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam perminggu) berdasarkan klasifikasi Desa-Kota terlihat agak berbeda. Di daerah perkotaan, proporsi pekerja yang bekerja kurang dari 35 jam perminggu ternyata mengalami peningkatan dari 21,78 persen pada Agustus 2011 menjadi 23,43 persen pada Februari 2012. Penurunan justru terjadi pada daerah perdesaan dari 45,20 persen pada Agustus 2011 menjadi 42,65 persen pada Februari 2012.

Secara keseluruhan persentase pekerja berdasarkan jam kerja tertinggi pada kelompok jam kerja 40-48 jam per-minggu. Pada Februari 2011 persentase pekerja yang bekerja selama 40-48 jam seminggu adalah 27,55 persen, meningkat menjadi 28,85 persen pada Agustus 2011 dan kembali meningkat menjadi 29,40 persen pada Februari 2012. Hal ini diikuti dengan menurunnya persentase pekerja yang bekerja melebihi jam kerja 48 jam perminggu. Pekerja dengan jam kerja 49-59 jam seminggu pada Februari 2011 sebesar 15,54 persen terus turun sampai Februari 2012 menjadi 14,98 persen begitu juga pekerja dengan jam kerja (lebih dari 60

jam seminggu) pada Februari 2011 sebesar 13,76 persen terus menurun menjadi 11,72 persen pada Februari 2012.

Tiga provinsi dengan proporsi pekerja dengan jam kerja dibawah 35 jam seminggu paling banyak, hasil Sakernas Februari 2012 yaitu Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur dan Aceh. Sedangkan tiga provinsi dengan proporsi pekerja dibawah 35 jam seminggu paling kecil yaitu DKI Jakarta, Banten dan Kepulauan Riau.

Tabel 9. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja, 2011-2012

Indikator	2011		2012
	Februari	Agustus	Februari
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
a. 0 jam*	2,01	2,40	1,93
b. 1 - 14 jam	5,54	6,05	6,08
c. 15 - 24 jam	11,35	11,75	11,23
d. 25 - 34 jam	13,84	13,74	14,21
e. 35 - 39 jam	10,41	10,14	10,45
f. 40 - 48 jam	27,55	28,85	29,40
g. 49 - 59 jam	15,54	15,07	14,98
h. Lebih dari/sama dengan 60 jam	13,76	12,00	11,72
<b>Laki-Laki</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
a. 0 jam*	2,15	2,30	1,99
b. 1 - 14 jam	3,50	3,74	3,78
c. 15 - 24 jam	8,24	9,09	8,23
d. 25 - 34 jam	12,40	12,63	12,48
e. 35 - 39 jam	9,76	9,75	10,01
f. 40 - 48 jam	30,94	32,41	33,77
g. 49 - 59 jam	18,69	17,62	17,65
h. Lebih dari/sama dengan 60 jam	14,32	12,47	12,09
<b>Perempuan</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
a. 0 jam*	1,79	2,57	1,83
b. 1 - 14 jam	8,71	9,82	9,75
c. 15 - 24 jam	16,16	16,09	16,05
d. 25 - 34 jam	16,06	15,55	16,98
e. 35 - 39 jam	11,42	10,77	11,15
f. 40 - 48 jam	22,32	23,05	22,39
g. 49 - 59 jam	10,66	10,91	10,70
h. Lebih dari/sama dengan 60 jam	12,88	11,24	11,14

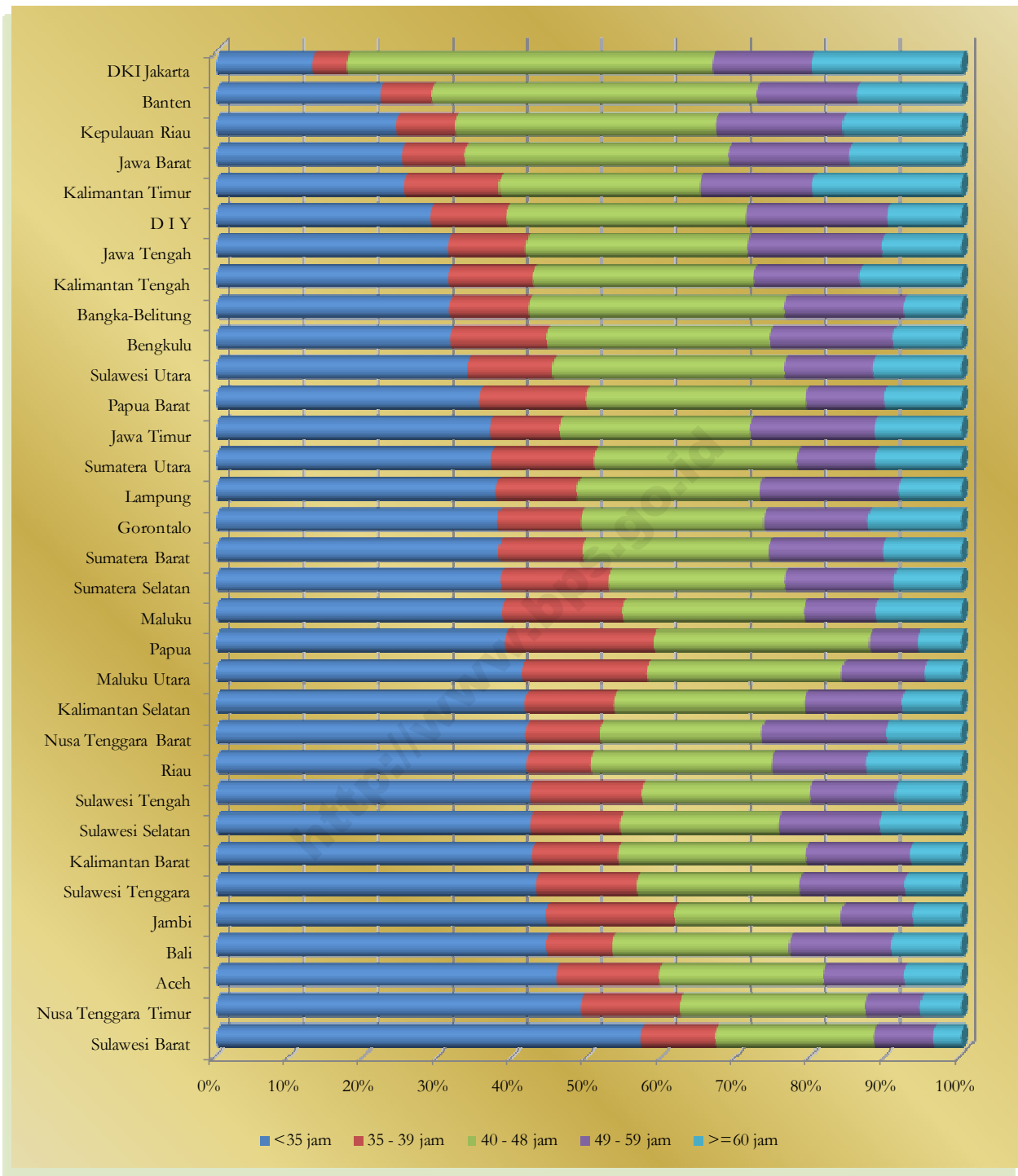
\*0 jam: Sementara tidak bekerja

Tabel 9. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja, 2011-2012  
(Lanjutan)

Indikator	2011		2012
	Februari	Agustus	Februari
<b>Perkotaan</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
a. 0 jam*	2,12	2,16	1,91
b. 1 - 14 jam	4,00	3,66	4,15
c. 15 - 24 jam	7,38	6,94	7,21
d. 25 - 34 jam	10,15	9,02	10,16
e. 35 - 39 jam	9,13	8,72	8,86
f. 40 - 48 jam	32,50	36,43	35,99
g. 49 - 59 jam	16,48	16,83	16,17
h. Lebih dari/sama dengan 60 jam	18,24	16,25	15,57
<b>Perdesaan</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
a. 0 jam*	1,91	2,63	1,94
b. 1 - 14 jam	6,93	8,26	7,85
c. 15 - 24 jam	14,92	16,20	14,93
d. 25 - 34 jam	17,15	18,10	17,93
e. 35 - 39 jam	11,56	11,44	11,91
f. 40 - 48 jam	23,11	21,85	23,35
g. 49 - 59 jam	14,70	13,44	13,90
h. Lebih dari/sama dengan 60 jam	9,72	8,07	8,19

\*0 jam: Sementara tidak bekerja





Grafik 9. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Jam Kerja dan Provinsi, Februari 2012

#### 4.6. KILM 7. PEKERJA SEKTOR INFORMAL

Sektor informal merupakan bagian penting dari kehidupan ekonomi, sosial dan politik di sebagian besar negara berkembang, serta beberapa negara maju. Di negara-negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk atau urbanisasi yang tinggi, ekonomi informal cenderung tumbuh untuk menyerap sebagian besar tenaga kerja. Konferensi Internasional Statistik Perburuhan (ICLS) ke-15 mendefinisikan sektor informal sebagai unit produksi dalam usaha rumah tangga yang dimiliki oleh rumah tangga. Mereka yang bekerja di sektor informal terdiri semua orang yang, selama periode acuan tertentu, yang bekerja di setidaknya satu unit produksi yang memenuhi konsep sektor informal, terlepas dari status mereka dalam pekerjaan dan apakah itu mereka utama atau pekerjaan sekunder. Resolusi ICLS memperbolehkan beberapa variasi konsep nasional. Akibatnya, informasi untuk indikator sering didasarkan pada definisi nasional dan pengukuran ekonomi informal.

Pada Sakernas Februari 2011 proposi pekerja informal sebesar 58,37 persen mengalami penurunan sebesar 2,53 persen pada Februari 2012 ini. Dibandingkan keadaan Agustus 2011, proporsi pekerja informal mengalami kenaikan yang tentunya diikuti dengan penurunan proporsi pekerja formal. Persentase pekerja sektor informal pada Agustus 2011 adalah 54,66 persen, pada Februari 2012 ini naik menjadi 55,84 persen. Sektor formal pada Agustus 2011 mencapai 45,34 persen dan turun 1,18 persen poin pada Februari 2012 menjadi 44,16 persen.

Dilihat berdasarkan komposisi jenis kelamin, sektor formal masih didominasi kaum pria, dimana sekitar 2/3 dari kue pekerjaan di sektor formal dipegang oleh laki-laki. Pada Februari dan Agustus 2011 persentase laki-laki yang bekerja di sektor formal masing-masing adalah 64,28 persen dan 64,70 persen, relatif tetap pada angka tersebut dengan kenaikan sangat tipis yang mencapai 64,82 persen pada Februari 2012.

Ciri khas sektor formal yaitu sektor yang sebagian besar terdapat di daerah perkotaan terbukti dengan tingginya persentase pekerja formal di perkotaan. Angka Sakernas Agustus 2011 menunjukkan terdapat 67,09 persen pekerja yang bekerja di perkotaan merupakan pekerja sektor formal, sedangkan pada Februari 2012, jumlah ini menurun tipis sebesar 0,27 persen poin. Kondisi yang sama juga terjadi setahun yang lalu, jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2011 persentase pekerja formal di daerah perkotaan juga mendominasi dan turun tipis 0,8 persen poin pada Februari 2012 ini. Sebaliknya, kondisi di perdesaan menunjukkan jumlah pekerja informal mendominasi. Keadaan Februari 2011, Agustus 2011 maupun Februari 2012,

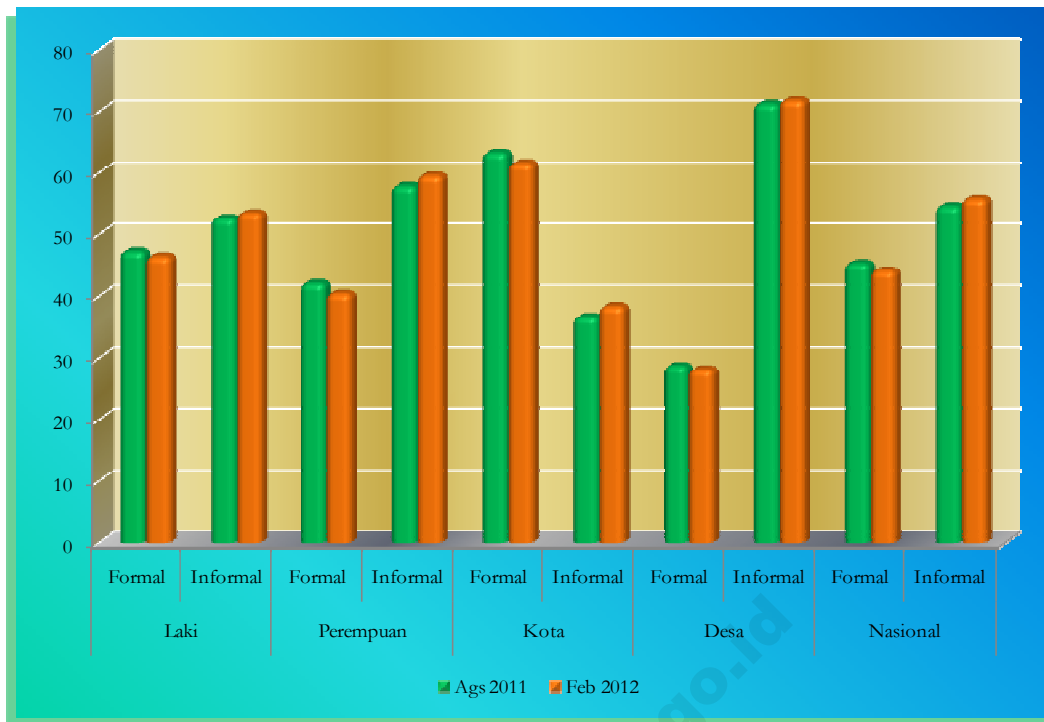
persentase pekerja perdesaan yang bekerja di sektor informal tetap bertahan pada kisaran 67 persen.

Tabel 10. Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Kategori Sektor (Formal/Informal), 2011-2012 (dalam juta)

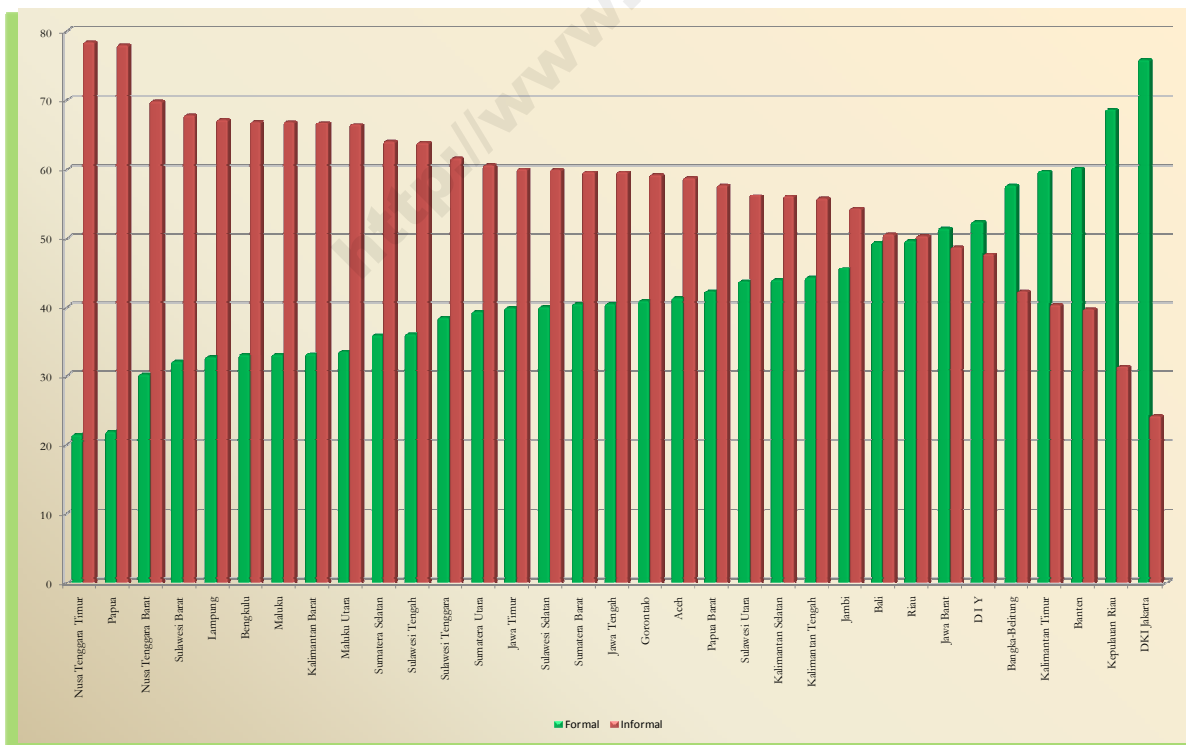
Indikator	2011		2012
	Februari	Agustus	Februari
<b>Total</b>	<b>111,28</b>	<b>109,67</b>	<b>112,80</b>
a. Laki	67,62	67,99	69,48
b. Perempuan	43,66	41,68	43,32
c. Perkotaan	52,71	52,68	54,02
d. Perdesaan	58,57	56,99	58,78
<b>Formal</b>	<b>46,32</b>	<b>49,73</b>	<b>49,81</b>
a. Laki	29,78	32,17	32,29
b. Perempuan	16,55	17,55	17,52
c. Perkotaan	31,32	33,36	33,28
d. Perdesaan	15,00	16,36	16,53
<b>Informal</b>	<b>64,96</b>	<b>59,94</b>	<b>62,99</b>
a. Laki	37,85	35,82	37,19
b. Perempuan	27,11	24,13	25,80
c. Perkotaan	21,39	19,32	20,73
d. Perdesaan	43,57	40,63	42,26

Tabel 11. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Kategori Sektor (Formal/Informal), 2011-2012

Indikator	2011		2012
	Februari	Agustus	Februari
<b>Total Formal+Informal</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
a. Formal	41,63	45,34	44,16
b. Informal	58,37	54,66	55,84
<b>Formal</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
a. Laki	64,28	64,70	64,82
b. Perempuan	35,72	35,30	35,18
c. Perkotaan	67,62	67,09	66,82
d. Perdesaan	32,38	32,91	33,18
<b>Informal</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
a. Laki	58,26	59,75	59,04
b. Perempuan	41,74	40,25	40,96
c. Perkotaan	32,92	32,23	32,92
d. Perdesaan	67,08	67,77	67,08



Grafik 10. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Sektor (Formal/Informal), Agustus 2011 dan Februari 2012



Grafik 11. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Sektor (Formal/Informal) dan Provinsi, Februari 2012

## 5. INDIKATOR PENGANGGURAN

### 5.1. KILM 8. PENGANGGURAN

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) atau biasanya disebut sebagai tingkat pengangguran menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari dan tersedia untuk bekerja. Konsep ini harus dilihat secara hati-hati dan tidak bisa digunakan sebagai pengukuran kesulitan ekonomi, meskipun korelasi antara TPT dengan kesulitan ekonomi (baca:kemiskinan) seringkali ada.

Bersama dengan rasio pekerja terhadap jumlah penduduk (KILM 2), tingkat pengangguran menyediakan indikator situasi pasar tenaga kerja di negara-negara yang mengumpulkan informasi tentang tenaga kerja.

Tingkat pengangguran oleh banyak negara digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan (*excess supply*). Jika bekerja diambil sebagai situasi yang diinginkan bagi orang-orang dalam populasi yang secara ekonomi aktif (angkatan kerja), maka pengangguran menjadi situasi yang tidak diinginkan. Namun, beberapa pengangguran jangka pendek dapat diinginkan dan diperlukan untuk memastikan penyesuaian terhadap fluktuasi ekonomi. Tingkat pengangguran pada kelompok tertentu, ditentukan oleh usia, jenis kelamin, pekerjaan atau lapangan usaha, juga berguna dalam mengidentifikasi kelompok pekerja dan sektor-sektor yang paling rentan terhadap pengangguran.

Tingkat pengangguran dapat dianggap sebagai indikator yang paling informatif yang mencerminkan indikasi pasar umum dan kinerja pasar tenaga kerja dan ekonomi secara keseluruhan, tetapi, tidak harus ditafsirkan sebagai ukuran kesulitan ekonomi atau kesejahteraan. Bila didasarkan pada standar internasional yang direkomendasikan, tingkat pengangguran hanya memberikan gambaran proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tapi tersedia dan secara aktif mencari pekerjaan.

Angka ini menggambarkan tentang sumber daya ekonomi pekerja menganggur atau anggota keluarga mereka. Penggunaannya harus dibatasi sebagai ukuran pemanfaatan tenaga kerja serta indikasi kegagalan untuk mencari pekerjaan.

Tingkat pengangguran secara matematis didefinisikan sebagai hasil bagi yang dihasilkan dari membagi jumlah pengangguran (untuk negara atau kelompok tertentu pekerja) oleh tenaga kerja yang sesuai, yang merupakan jumlah total orang yang bekerja dan tidak bekerja dalam kelompok. Harus ditekankan bahwa pembagi sebagai dasar statistik ini merupakan tenaga kerja atau bagian penduduk yang aktif secara ekonomi, bukan jumlah penduduk. Perbedaan ini tidak selalu dipahami oleh publik. Memang, istilah "angkatan kerja" dan "bekerja" kadang-kadang keliru digunakan secara bergantian.

Selama periode Februari 2011 sampai Februari 2012 TPT di Indonesia terus mengalami penurunan secara konsisten dan perlahan. TPT pada Februari 2011 sebesar 6,80 persen, turun menjadi 6,56 persen pada Agustus 2011 terus turun menjadi sebesar 6,32 persen pada Februari 2012. Angka 6,32 persen tersebut mempunyai arti bahwa dari 100 orang angkatan kerja di Indonesia ada sekitar 6 orang yang masuk kategori penganggur.

Tabel 12. Tingkat Pengangguran Terbuka, 2011-2012  
(dalam persen)

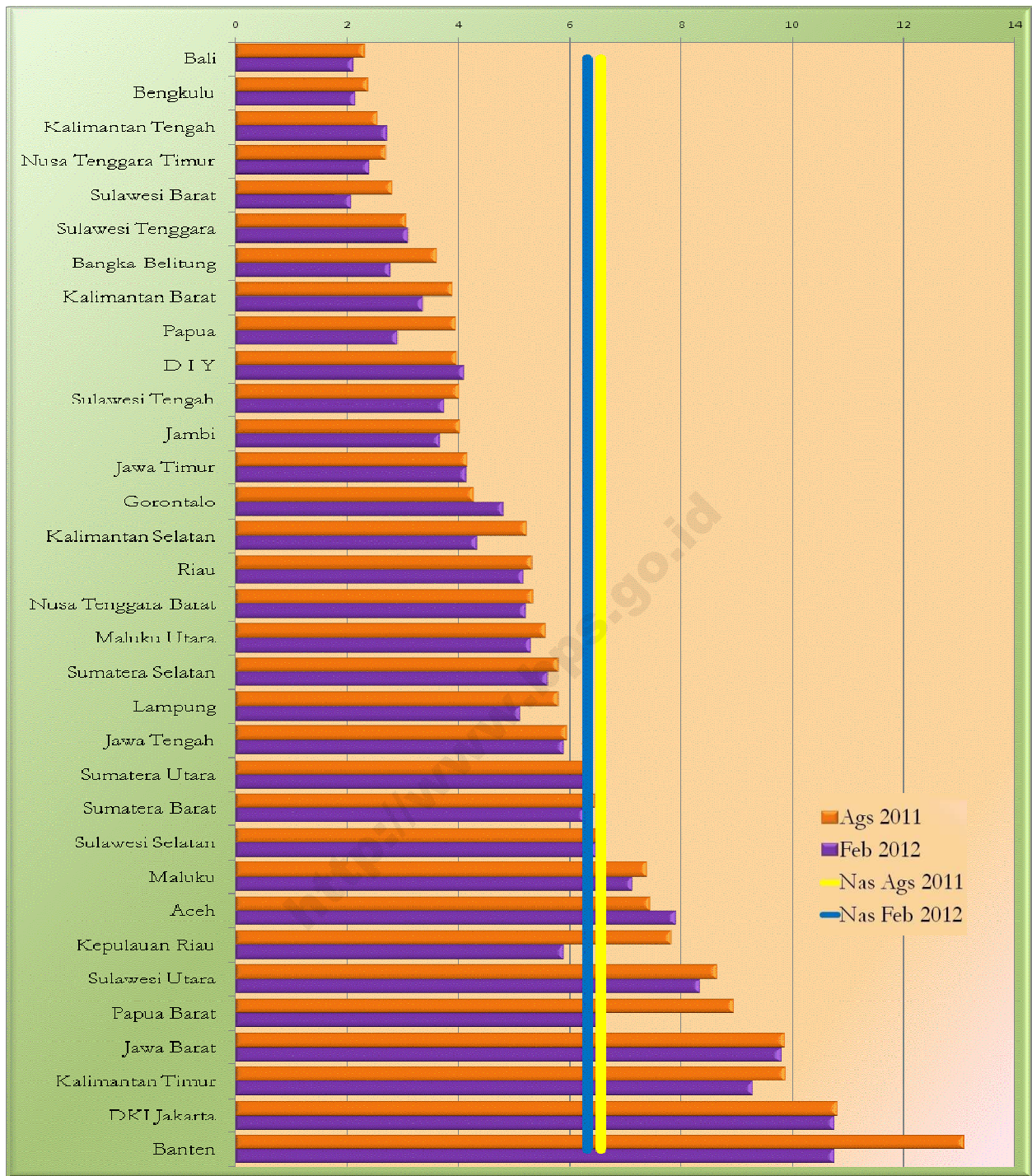
Indikator	2011		2012
	Februari	Agustus	Februari
<b>TPT Nasional</b>	<b>6,80</b>	<b>6,56</b>	<b>6,32</b>
a. Laki	6,42	5,90	5,99
b. Perempuan	7,38	7,62	6,85
c. Perkotaan	9,02	8,23	8,13
d. Perdesaan	4,70	4,96	4,59

Jika dibandingkan dengan Agustus 2011 penurunan tingkat pengangguran pada Februari 2012 lebih terlihat pada perempuan, TPT perempuan mengalami penurunan 0,77 persen poin, sebaliknya TPT laki-laki justru mengalami sedikit peningkatan yaitu dari 5,90 persen pada Agustus 2011 menjadi 5,99 persen pada Februari 2012. Berdasarkan klasifikasi desa-kota pada periode yang sama, baik pada perkotaan maupun perdesaan TPT cenderung mengalami

penurunan. Selama periode ini penurunan TPT di daerah perdesaan sedikit lebih tinggi dibanding perkotaan, masing-masing sebesar 0,37 persen poin dan 0,10 persen poin.

Pada Agustus 2011 tiga provinsi dengan TPT tertinggi yaitu Banten (13,06 persen), DKI Jakarta (10,80 persen) dan Kalimantan Timur (9,84 persen), akan tetapi pada Februari 2012 terjadi sedikit perubahan. Dimana posisi pertama dan kedua tetap yaitu Banten (10,74 persen) dan DKI Jakarta (10,72 persen), sementara posisi ketiga ditempati Jawa Barat (9,78 persen). Sedangkan provinsi dengan TPT terendah pada Februari 2012 adalah Sulawesi Barat (2,07 persen), Bali (2,10 persen), dan Bengkulu (2,14 persen). Sementara pada Agustus 2011 posisi ini diduduki oleh Provinsi Bali, Bengkulu, dan Kalimantan Tengah dengan TPT masing-masing sebesar 2,32 persen, 2,37 persen, dan 2,54 persen.

<http://www.bps.go.id>



Grafik 12. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi, Agustus 2011 dan Februari 2012



## 5.2. KILM 9. PENGANGGURAN PADA KELOMPOK USIA MUDA

Penganggur pada kelompok usia muda merupakan masalah kebijakan yang penting bagi banyak negara, yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan. Untuk tujuan indikator ini, istilah "usia muda" mencakup orang yang berusia 15 sampai 24, sedangkan "orang dewasa" didefinisikan sebagai orang yang berusia 25 tahun ke atas. Indikator pengangguran kaum muda disajikan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tingkat pengangguran kaum muda.
- 2) Tingkat pengangguran kaum muda sebagai persentase dari tingkat pengangguran dewasa.
- 3) *Share* pengangguran kaum muda terhadap total; dan
- 4) Pengangguran kaum muda sebagai proporsi dari populasi kaum muda.

Pada Februari dan Agustus 2011, TPT usia muda masing-masing sebesar 23,92 dan 19,99 persen sedangkan pada Februari 2012 TPT usia muda menurun menjadi 19,08 persen. Berdasarkan klasifikasi jenis kelamin Laki-Perempuan, TPT usia muda cenderung mengalami penurunan dari Februari maupun Agustus 2011, kecuali TPT usia muda laki-laki yang mengalami kenaikan dari Agustus 2011 sebesar 19,27 persen, pada Februari 2012 ini naik menjadi 19,33 persen. Dari Februari 2011 TPT usia muda di wilayah perkotaan mengalami penurunan yang relatif besar yaitu 6,63 poin.

Seiring menurunnya TPT usia muda, rasio TPT usia muda terhadap TPT penduduk dewasa juga menurun rata-rata 2,05 poin dari Februari 2011 dan 0,12 poin dari Agustus 2011. Berdasarkan jenis kelamin, penurunan rasio yang relatif besar terjadi pada jenis kelamin perempuan di Februari 2011 sebesar 2,69 poin, yaitu 7,06 menjadi 4,37 pada Februari 2012. Sedangkan menurut klasifikasi desa-kota, penurunan yang relatif besar terjadi di wilayah perdesaan yang mengalami penurunan sebesar 2,05 poin, dari 9 pada Februari 2011 menjadi 6,95 kali pada Februari 2012.

Penurunan jumlah penganggur usia muda secara absolut mengakibatkan turunnya *share* penganggur usia muda terhadap total penganggur dan turunnya *share* penganggur usia muda terhadap total penduduk usia muda. Jika dibandingkan dengan keadaan setahun yang lalu pada Februari 2011, *share* penganggur usia muda terhadap total penganggur menurun sekitar 7 persen menjadi 53,57 persen. Pada Agustus 2011 *share* penganggur usia muda terhadap total

penganggur adalah 54,23 persen dan turun sebesar 0,66 persen poin pada Februari 2012 menjadi 53,57 persen. Artinya, pada Februari 2012, dari 100 penganggur, terdapat sekitar 54 orang penganggur diantaranya berusia antara 15 sampai 24 tahun.

Pada Februari dan Agustus 2011 *share* penganggur usia muda terhadap total penduduk usia muda adalah 12,03 persen dan 10,07 persen, pada Februari 2012 ini *share* penganggur usia muda terhadap total penduduk usia muda turun menjadi 9,77 persen. Artinya, pada Februari 2012, dari 100 penduduk usia muda terdapat sekitar 10 orang diantaranya yang menganggur.

Tabel 13. Indikator Pengangguran Usia Muda di Indonesia, 2011-2012

Indikator	2011		2012
	Februari	Agustus	Februari
<b>TPT Penduduk Usia Muda (%)</b>	<b>23,92</b>	<b>19,99</b>	<b>19,08</b>
a. Laki	23,01	19,27	19,33
b. Perempuan	25,28	21,04	18,69
c. Perkotaan	29,30	23,12	22,67
d. Perdesaan	18,31	16,94	15,60
<b>Rasio TPT Usia Muda terhadap TPT Dewasa</b>	<b>7,40</b>	<b>5,47</b>	<b>5,35</b>
a. Laki	7,65	6,18	6,19
b. Perempuan	7,06	4,65	4,37
c. Perkotaan	6,47	4,64	4,57
d. Perdesaan	9,00	7,11	6,95
<b>Share Penganggur Usia Muda terhadap Total Penganggur</b>	<b>60,64</b>	<b>54,23</b>	<b>53,57</b>
a. Laki	61,09	56,25	57,10
b. Perempuan	60,03	51,72	48,67
c. Perkotaan	58,89	50,33	49,90
d. Perdesaan	63,80	60,42	59,77
<b>Share Penganggur Usia Muda terhadap Total Penduduk Usia Muda</b>	<b>12,03</b>	<b>10,07</b>	<b>9,77</b>
a. Laki	13,76	11,50	12,04
b. Perempuan	10,27	8,63	7,47
c. Perkotaan	14,35	11,48	11,44
d. Perdesaan	9,47	8,66	8,10

### 5.3. KILM 11. PENGANGGURAN DAN PENDIDIKAN

Indikator ini melihat hubungan antara pencapaian pendidikan pekerja dan pengangguran yang memberikan gambaran mengenai perubahan dalam permintaan pekerja. Informasi yang diberikan dapat memiliki implikasi penting bagi pekerja dan kebijakan pendidikan. Jika dikonfirmasi bahwa orang dengan tingkat pendidikan yang rendah berada pada risiko yang lebih tinggi menjadi pengangguran, reaksi politik yang mungkin adalah meningkatkan tingkat pendidikan mereka atau untuk menciptakan lebih banyak pekerjaan dengan keterampilan rendah (*low skilled job*) di dalam negeri. Cara lainnya, *share* pengangguran yang lebih tinggi di kalangan orang-orang dengan pendidikan tinggi bisa menunjukkan kurangnya pekerjaan teknis yang profesional dan tingkat tinggi.

Tabel 14. TPT Menurut Tingkat Pendidikan, 2011-2012  
(dalam persen)

Indikator	2011		2012
	Februari	Agustus	Februari
<b>TPT Nasional</b>	<b>6,80</b>	<b>6,56</b>	<b>6,32</b>
<b>Tidak Pernah Sekolah</b>	<b>1,74</b>	<b>3,19</b>	2,12
a. Laki	1,69	2,74	2,92
b. Perempuan	1,78	3,56	1,52
c. Perkotaan	2,81	5,93	4,84
d. Perdesaan	1,48	2,36	1,23
<b>Sekolah Dasar</b>	<b>4,86</b>	<b>5,08</b>	<b>5,04</b>
a. Laki	4,85	4,73	5,32
b. Perempuan	4,88	5,66	4,59
c. Perkotaan	6,64	6,77	6,70
d. Perdesaan	3,74	3,97	3,99
<b>Sekolah Menengah</b>	<b>11,37</b>	<b>10,59</b>	<b>10,05</b>
a. Laki	9,93	9,00	8,28
b. Perempuan	14,29	13,79	13,56
c. Perkotaan	11,82	10,80	10,67
d. Perdesaan	10,35	10,12	8,69
<b>Sekolah Tinggi</b>	<b>10,57</b>	<b>7,71</b>	<b>7,12</b>
a. Laki	8,80	6,13	4,91
b. Perempuan	12,54	9,41	9,64
c. Perkotaan	11,36	7,40	7,45
d. Perdesaan	7,89	8,62	6,05

Dari tabel di atas dapat dilihat TPT berdasarkan pendidikan yang ditamatkan. Secara umum dapat dikatakan bahwa TPT menurut tingkat pendidikan cenderung turun dari waktu ke waktu, kecuali TPT pada tingkat sekolah dasar yang naik dari 4,86 persen pada Februari 2011 menjadi 5,04 persen pada Februari 2012, namun mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan kondisi Agustus 2011 yaitu sebesar 0,04 persen. TPT terbesar berdasarkan tingkat pendidikan dapat ditemui pada tingkat pendidikan sekolah menengah dimana pada Februari 2011 TPT pada tingkat pendidikan ini adalah 11,37 persen, sedangkan pada Agustus 2011 turun menjadi 10,59 persen dan mencapai 10,05 pada Februari 2012.

Penurunan TPT tertinggi pada Februari 2012 terjadi pada tingkat pendidikan tinggi dengan penurunan sebesar 0,59 persen poin dibanding Agustus 2011 (7,71 persen) dan sebesar 3,45 persen poin dibanding keadaan setahun yang lalu (10,57 persen). Penurunan TPT pada kelompok pendidikan ini selama setahun terakhir nampak pada penduduk perempuan dengan penurunan sebesar 2,90 persen poin, sedangkan pada laki-laki turun sebesar 3,89 persen poin. Sementara itu selama enam bulan terakhir, meski mengalami penurunan, namun TPT perempuan pada kelompok pendidikan ini mengalami sedikit kenaikan yaitu sebesar 0,23 persen poin. Pada klasifikasi daerah perkotaan dan perdesaan, dimana di daerah perkotaan justru terjadi sedikit kenaikan sebesar 0,05 persen poin (7,40 persen pada Agustus 2011 menjadi 7,45 persen pada Februari 2012), sedangkan di daerah perdesaan terjadi penurunan sebesar 2,57 persen poin (8,62 persen pada Agustus 2011 menjadi 6,05 persen pada Februari 2012).

Kenaikan TPT terbesar secara keseluruhan ternyata terjadi pada kelompok penduduk yang tidak pernah sekolah yang tinggal di daerah perkotaan. Kenaikan sebesar 2,03 persen poin terjadi pada periode Februari 2011-Februari 2012. Pada Februari 2011 TPT pada kelompok ini adalah 2,81 persen, sedangkan pada Februari 2012 meningkat menjadi 4,84 persen. Sedangkan bila dibanding keadaan Agustus 2011, kenaikan terbesar terjadi pada penduduk laki-laki dengan tingkat pendidikan sekolah dasar dengan kenaikan sebesar 0,59 persen poin.

Melihat komposisi penganggur berdasarkan tingkat pendidikan memberikan gambaran mengenai tenaga kerja yang tersedia yang tidak terserap, berdasarkan tingkat keahlian mereka. Secara umum data Sakernas selama Februari 2011-Februari 2012 menunjukkan bahwa penganggur terbanyak adalah penganggur dengan pendidikan Sekolah Dasar. Pada Februari 2012, persentase penganggur dengan pendidikan Sekolah Dasar adalah 48,89 persen dan meningkat sebesar 0,86 persen poin jika dibanding Agustus 2011 (48,02 persen). Penurunan

terbesar komposisi penganggur berdasarkan pendidikan terjadi pada mereka yang berpendidikan menengah. Pada periode Agustus 2011-Februari 2012 terjadi penurunan sebesar 0,88 persen poin, yaitu 39,93 persen pada Agustus 2011 menjadi 39,06 persen pada Februari 2012. Selain pendidikan menengah, komposisi penganggur yang tidak pernah menyanam pendidikan juga mengalami penurunan, yaitu sebesar 0,85 persen poin (2,47 persen pada Agustus 2011 menjadi 1,62 persen pada Februari 2012).

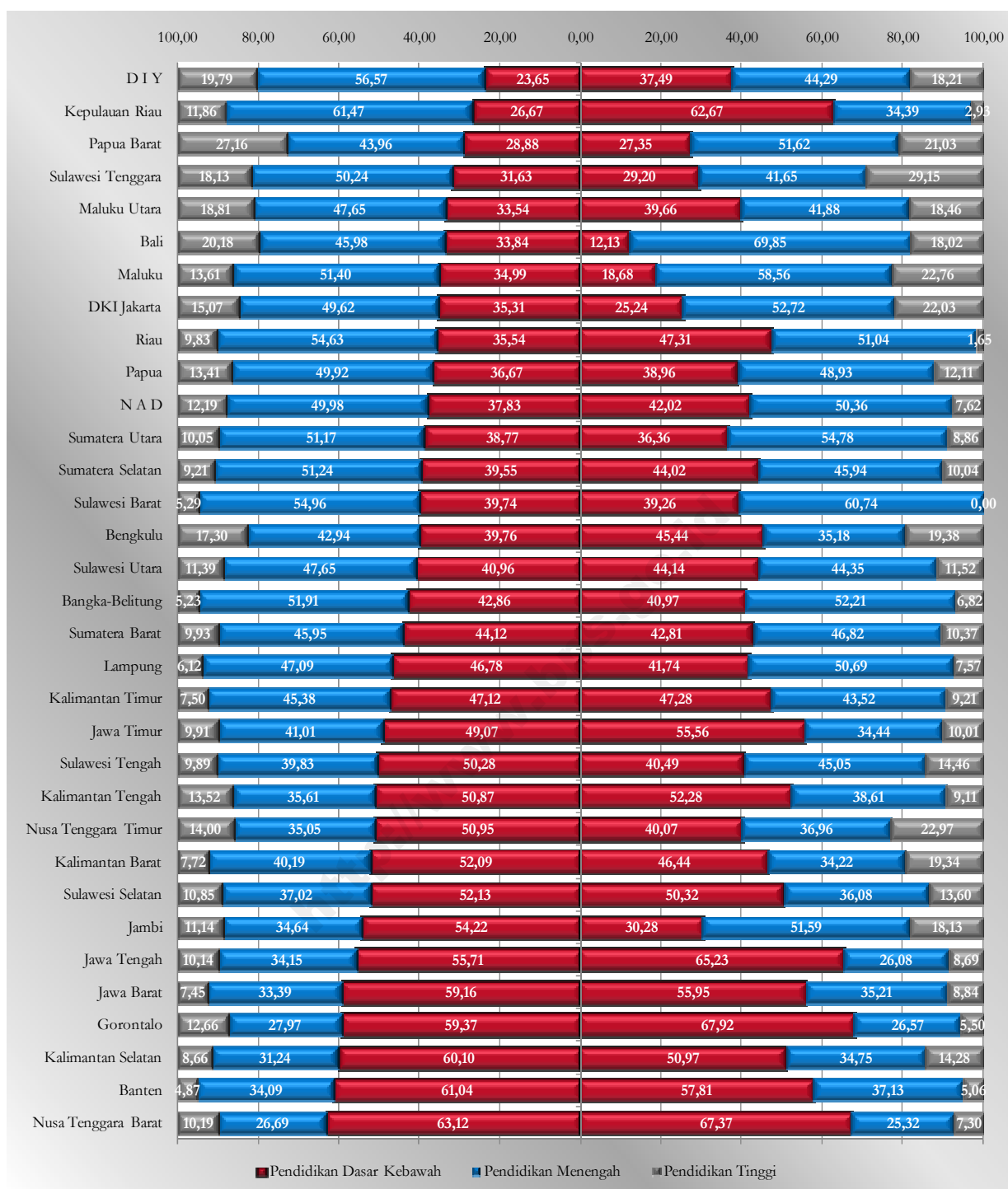
Seperti yang terlihat pada Tabel 15, berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin, persentase yang menunjukkan penganggur perempuan lebih besar dibandingkan dengan laki-laki justru terlihat pada pendidikan sekolah menengah dan sekolah tinggi. Sementara persentase penganggur dengan tingkat pendidikan rendah di wilayah perdesaan lebih besar daripada perkotaan.

Tabel 15. Persentase Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan, 2011-2012

Indikator	2011		2012
	Februari	Agustus	Februari
<b>Nasional</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Tidak Pernah Sekolah</b>	<b>1,14</b>	<b>2,47</b>	<b>1,62</b>
a. Laki	0,84	1,72	1,64
b. Perempuan	1,52	3,40	1,58
c. Perkotaan	0,56	1,74	1,45
d. Perdesaan	2,17	3,63	1,90
<b>Sekolah Dasar</b>	<b>44,74</b>	<b>48,02</b>	<b>48,89</b>
a. Laki	47,06	50,16	54,97
b. Perempuan	41,65	45,37	40,43
c. Perkotaan	36,61	41,31	40,13
d. Perdesaan	59,44	58,70	63,69
<b>Sekolah Menengah</b>	<b>41,22</b>	<b>39,93</b>	<b>39,06</b>
a. Laki	42,19	41,01	36,79
b. Perempuan	39,94	38,61	42,21
c. Perkotaan	46,19	45,72	45,21
d. Perdesaan	32,24	30,74	28,67
<b>Sekolah Tinggi</b>	<b>12,90</b>	<b>9,57</b>	<b>10,44</b>
a. Laki	9,90	7,11	6,60
b. Perempuan	16,89	12,62	15,78
c. Perkotaan	16,64	11,23	13,22
d. Perdesaan	6,14	6,93	5,75

Komposisi penganggur dengan tingkat pendidikan dasar ke bawah paling tinggi terdapat di Provinsi Gorontalo dengan persentase sebesar 67,92 persen pada Februari 2012 atau naik sebesar 8,55 persen poin dibanding kondisi Agustus 2011 sebesar 59,37 persen. Sementara persentase penganggur dengan tingkat pendidikan tinggi terbesar pada Februari 2012 terdapat di Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu sebesar 29,20 persen yang turun sebesar 2,48 persen poin dibanding Agustus 2011.

Penurunan komposisi penganggur dengan tingkat pendidikan dasar ke bawah paling paling besar berturut-turut terdapat di Provinsi Jambi, Provinsi Bali dan Provinsi Maluku dengan penurunan masing-masing sebesar 23,94 persen poin, 21,71 persen poin, dan 16,31 persen poin selama periode Agustus 2011-Februari 2012. Proporsi penganggur dengan tingkat pendidikan menengah yang mengalami penurunan paling besar adalah Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi DIY, dan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan penurunan masing-masing 27,08 persen poin, 12,27 persen poin, dan 8,58 persen poin selama periode yang sama. Sedangkan provinsi dengan penurunan komposisi penganggur pada tingkat pendidikan tinggi yang paling besar adalah Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Riau, dan Provinsi Gorontalo dengan penurunan masing-masing sebesar 8,92 persen poin, 8,19 persen poin, dan 7,16 persen poin (Agustus 2011-Februari 2012).



Grafik 13. Persentase Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan dan Provinsi, Agustus 2011 dan Februari 2012

#### 5.4. KILM 12. SETENGAH PENGANGGUR

Penduduk yang dikategorikan sebagai setengah penganggur adalah mereka yang jam kerjanya di bawah ambang batas jam kerja normal (<35 jam dalam seminggu) dan mereka masih mencari atau menerima pekerjaan tambahan untuk menambah jumlah jam kerjanya.

Pada Februari 2012 jumlah setengah penganggur di Indonesia mencapai 14,87 juta orang, dimana 8,07 juta orang berjenis kelamin laki-laki dan sisanya adalah perempuan. Apabila dibandingkan dengan Agustus 2011 jumlah setengah penganggur di Indonesia naik 1,34 juta orang dimana jumlah setengah penganggur pada periode ini mencapai 13,52 juta orang, yang terdiri dari 7,66 juta laki-laki dan 5,86 juta perempuan yang tersebar di perkotaan sebesar 4,96 juta orang dan perdesaan sebesar 8,56 juta orang.

Tabel 16. Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang termasuk Setengah Penganggur, 2011-2012 (dalam juta)

Indikator	2011		2012
	Februari	Agustus	Februari
<b>Total</b>	<b>15,74</b>	<b>13,52</b>	<b>14,87</b>
a. Laki	8,81	7,66	8,07
b. Perempuan	6,93	5,86	6,80
c. Perkotaan	5,92	4,96	4,68
d. Perdesaan	9,81	8,56	10,19

Sementara itu kondisi selama kurun waktu setahun terakhir memperlihatkan adanya penurunan jumlah setengah penganggur sekitar 870 ribu orang. Penurunan angka secara nasional ini ditandai dengan penurunan pada jumlah setengah penganggur menurut jenis kelamin baik perempuan maupun laki-laki masing-masing sebesar 740 ribu orang dan 130 ribu orang. Penurunan juga terjadi di wilayah perkotaan yaitu sebesar 1,24 juta orang, sedangkan di wilayah perdesaan mengalami kenaikan sekitar 370 ribu orang.

Persentase setengah penganggur terhadap total angkatan kerja pada Februari 2012 naik sebesar 0,83 persen poin dibandingkan dengan kondisi Agustus 2011. Tingkat setengah penganggur pada Agustus 2011 adalah 11,52 persen, sedangkan pada Februari 2012 mengalami kenaikan hingga mencapai 12,35 persen. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada Agustus



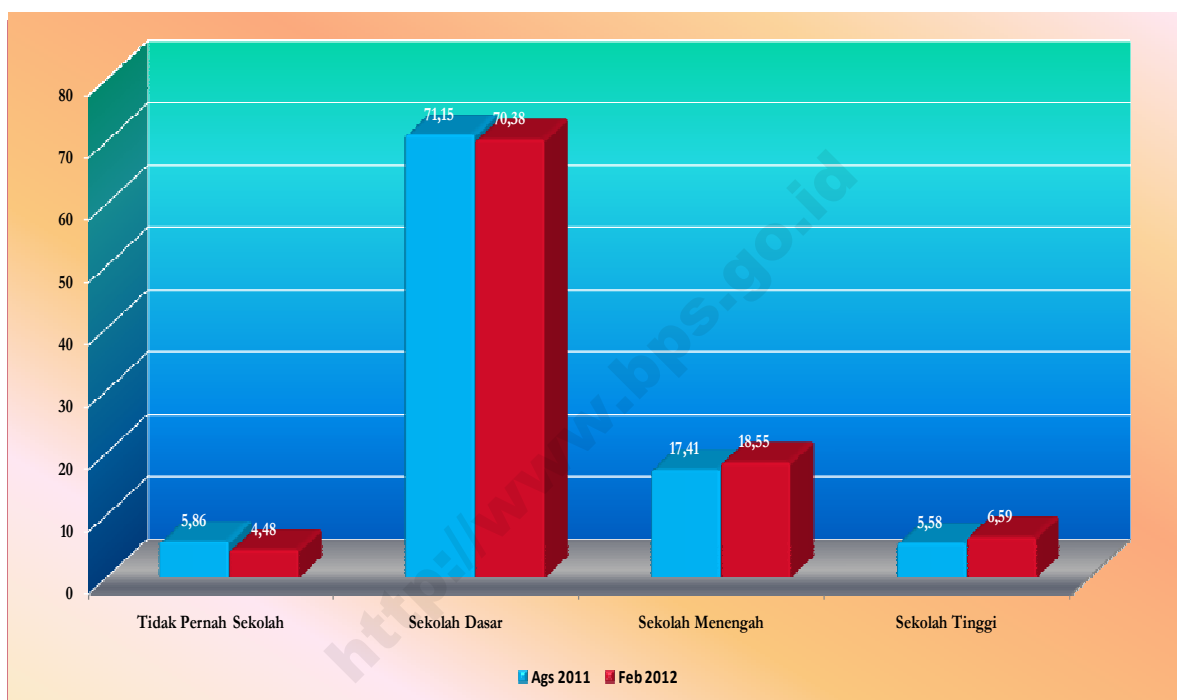
2011 dari 100 orang penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja terdapat 11 orang setengah penganggur, sedangkan pada Februari 2012 naik menjadi 12 orang setengah penganggur per 100 angkatan kerja.

Tabel 17. Indikator Setengah Penganggur, 2011-2012

Indikator	2011		2012
	Februari	Agustus	Februari
<b>Persentase setengah penganggur terhadap total angkatan kerja</b>	<b>13,18</b>	<b>11,52</b>	<b>12,35</b>
a. Laki	12,19	10,60	10,92
b. Perempuan	14,69	12,99	14,62
c. Perkotaan	10,22	8,64	7,96
d. Perdesaan	15,97	14,28	16,53
<b>Persentase setengah penganggur terhadap total penduduk bekerja</b>	<b>14,14</b>	<b>12,33</b>	<b>13,18</b>
a. Laki	13,03	11,27	11,61
b. Perempuan	15,86	14,07	15,70
c. Perkotaan	11,24	9,42	8,67
d. Perdesaan	16,75	15,03	17,33

Peningkatan proporsi setengah penganggur terhadap total penduduk bekerja juga terjadi pada periode Agustus 2011-Februari 2012. Pada Agustus 2011, dari 100 orang penduduk yang bekerja 12 orang diantaranya adalah setengah penganggur, sedangkan pada Februari 2012 terjadi kenaikan hingga mencapai 13 orang setengah penganggur per 100 penduduk bekerja. Dilihat berdasarkan jenis kelamin, kenaikan proporsi setengah penganggur perempuan terhadap total penduduk bekerja terlihat sedikit lebih tinggi daripada laki-laki. Berdasarkan klasifikasi wilayah, kenaikan juga terjadi di wilayah perdesaan yang mencapai 2,30 persen poin. Dalam hal ini dapat dikatakan pada Agustus 2011 dari 100 orang penduduk yang bekerja 15 orang diantaranya adalah setengah penganggur, sedangkan pada Februari 2012 terjadi kenaikan hingga mencapai 17 orang setengah penganggur per 100 penduduk bekerja. Demikian juga jika dilihat berdasarkan klasifikasi daerah perkotaan-perdesaan. Sementara itu penurunan proporsi setengah penganggur terhadap total penduduk bekerja terjadi di wilayah perkotaan sebesar 0,75 persen poin.

Menilik komposisi setengah penganggur berdasarkan tingkat pendidikan, penurunan persentase setengah penganggur terbesar terdapat pada kelompok penduduk yang belum pernah mengenyam bangku pendidikan sebesar 1,83 persen poin (Agustus 2011-Februari 2012). Apabila dirunut lagi berdasarkan jenis kelamin, penurunan yang relatif besar juga terjadi pada tingkat pendidikan yang sama untuk kelompok perempuan dengan penurunan sebesar 3,11 persen poin sementara laki-laki mengalami kenaikan sangat tipis sebesar 0,13 persen poin. Penurunan pada tingkat pendidikan ini juga terjadi baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan.



Grafik 14. Persentase Setengah Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan, Agustus 2011 dan Februari 2012

Tabel 18. Persentase Setengah Penganggur Menurut Pendidikan, 2011-2012

Indikator	2011		2012
	Februari	Agustus	Februari
<b>Tidak Pernah Sekolah</b>	<b>6,74</b>	<b>5,86</b>	<b>4,48</b>
a. Laki	4,83	3,79	3,66
b. Perempuan	9,17	8,56	5,45
c. Perkotaan	3,85	4,36	2,89
d. Perdesaan	8,48	6,72	5,21
<b>Sekolah Dasar</b>	<b>68,47</b>	<b>71,15</b>	<b>70,38</b>
a. Laki	69,56	72,83	72,69
b. Perempuan	67,09	68,96	67,65
c. Perkotaan	58,35	61,97	58,41
d. Perdesaan	74,59	76,47	75,89
<b>Sekolah Menengah</b>	<b>18,31</b>	<b>17,41</b>	<b>18,55</b>
a. Laki	20,18	19,03	19,27
b. Perempuan	15,94	15,29	17,70
c. Perkotaan	26,28	23,43	26,70
d. Perdesaan	13,51	13,93	14,80
<b>Sekolah Tinggi</b>	<b>6,47</b>	<b>5,58</b>	<b>6,59</b>
a. Laki	5,43	4,35	4,39
b. Perempuan	7,80	7,19	9,20
c. Perkotaan	11,53	10,24	11,99
d. Perdesaan	3,42	2,88	4,10

## 5.5. KILM 13. TINGKAT KETIDAKAKTIFAN

Tingkat ketidakaktifan adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja yang tidak terlibat aktif dalam pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan. Tingkat ketidakaktifan merupakan proporsi penduduk usia kerja yang tidak termasuk dalam angkatan kerja. Jika dijumlahkan, tingkat ketidakaktifan dan tingkat partisipasi angkatan kerja (lihat KILM 1), maka hasilnya adalah 100 persen.

Dalam beberapa situasi, tingkat ketidakaktifan yang tinggi untuk kelompok populasi tertentu tidak harus selalu dilihat sebagai sesuatu yang buruk, misalnya, tingkat ketidakaktifan yang relatif tinggi untuk wanita usia 25–34 tahun mungkin disebabkan karena mereka meninggalkan pasar kerja untuk mengurus keluarga dan melaksanakan tanggung jawab seperti melahirkan anak dan pengasuhan anak. Dengan menggunakan data dalam KILM 13, pengguna data dapat melihat sejauh mana ibu berkaitan dengan pola tenaga kerja perempuan.

Telah lama diakui bahwa aspek-aspek struktur rumah tangga terkait dengan aktivitas pasar tenaga kerja. Misalnya, perempuan kepala rumah tangga cenderung memiliki tingkat ketidakaktifan yang relatif rendah. Di antara pasangan yang menikah, suami biasanya memiliki tingkat ketidakaktifan yang rendah, terutama jika ada anak-anak dalam keluarga. Namun, rendahnya tingkat ketidakaktifan wanita biasanya diikuti dengan tingginya tingkat ketidakaktifan untuk laki-laki, yaitu suami, jika laki-laki sedang menyelesaikan pendidikan atau secara fisik tidak mampu bekerja, sehingga membuat istri pencari nafkah utama.

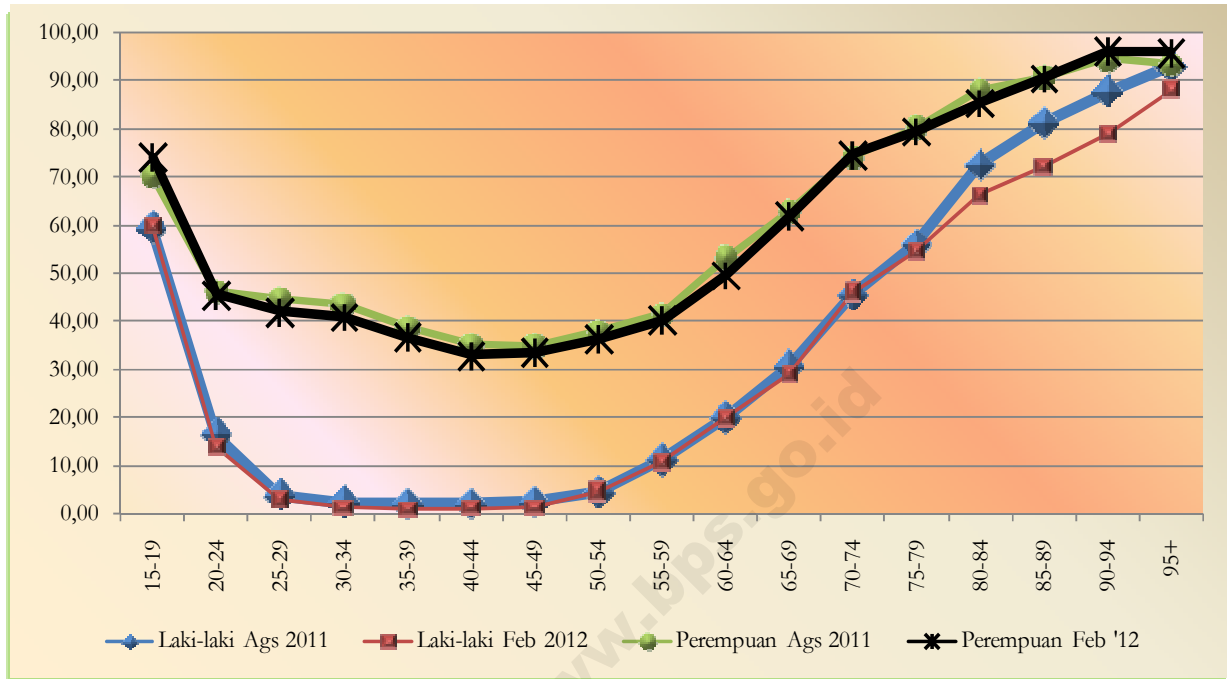
Fenomena meningkatnya tingkat ketidakaktifan pada periode Agustus 2011-Februari 2012 sebenarnya menggambarkan adanya perpindahan dari kelompok bukan angkatan kerja ke angkatan kerja. Secara absolut jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang tergolong ke dalam bukan angkatan kerja mengalami penurunan sekitar 2 juta orang dari 54,39 juta orang pada Agustus 2011 menjadi 52,45 juta orang pada Februari 2012. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, sumbangan peningkatan bukan angkatan kerja hampir sebanding antara laki-laki dan perempuan. Kenaikan BAK berdasarkan klasifikasi kota-desa, 57 persen merupakan pertambahan BAK di perdesaan (1,11 juta orang) dan sisanya (43 persen) merupakan pertambahan BAK di perkotaan (0,83 juta orang).

Sejalan dengan penurunan BAK baik menurut jenis kelamin maupun klasifikasi daerah, terjadi juga penurunan pada tingkat ketidakaktifan. Pada Februari 2012 tingkat ketidakaktifan adalah 30,34 persen yang turun sebesar 1,32 persen poin dibanding Agustus 2011 (31,66 persen). Penurunan 1,27 persen poin terjadi pada tingkat ketidakaktifan perempuan yaitu dari 48 per seratus penduduk pada Agustus 2011 menjadi 46 per seratus penduduk pada Februari 2012. Demikian juga dengan tingkat ketidakaktifan di daerah perkotaan maupun perdesaan yang mengalami penurunan masing-masing sebesar sebesar 1,17 persen poin dan 1,48 persen poin. Sedikit melihat ke belakang yaitu selama periode Februari 2011-Februari 2012 terjadi sedikit kenaikan ketidakaktifan yaitu sebesar 0,31persen poin dari 30,04 persen pada Februari 2011 menjadi 30,34 persen pada Februari 2012.

Tabel 19. Indikator Ketidakaktifan, 2011-2012

Indikator	2011		2012
	Februari	Agustus	Februari
<b>Tingkat ketidakaktifan</b>	<b>30,04</b>	<b>31,66</b>	<b>30,34</b>
a. Laki	15,14	15,70	14,33
b. Perempuan	44,87	47,56	46,29
c. Perkotaan	32,40	33,39	32,22
d. Perdesaan	27,65	29,93	28,45

Pada grafik di bawah ini, nampak pola tingkat ketidakaktifan yang membentuk huruf “J” mengindikasikan tingginya tingkat ketidakaktifan pada penduduk usia muda, lalu turun pada usia produktif dan kembali meningkat pada usia-usia tua.



Grafik 15. Pola Tingkat Ketidakaktifan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Agustus 2011 dan Februari 2012

## 6. INDIKATOR PENDIDIKAN DAN MELEK HURUF

### KILM 14. PENCAPAIAN PENDIDIKAN DAN MELEK HURUF

Informasi tentang tingkat pencapaian pendidikan saat ini adalah indikator terbaik yang tersedia untuk melihat tingkat keahlian tenaga kerja. Tingkat keahlian tenaga kerja merupakan faktor penentu kemampuan suatu negara untuk bersaing dengan sukses di pasar dunia dan membuat efisiensi penggunaan kemajuan teknologi yang cepat. KILM 14 menyajikan informasi mengenai tingkat pendidikan angkatan kerja sesuai dengan lima tingkat pendidikan yaitu kurang dari satu tahun, tingkat pra-dasar, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tersier. Kategori yang digunakan dalam indikator ini, secara konseptual berdasarkan tingkat Standar Internasional Klasifikasi Pendidikan (ISCED). Sayangnya, SAKERNAS tidak menyediakan data mengenai kemampuan baca tulis (melek huruf) pekerja, sehingga pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi tingkat literasi (melek huruf) hanyalah pendidikan saja.

Secara nasional, angka Sakernas Februari 2012 tidak menunjukkan perubahan komposisi angkatan kerja berdasarkan pendidikan yang signifikan jika dibanding Sakernas Februari dan Agustus tahun sebelumnya. Angkatan kerja masih didominasi oleh mereka yang hanya tamat sekolah dasar yaitu sebesar 61,31 persen. Angkatan kerja yang menyelesaikan sekolah menengah sebesar 24,58 persen, sementara untuk tamatan sekolah tinggi hanya sebesar 9,28 persen. Kondisi yang kurang baik ini ditunjukkan pula dengan masih adanya sekitar 4,83 persen angkatan kerja yang tidak pernah sekolah (Tabel 20).

Perbedaan kualitas angkatan kerja laki-laki dan perempuan dilihat dari tingkat pendidikannya cukup menarik. Pada Februari 2012 persentase angkatan kerja perempuan yang tidak pernah sekolah dua kali lipat lebih tinggi dari persentase angkatan kerja laki-laki yang tidak pernah sekolah. Sebaliknya persentase angkatan kerja laki-laki yang menamatkan sekolah tinggi lebih rendah (8,06 persen) dari persentase angkatan kerja wanita untuk kategori tingkat pendidikan yang sama (11,21 persen).

Grafik 16 menggambarkan angkatan kerja menurut tingkat pendidikan dan kelompok umur. Pada kelompok usia muda baik pada Agustus 2011 maupun Februari 2012, proporsi angkatan kerja lebih banyak tamatan sekolah dasar (sekitar 55 persen) dan sekolah menengah (sekitar 35 persen). Pada kelompok usia dewasa, angkatan kerja sangat didominasi oleh tamatan

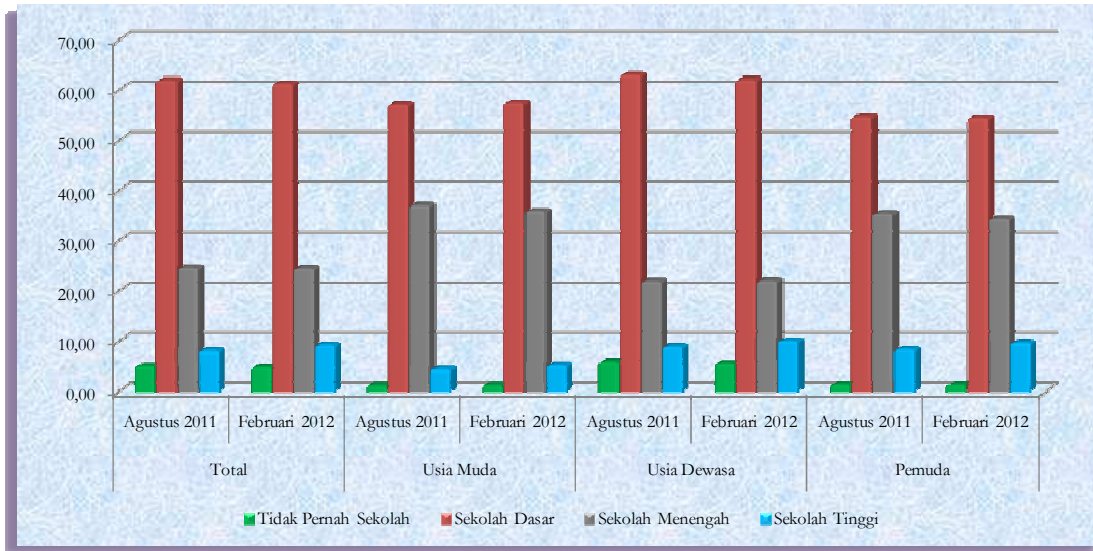
sekolah dasar (di atas 60 persen), sementara mereka yang tamat sekolah menengah hanya sekitar 20 persen, akan tetapi mereka yang tamat sekolah tinggi hampir mencapai 10 persen. Pada kelompok pemuda (15-30 tahun), angkatan kerja yang tamatan sekolah dasar hanya 50 persen lebih, mereka yang tamat sekolah menengah dan tinggi masing-masing sekitar 30 persen lebih dan hampir 10 persen.

Merujuk pada Grafik 17, baik pada Februari 2011 maupun Februari 2012, pada perempuan angkatan kerja lebih banyak bergerombol pada jenjang pendidikan rendah (dasar ke bawah) dan tinggi, sementara pada laki-laki justru lebih mengelompok pada jenjang pendidikan yang menengah dan pendidikan tinggi.

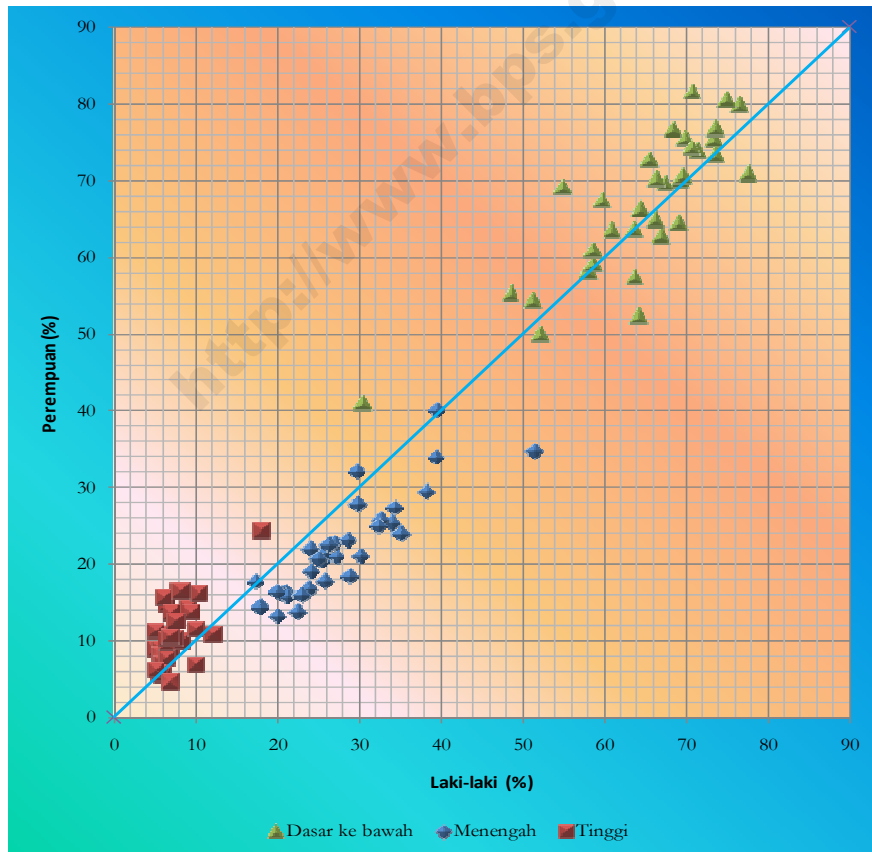
Tabel 20. Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan, 2011-2012

Indikator	2011		2012
	Februari	Agustus	Februari
<b>Tidak Pernah Sekolah</b>	<b>4,43</b>	<b>5,08</b>	<b>4,83</b>
a. Laki	3,19	3,70	3,36
b. Perempuan	6,33	7,29	7,16
c. Perkotaan	1,80	2,42	2,44
d. Perdesaan	6,92	7,63	7,11
<b>Sekolah Dasar</b>	<b>62,62</b>	<b>62,02</b>	<b>61,31</b>
a. Laki	62,32	62,57	61,95
b. Perempuan	63,08	61,15	60,30
c. Perkotaan	49,73	50,23	48,68
d. Perdesaan	74,77	73,32	73,37
<b>Sekolah Menengah</b>	<b>24,65</b>	<b>24,75</b>	<b>24,58</b>
a. Laki	27,26	26,88	26,63
b. Perempuan	20,64	21,34	21,33
c. Perkotaan	35,25	34,86	34,46
d. Perdesaan	14,65	15,07	15,16
<b>Sekolah Tinggi</b>	<b>8,30</b>	<b>8,15</b>	<b>9,28</b>
a. Laki	7,22	6,85	8,06
b. Perempuan	9,94	10,22	11,21
c. Perkotaan	13,22	12,49	14,42
d. Perdesaan	3,66	3,99	4,36





Grafik 16. Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Kelompok Umur, Agustus 2011 dan Februari 2012



Grafik 17. Perbandingan Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, Februari 2012



# Lampiran

#

<http://www.bps.go.id>



Lampiran 1. Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2011-2012  
(dalam ribu)

Provinsi	Februari 2011			Agustus 2011			Februari 2012		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
N A D	1 534,30	1 570,47	3 104,77	1 550,20	1 587,33	3 137,53	1 566,47	1 603,69	3 170,16
Sumatera Utara	4 292,22	4 430,85	8 723,07	4 309,88	4 449,44	8 759,32	4 328,22	4 468,70	8 796,92
Sumatera Barat	1 620,19	1 706,54	3 326,73	1 628,87	1 715,49	3 344,36	1 637,71	1 725,03	3 362,74
Riau	1 955,65	1 838,92	3 794,57	1 988,10	1 869,04	3 857,15	2 020,73	1 899,93	3 920,66
Jambi	1 115,04	1 069,89	2 184,93	1 127,54	1 081,96	2 209,50	1 140,61	1 094,41	2 235,03
Sumatera Selatan	2 665,50	2 593,03	5 258,52	2 686,17	2 613,79	5 299,96	2 708,15	2 634,43	5 342,58
Bengkulu	613,73	589,91	1 203,64	618,28	593,85	1 212,12	622,52	598,33	1 220,85
Lampung	2 784,55	2 623,97	5 408,51	2 798,66	2 636,97	5 435,63	2 812,44	2 650,14	5 462,59
Bangka-Belitung	459,93	421,47	881,40	466,41	427,48	893,89	473,23	433,60	906,83
Kepulauan Riau	629,28	598,54	1 227,83	644,22	612,48	1 256,70	658,81	626,68	1 285,49
DKI Jakarta	3 722,93	3 650,48	7 373,41	3 744,55	3 671,14	7 415,69	3 766,50	3 692,94	7 459,44
Jawa Barat	15 623,67	15 205,28	30 828,95	15 752,73	15 331,43	31 084,15	15 882,03	15 456,06	31 338,09
Jawa Tengah	11 725,78	12 163,14	23 888,92	11 734,31	12 171,02	23 905,33	11 741,26	12 178,62	23 919,88
D I Y	1 325,48	1 387,75	2 713,22	1 330,48	1 393,15	2 723,63	1 335,92	1 398,82	2 734,75
Jawa Timur	13 828,61	14 539,58	28 368,19	13 863,38	14 576,77	28 440,15	13 899,88	14 614,70	28 514,58
Banten	3 870,14	3 721,14	7 591,28	3 918,79	3 767,57	7 686,36	3 968,05	3 815,21	7 783,26
Bali	1 460,98	1 463,78	2 924,76	1 474,86	1 477,68	2 952,55	1 488,91	1 491,55	2 980,47
Nusa Tenggara Barat	1 474,87	1 645,06	3 119,94	1 481,84	1 653,12	3 134,96	1 488,50	1 660,62	3 149,12
Nusa Tenggara Timur	1 447,49	1 528,58	2 976,07	1 460,95	1 542,57	3 003,52	1 473,87	1 556,66	3 030,53
Kalimantan Barat	1 536,48	1 474,03	3 010,51	1 541,83	1 479,00	3 020,83	1 546,90	1 483,94	3 030,84
Kalimantan Tengah	810,82	734,44	1 545,25	816,50	740,15	1 556,65	823,33	745,99	1 569,32
Kalimantan Selatan	1 308,27	1 295,82	2 604,09	1 320,19	1 306,54	2 626,73	1 331,23	1 318,25	2 649,47
Kalimantan Timur	1 345,39	1 186,28	2 531,67	1 368,76	1 207,18	2 575,94	1 393,16	1 228,46	2 621,62
Sulawesi Utara	839,28	811,69	1 650,97	843,58	816,24	1 659,81	847,86	820,21	1 668,07
Sulawesi Tengah	911,55	870,35	1 781,90	918,91	877,89	1 796,80	927,04	885,18	1 812,22
Sulawesi Selatan	2 665,98	2 924,81	5 590,80	2 677,94	2 938,77	5 616,71	2 690,18	2 951,77	5 641,95
Sulawesi Tenggara	728,21	741,42	1 469,63	734,75	748,13	1 482,88	741,68	754,99	1 496,67
Gorontalo	356,51	361,09	717,60	360,19	365,06	725,24	363,71	368,31	732,02
Sulawesi Barat	373,18	381,14	754,32	377,57	385,75	763,32	382,26	390,44	772,70
Maluku	498,12	499,57	997,69	504,49	505,79	1 010,29	510,78	512,19	1 022,97
Maluku Utara	346,89	332,97	679,86	350,50	336,78	687,28	354,38	340,40	694,78
Papua Barat	274,84	238,91	513,75	279,32	242,89	522,21	284,16	247,33	531,49
Papua	1 009,78	899,63	1 909,40	1 036,08	922,82	1 958,89	1 062,03	945,85	2 007,88
<b>Indonesia</b>	<b>85 155,63</b>	<b>85 500,51</b>	<b>170 656,14</b>	<b>85 710,83</b>	<b>86 045,25</b>	<b>171 756,08</b>	<b>86 272,51</b>	<b>86 593,46</b>	<b>172 865,97</b>

Lampiran 2. Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Menurut Kelompok Umur, 2011-2012  
(dalam juta)

Kelompok Umur	2011		2012
	Februari	Agustus	Februari
<b>15 Tahun ke atas</b>	<b>170,66</b>	<b>171,76</b>	<b>172,87</b>
Laki-laki	85,16	85,71	86,27
Perempuan	85,50	86,05	86,59
Perkotaan	85,70	86,18	86,75
Perdesaan	84,95	85,57	86,12
<b>(15-24)</b>	<b>40,92</b>	<b>41,46</b>	<b>41,74</b>
Laki-laki	20,58	20,85	20,99
Perempuan	20,34	20,61	20,75
Perkotaan	21,45	20,72	20,86
Perdesaan	19,48	20,74	20,88
<b>(15-64)</b>	<b>158,83</b>	<b>159,61</b>	<b>161,01</b>
Laki-laki	79,83	80,27	81,03
Perempuan	79,00	79,34	79,97
Perkotaan	80,79	80,21	81,00
Perdesaan	78,04	79,40	80,01
<b>(25-54)</b>	<b>102,96</b>	<b>103,44</b>	<b>159,78</b>
Laki-laki	51,73	51,99	79,99
Perempuan	51,24	51,45	79,79
Perkotaan	52,52	52,16	52,51
Perdesaan	50,44	51,28	51,61
<b>(25-34)</b>	<b>41,63</b>	<b>41,85</b>	<b>42,13</b>
Laki-laki	20,81	20,94	21,08
Perempuan	20,82	20,91	21,05
Perkotaan	21,97	21,23	21,37
Perdesaan	19,67	20,62	20,76
<b>(35-54)</b>	<b>61,33</b>	<b>61,59</b>	<b>61,98</b>
Laki-laki	30,92	31,05	31,25
Perempuan	30,41	30,54	30,73
Perkotaan	30,55	30,94	31,14
Perdesaan	30,78	30,66	30,85
<b>(55-64)</b>	<b>14,94</b>	<b>14,72</b>	<b>15,15</b>
Laki-laki	7,52	7,44	7,71
Perempuan	7,42	7,28	7,44
Perkotaan	6,82	7,33	7,63
Perdesaan	8,12	7,39	7,52
<b>65 Tahun ke atas</b>	<b>11,83</b>	<b>12,14</b>	<b>11,86</b>
Laki-laki	5,33	5,44	5,24
Perempuan	6,50	6,71	6,62
Perkotaan	4,91	5,97	5,75
Perdesaan	6,92	6,17	6,11

Lampiran 3. Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang termasuk Angkatan Kerja  
Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2011-2012  
(dalam ribu)

Provinsi	Februari 2011			Agustus 2011			Februari 2012		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
N A D	1 255,11	813,85	2 068,95	1 251,53	749,73	2 001,26	1 284,43	803,26	2 087,69
Sumatera Utara	3 643,13	2 770,82	6 413,95	3 606,88	2 707,36	6 314,24	3 737,62	2 820,59	6 558,21
Sumatera Barat	1 350,59	925,41	2 276,00	1 361,07	852,44	2 213,51	1 385,02	966,17	2 351,19
Riau	1 649,67	944,45	2 594,11	1 701,18	859,23	2 560,40	1 756,55	866,95	2 623,50
Jambi	970,62	556,84	1 527,46	983,05	512,12	1 495,17	985,05	565,96	1 551,01
Sumatera Selatan	2 274,09	1 486,14	3 760,23	2 313,77	1 456,90	3 770,67	2 363,58	1 565,89	3 929,46
Bengkulu	526,33	367,39	893,73	534,05	360,89	894,93	536,94	376,87	913,81
Lampung	2 426,27	1 420,92	3 847,18	2 431,04	1 265,03	3 696,07	2 500,90	1 431,34	3 932,24
Bangka-Belitung	397,49	209,95	607,44	401,70	210,00	611,70	418,48	199,16	617,63
Kepulauan Riau	542,22	294,39	836,61	555,92	292,08	848,00	582,32	308,90	891,22
DKI Jakarta	3 095,46	1 914,37	5 009,83	3 166,34	1 977,49	5 143,83	3 213,45	2 069,78	5 283,23
Jawa Barat	13 165,82	6 989,67	20 155,49	12 998,30	6 358,32	19 356,62	13 565,84	6 572,82	20 138,66
Jawa Tengah	9 858,32	7 326,62	17 184,93	9 760,43	7 158,37	16 918,80	9 954,21	7 168,69	17 122,90
D I Y	1 060,39	896,15	1 956,54	1 042,46	830,45	1 872,91	1 072,01	855,16	1 927,17
Jawa Timur	11 882,72	8 368,95	20 251,67	11 742,92	8 018,96	19 761,89	11 902,89	7 928,80	19 831,69
Banten	3 282,05	1 882,63	5 164,68	3 370,35	1 839,88	5 210,22	3 476,76	1 921,89	5 398,64
Bali	1 252,66	1 042,92	2 295,57	1 241,90	1 015,36	2 257,26	1 257,18	1 050,37	2 307,55
Nusa Tenggara Barat	1 229,24	944,93	2 174,16	1 228,19	844,60	2 072,78	1 235,45	945,99	2 181,44
Nusa Tenggara Timur	1 222,76	1 012,13	2 234,89	1 209,50	944,76	2 154,26	1 243,87	1 022,14	2 266,01
Kalimantan Barat	1 329,24	927,63	2 256,87	1 330,37	902,82	2 233,20	1 340,81	917,22	2 258,03
Kalimantan Tengah	714,41	421,50	1 135,92	718,90	415,69	1 134,59	724,02	433,97	1 157,99
Kalimantan Selatan	1 135,60	704,93	1 840,53	1 161,00	764,68	1 925,68	1 160,68	726,76	1 887,43
Kalimantan Timur	1 162,79	550,10	1 712,90	1 230,87	533,83	1 764,70	1 238,96	593,22	1 832,18
Sulawesi Utara	708,31	360,11	1 068,42	708,26	375,94	1 084,20	715,38	399,29	1 114,67
Sulawesi Tengah	799,03	507,27	1 306,30	811,01	502,67	1 313,68	827,33	525,10	1 352,43
Sulawesi Selatan	2 245,59	1 388,77	3 634,36	2 272,45	1 339,97	3 612,42	2 258,45	1 383,98	3 642,43
Sulawesi Tenggara	637,93	426,44	1 064,37	644,54	414,46	1 059,00	647,36	446,78	1 094,14
Gorontalo	291,81	166,77	458,58	299,73	165,29	465,03	307,31	163,81	471,13
Sulawesi Barat	326,76	247,13	573,89	325,60	226,03	551,63	330,52	230,74	561,26
Maluku	407,25	285,42	692,67	416,35	285,55	701,89	413,98	271,16	685,13
Maluku Utara	292,35	185,18	477,52	291,91	171,69	463,60	295,30	175,92	471,22
Papua Barat	231,90	135,41	367,31	234,08	135,54	369,62	241,20	142,89	384,09
Papua	891,95	664,39	1 556,34	905,90	630,83	1 536,73	933,54	658,15	1 591,69
<b>Indonesia</b>	<b>72 259,82</b>	<b>47 139,55</b>	<b>119 399,38</b>	<b>72 251,52</b>	<b>45 118,96</b>	<b>117 370,49</b>	<b>73 907,36</b>	<b>46 509,69</b>	<b>120 417,05</b>

Lampiran 4. Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang termasuk Angkatan Kerja  
Menurut Kelompok Umur, 2011-2012  
(dalam juta)

Kelompok Umur	2011		2012
	Februari	Agustus	Februari
<b>15 Tahun ke atas</b>	<b>119,40</b>	<b>117,37</b>	<b>120,42</b>
Laki-laki	72,26	72,25	73,91
Perempuan	47,14	45,12	46,51
Perkotaan	57,94	57,41	58,80
Perdesaan	61,46	59,96	61,62
<b>(15-24)</b>	<b>20,58</b>	<b>20,89</b>	<b>21,37</b>
Laki-laki	12,31	12,44	13,08
Perempuan	8,27	8,46	8,30
Perkotaan	10,51	10,29	10,53
Perdesaan	10,07	10,60	10,85
<b>(15-64)</b>	<b>114,46</b>	<b>112,67</b>	<b>115,74</b>
Laki-laki	69,19	69,31	70,99
Perempuan	45,27	43,36	44,75
Perkotaan	56,26	55,37	56,94
Perdesaan	58,20	57,30	58,80
<b>(25-54)</b>	<b>83,21</b>	<b>81,54</b>	<b>83,65</b>
Laki-laki	50,43	50,54	51,33
Perempuan	32,78	31,00	32,32
Perkotaan	41,40	40,39	41,57
Perdesaan	41,80	41,15	42,08
<b>(25-34)</b>	<b>32,64</b>	<b>31,98</b>	<b>32,94</b>
Laki-laki	20,19	20,29	20,63
Perempuan	12,45	11,69	12,32
Perkotaan	17,11	16,26	16,79
Perdesaan	15,54	15,72	16,16
<b>(35-54)</b>	<b>50,56</b>	<b>49,56</b>	<b>50,70</b>
Laki-laki	30,24	30,25	30,70
Perempuan	20,33	19,31	20,00
Perkotaan	24,30	24,13	24,78
Perdesaan	26,27	25,42	25,92
<b>(55-64)</b>	<b>10,67</b>	<b>10,24</b>	<b>10,72</b>
Laki-laki	6,46	6,34	6,59
Perempuan	4,22	3,90	4,14
Perkotaan	4,35	4,69	4,85
Perdesaan	6,33	5,55	5,88
<b>65 Tahun ke atas</b>	<b>4,94</b>	<b>4,70</b>	<b>4,67</b>
Laki-laki	3,07	2,94	2,92
Perempuan	1,87	1,76	1,76
Perkotaan	1,68	2,04	1,86
Perdesaan	3,26	2,66	2,81



Lampiran 5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2011-2012 (Persen)

Provinsi	Februari 2011			Agustus 2011			Februari 2012		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
N A D	81,80	51,82	66,64	80,73	47,23	63,78	82,00	50,09	65,85
Sumatera Utara	84,88	62,53	73,53	83,69	60,85	72,09	86,35	63,12	74,55
Sumatera Barat	83,36	54,23	68,42	83,56	49,69	66,19	84,57	56,01	69,92
Riau	84,35	51,36	68,36	85,57	45,97	66,38	86,93	45,63	66,91
Jambi	87,05	52,05	69,91	87,19	47,33	67,67	86,36	51,71	69,40
Sumatera Selatan	85,32	57,31	71,51	86,14	55,74	71,15	87,28	59,44	73,55
Bengkulu	85,76	62,28	74,25	86,38	60,77	73,83	86,25	62,99	74,85
Lampung	87,13	54,15	71,13	86,86	47,97	68,00	88,92	54,01	71,98
Bangka-Belitung	86,42	49,81	68,92	86,12	49,13	68,43	88,43	45,93	68,11
Kepulauan Riau	86,16	49,18	68,14	86,29	47,69	67,48	88,39	49,29	69,33
DKI Jakarta	83,15	52,44	67,94	84,56	53,87	69,36	85,32	56,05	70,83
Jawa Barat	84,27	45,97	65,38	82,51	41,47	62,27	85,42	42,53	64,26
Jawa Tengah	84,07	60,24	71,94	83,18	58,81	70,77	84,78	58,86	71,58
D I Y	80,00	64,58	72,11	78,35	59,61	68,77	80,24	61,13	70,47
Jawa Timur	85,93	57,56	71,39	84,70	55,01	69,49	85,63	54,25	69,55
Banten	84,80	50,59	68,03	86,00	48,83	67,79	87,62	50,37	69,36
Bali	85,74	71,25	78,49	84,20	68,71	76,45	84,44	70,42	77,42
Nusa Tenggara Barat	83,35	57,44	69,69	82,88	51,09	66,12	83,00	56,97	69,27
Nusa Tenggara Timur	84,47	66,21	75,10	82,79	61,25	71,72	84,39	65,66	74,77
Kalimantan Barat	86,51	62,93	74,97	86,29	61,04	73,93	86,68	61,81	74,50
Kalimantan Tengah	88,11	57,39	73,51	88,05	56,16	72,89	87,94	58,17	73,79
Kalimantan Selatan	86,80	54,40	70,68	87,94	58,53	73,31	87,19	55,13	71,24
Kalimantan Timur	86,43	46,37	67,66	89,93	44,22	68,51	88,93	48,29	69,89
Sulawesi Utara	84,39	44,37	64,71	83,96	46,06	65,32	84,37	48,68	66,82
Sulawesi Tengah	87,66	58,28	73,31	88,26	57,26	73,11	89,24	59,32	74,63
Sulawesi Selatan	84,23	47,48	65,01	84,86	45,60	64,32	83,95	46,89	64,56
Sulawesi Tenggara	87,60	57,52	72,42	87,72	55,40	71,42	87,28	59,18	73,10
Gorontalo	81,85	46,18	63,90	83,22	45,28	64,12	84,49	44,48	64,36
Sulawesi Barat	87,56	64,84	76,08	86,24	58,60	72,27	86,46	59,10	72,64
Maluku	81,76	57,13	69,43	82,53	56,46	69,47	81,05	52,94	66,98
Maluku Utara	84,28	55,61	70,24	83,28	50,98	67,45	83,33	51,68	67,82
Papua Barat	84,38	56,68	71,50	83,80	55,80	70,78	84,88	57,77	72,27
Papua	88,33	73,85	81,51	87,44	68,36	78,45	87,90	69,58	79,27
<b>Indonesia</b>	<b>84,86</b>	<b>55,13</b>	<b>69,96</b>	<b>84,30</b>	<b>52,44</b>	<b>68,34</b>	<b>85,67</b>	<b>53,71</b>	<b>69,66</b>

Lampiran 6. Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2011-2012  
(dalam ribu)

Provinsi	Februari 2011			Agustus 2011			Februari 2012		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
N A D	1 164,56	733,34	1 897,90	1 166,46	686,02	1 852,47	1 191,06	732,22	1 923,29
Sumatera Utara	3 449,50	2 503,84	5 953,34	3 422,70	2 489,41	5 912,11	3 549,53	2 595,04	6 144,57
Sumatera Barat	1 266,71	846,79	2 113,51	1 277,40	793,32	2 070,73	1 304,21	900,00	2 204,22
Riau	1 563,64	844,57	2 408,20	1 632,31	791,87	2 424,18	1 685,44	802,42	2 487,86
Jambi	944,14	524,52	1 468,66	941,49	493,51	1 435,00	957,77	536,63	1 494,40
Sumatera Selatan	2 149,40	1 382,74	3 532,14	2 196,07	1 357,03	3 553,10	2 244,59	1 465,09	3 709,68
Bengkulu	509,70	353,58	863,28	522,57	351,15	873,72	525,54	368,67	894,21
Lampung	2 339,02	1 306,68	3 645,70	2 332,19	1 150,12	3 482,30	2 411,07	1 319,90	3 730,97
Bangka-Belitung	387,91	199,81	587,72	390,73	198,91	589,63	406,95	193,54	600,49
Kepulauan Riau	507,27	270,46	777,73	519,15	262,67	781,82	558,09	280,85	838,93
DKI Jakarta	2 796,11	1 671,01	4 467,12	2 867,96	1 720,46	4 588,42	2 913,19	1 803,53	4 716,72
Jawa Barat	11 834,58	6 338,46	18 173,04	11 739,48	5 715,30	17 454,78	12 264,41	5 905,24	18 169,65
Jawa Tengah	9 279,38	6 863,06	16 142,44	9 241,38	6 674,76	15 916,14	9 390,35	6 726,08	16 116,42
D I Y	995,28	854,15	1 849,43	1 002,05	796,54	1 798,60	1 017,19	831,18	1 848,37
Jawa Timur	11 375,33	8 030,69	19 406,03	11 346,94	7 593,40	18 940,34	11 397,06	7 615,16	19 012,23
Banten	2 882,18	1 585,42	4 467,60	2 968,67	1 560,99	4 529,66	3 080,74	1 738,23	4 818,97
Bali	1 219,26	1 010,71	2 229,97	1 217,18	987,69	2 204,87	1 224,39	1 034,57	2 258,95
Nusa Tenggara Barat	1 161,01	896,75	2 057,75	1 183,69	778,55	1 962,24	1 190,93	876,88	2 067,81
Nusa Tenggara Timur	1 192,25	982,98	2 175,23	1 179,75	916,51	2 096,26	1 220,50	991,37	2 211,87
Kalimantan Barat	1 264,43	879,92	2 144,34	1 289,56	857,01	2 146,57	1 300,41	881,86	2 182,27
Kalimantan Tengah	694,97	399,35	1 094,32	705,99	399,71	1 105,70	709,49	417,08	1 126,57
Kalimantan Selatan	1 075,62	661,41	1 737,03	1 110,61	714,32	1 824,93	1 111,80	694,14	1 805,94
Kalimantan Timur	1 043,18	494,91	1 538,09	1 111,20	479,80	1 591,00	1 127,35	534,69	1 662,04
Sulawesi Utara	665,62	304,57	970,19	669,91	320,81	990,72	674,45	347,50	1 021,95
Sulawesi Tengah	775,75	474,74	1 250,49	792,10	468,90	1 261,00	807,93	494,03	1 301,96
Sulawesi Selatan	2 121,78	1 269,55	3 391,33	2 155,59	1 219,91	3 375,50	2 142,35	1 264,84	3 407,18
Sulawesi Tenggara	618,25	399,88	1 018,13	629,47	397,08	1 026,55	629,72	430,52	1 060,24
Gorontalo	281,71	155,75	437,46	292,34	152,87	445,21	295,79	152,70	448,49
Sulawesi Barat	319,05	239,34	558,38	317,45	218,60	536,05	327,55	222,07	549,62
Maluku	383,56	255,62	639,18	393,83	256,28	650,11	391,66	244,76	636,42
Maluku Utara	282,16	168,53	450,69	280,91	156,96	437,87	286,36	159,85	446,21
Papua Barat	215,90	120,99	336,89	214,63	121,96	336,59	233,71	125,13	358,85
Papua	863,99	634,47	1 498,45	878,17	598,06	1 476,23	908,06	637,41	1 545,47
<b>Indonesia</b>	<b>67 623,21</b>	<b>43 658,54</b>	<b>111 281,74</b>	<b>67 989,94</b>	<b>41 680,46</b>	<b>109 670,40</b>	<b>69 479,64</b>	<b>43 323,16</b>	<b>112 802,81</b>

Lampiran 7. Rasio Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja Terhadap Total Penduduk (EPR) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2011-2012

Provinsi	Februari 2011			Agustus 2011			Februari 2012		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
N A D	75,90	46,70	61,13	75,25	43,22	59,04	76,03	45,66	60,67
Sumatera Utara	80,37	56,51	68,25	79,42	55,95	67,50	82,01	58,07	69,85
Sumatera Barat	78,18	49,62	63,53	78,42	46,24	61,92	79,64	52,17	65,55
Riau	79,95	45,93	63,46	82,10	42,37	62,85	83,41	42,23	63,46
Jambi	84,67	49,03	67,22	83,50	45,61	64,95	83,97	49,03	66,86
Sumatera Selatan	80,64	53,33	67,17	81,75	51,92	67,04	82,88	55,61	69,44
Bengkulu	83,05	59,94	71,72	84,52	59,13	72,08	84,42	61,62	73,25
Lampung	84,00	49,80	67,41	83,33	43,62	64,06	85,73	49,80	68,30
Bangka-Belitung	84,34	47,41	66,68	83,77	46,53	65,96	85,99	44,63	66,22
Kepulauan Riau	80,61	45,19	63,34	80,59	42,89	62,21	84,71	44,82	65,26
DKI Jakarta	75,11	45,78	60,58	76,59	46,86	61,87	77,34	48,84	63,23
Jawa Barat	75,75	41,69	58,95	74,52	37,28	56,15	77,22	38,21	57,98
Jawa Tengah	79,14	56,43	67,57	78,76	54,84	66,58	79,98	55,23	67,38
D I Y	75,09	61,55	68,16	75,32	57,18	66,04	76,14	59,42	67,59
Jawa Timur	82,26	55,23	68,41	81,85	52,09	66,60	81,99	52,11	66,68
Banten	74,47	42,61	58,85	75,75	41,43	58,93	77,64	45,56	61,91
Bali	83,46	69,05	76,24	82,53	66,84	74,68	82,23	69,36	75,79
Nusa Tenggara Barat	78,72	54,51	65,95	79,88	47,10	62,59	80,01	52,80	65,66
Nusa Tenggara Timur	82,37	64,31	73,09	80,75	59,41	69,79	82,81	63,69	72,99
Kalimantan Barat	82,29	59,69	71,23	83,64	57,95	71,06	84,07	59,43	72,00
Kalimantan Tengah	85,71	54,37	70,82	86,47	54,00	71,03	86,17	55,91	71,79
Kalimantan Selatan	82,22	51,04	66,70	84,13	54,67	69,48	83,52	52,66	68,16
Kalimantan Timur	77,54	41,72	60,75	81,18	39,75	61,76	80,92	43,53	63,40
Sulawesi Utara	79,31	37,52	58,76	79,41	39,30	59,69	79,55	42,37	61,27
Sulawesi Tengah	85,10	54,55	70,18	86,20	53,41	70,18	87,15	55,81	71,84
Sulawesi Selatan	79,59	43,41	60,66	80,49	41,51	60,10	79,64	42,85	60,39
Sulawesi Tenggara	84,90	53,94	69,28	85,67	53,08	69,23	84,90	57,02	70,84
Gorontalo	79,02	43,13	60,96	81,16	41,87	61,39	81,33	41,46	61,27
Sulawesi Barat	85,49	62,80	74,03	84,08	56,67	70,23	85,69	56,88	71,13
Maluku	77,00	51,17	64,07	78,07	50,67	64,35	76,68	47,79	62,21
Maluku Utara	81,34	50,61	66,29	80,14	46,61	63,71	80,81	46,96	64,22
Papua Barat	78,55	50,64	65,57	76,84	50,21	64,45	82,25	50,59	67,52
Papua	85,56	70,53	78,48	84,76	64,81	75,36	85,50	67,39	76,97
<b>Indonesia</b>	<b>79,41</b>	<b>51,06</b>	<b>65,21</b>	<b>79,32</b>	<b>48,44</b>	<b>63,85</b>	<b>80,54</b>	<b>50,03</b>	<b>65,25</b>

Lampiran 8. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, 2011-2012

Provinsi	Pekerja dengan Upah/gaji			Pengusaha			Berusaha Sendiri		
	Feb 2011	Ags 2011	Feb 2012	Feb 2011	Ags 2011	Feb 2012	Feb 2011	Ags 2011	Feb 2012
N A D	30,27	33,48	33,66	4,02	4,85	4,45	41,84	36,85	35,77
Sumatera Utara	29,30	35,09	30,67	3,61	3,41	3,34	36,54	35,23	35,79
Sumatera Barat	25,48	30,07	28,42	4,51	5,54	4,07	40,13	39,18	40,15
Riau	37,39	38,51	37,80	5,07	4,93	5,85	36,05	35,18	34,90
Jambi	27,62	36,11	37,12	4,81	4,38	4,42	39,57	34,38	33,60
Sumatera Selatan	26,13	30,15	28,99	3,06	3,16	2,78	41,88	37,74	39,19
Bengkulu	22,80	29,53	24,14	2,80	2,66	2,86	41,09	37,40	42,94
Lampung	21,03	26,05	22,89	3,38	3,33	3,20	40,18	39,10	39,45
Bangka-Belitung	42,47	46,23	43,37	6,65	6,61	7,83	31,59	31,92	33,51
Kepulauan Riau	62,82	67,50	62,86	3,67	4,83	2,86	25,66	21,65	24,33
DKI Jakarta	64,08	64,91	64,68	4,34	4,21	4,46	22,51	23,52	23,11
Jawa Barat	33,31	40,12	39,71	2,83	3,33	3,51	39,99	33,29	32,40
Jawa Tengah	25,96	28,19	28,97	2,90	2,97	3,33	40,00	37,31	37,17
D I Y	39,34	40,12	38,61	4,27	4,27	3,96	32,78	33,26	34,31
Jawa Timur	26,27	28,97	28,90	3,10	3,27	3,44	38,00	35,56	35,01
Banten	48,79	52,57	49,90	2,83	2,65	4,13	28,46	28,08	25,97
Bali	36,05	39,96	36,36	2,99	3,61	3,24	34,59	33,14	33,43
Nusa Tenggara Barat	20,37	21,87	21,63	2,39	2,94	1,79	44,72	41,84	43,10
Nusa Tenggara Timur	17,68	19,08	16,98	1,65	1,42	1,15	42,43	44,32	41,39
Kalimantan Barat	25,96	26,41	26,17	2,10	3,39	2,90	40,49	39,99	40,81
Kalimantan Tengah	34,67	37,27	36,65	2,64	2,79	3,03	37,96	35,93	35,67
Kalimantan Selatan	29,91	30,99	33,35	3,93	3,22	3,45	41,75	39,45	38,58
Kalimantan Timur	51,64	49,78	50,09	4,06	4,06	3,91	29,80	31,76	30,23
Sulawesi Utara	34,62	35,09	34,18	4,85	4,28	3,82	39,38	38,89	39,87
Sulawesi Tengah	24,49	24,51	26,29	4,25	4,50	3,90	44,16	40,91	39,31
Sulawesi Selatan	27,45	29,03	28,96	4,05	4,05	4,10	42,27	41,31	42,68
Sulawesi Tenggara	26,28	28,81	28,59	3,02	3,00	2,96	42,31	40,07	39,48
Gorontalo	27,61	30,74	31,85	2,46	3,87	3,57	41,54	41,71	40,31
Sulawesi Barat	25,79	22,20	22,32	2,40	2,09	2,73	40,35	42,69	43,91
Maluku	23,23	24,25	25,69	2,18	2,00	1,66	46,84	45,66	44,51
Maluku Utara	28,02	25,76	26,76	3,13	3,39	2,99	39,78	42,22	41,64
Papua Barat	31,86	36,25	35,01	3,19	1,96	2,59	39,94	37,74	37,16
Papua	17,81	19,09	18,12	1,53	1,07	1,53	41,69	43,53	43,65
<b>Indonesia</b>	<b>31,01</b>	<b>34,44</b>	<b>33,81</b>	<b>3,23</b>	<b>3,39</b>	<b>3,48</b>	<b>38,15</b>	<b>35,63</b>	<b>35,38</b>

Lampiran 8. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, 2011-2012  
(Lanjutan)

Provinsi	Pekerja Bebas			Pekerja Keluarga			Rasio Pekerja Rentan		
	Feb 2011	Ags 2011	Feb 2012	Feb 2011	Ags 2011	Feb 2012	Feb 2011	Ags 2011	Feb 2012
N A D	4,71	6,30	6,88	19,15	18,52	19,24	65,71	61,67	61,89
Sumatera Utara	5,79	8,27	6,13	24,77	18,00	24,06	67,09	61,49	65,98
Sumatera Barat	11,85	10,66	9,93	18,03	14,55	17,44	70,01	64,39	67,51
Riau	6,46	7,22	6,31	15,03	14,16	15,15	57,54	56,56	56,36
Jambi	6,67	8,80	6,75	21,33	16,34	18,12	67,57	59,51	58,47
Sumatera Selatan	5,44	5,97	3,79	23,48	22,98	25,25	70,80	66,69	68,23
Bengkulu	5,82	8,03	6,32	27,49	22,38	23,73	74,40	67,81	72,99
Lampung	9,47	10,24	10,95	25,93	21,28	23,51	75,59	70,62	73,91
Bangka-Belitung	4,93	6,00	2,53	14,36	9,23	12,77	50,88	47,16	48,81
Kepulauan Riau	2,00	2,78	1,93	5,85	3,24	8,02	33,52	27,67	34,28
DKI Jakarta	3,41	2,54	1,59	5,67	4,83	6,15	31,58	30,89	30,86
Jawa Barat	13,92	14,36	15,12	9,94	8,90	9,27	63,86	56,55	56,78
Jawa Tengah	14,35	13,64	14,44	16,79	17,89	16,10	71,14	68,84	67,70
D I Y	8,59	8,40	7,38	15,02	13,95	15,73	56,39	55,61	57,42
Jawa Timur	12,07	13,12	13,35	20,56	19,09	19,29	70,63	67,77	67,65
Banten	9,73	9,61	12,16	10,19	7,09	7,83	48,38	44,78	45,96
Bali	8,44	8,61	8,38	17,93	14,68	18,58	60,96	56,43	60,39
Nusa Tenggara Barat	11,94	16,12	13,22	20,58	17,23	20,25	77,24	75,18	76,58
Nusa Tenggara Timur	3,39	3,04	3,68	34,85	32,13	36,81	80,67	79,49	81,87
Kalimantan Barat	3,62	3,11	2,34	27,83	27,10	27,78	71,94	70,20	70,93
Kalimantan Tengah	2,23	3,05	2,43	22,50	20,96	22,21	62,69	59,94	60,31
Kalimantan Selatan	4,18	6,27	5,79	20,23	20,07	18,82	66,16	65,79	63,20
Kalimantan Timur	3,62	2,67	2,52	10,88	11,73	13,24	44,30	46,16	45,99
Sulawesi Utara	9,85	11,66	10,25	11,30	10,08	11,88	60,53	60,63	62,00
Sulawesi Tengah	4,36	7,52	8,29	22,73	22,56	22,21	71,26	70,99	69,82
Sulawesi Selatan	4,96	5,49	3,89	21,27	20,12	20,38	68,50	66,92	66,94
Sulawesi Tenggara	3,50	4,74	3,49	24,89	23,37	25,48	70,70	68,19	68,45
Gorontalo	13,68	10,53	12,08	14,72	13,15	12,19	69,93	65,40	64,58
Sulawesi Barat	3,54	6,86	4,84	27,93	26,16	26,21	71,81	75,71	74,96
Maluku	2,20	3,03	3,59	25,55	25,06	24,55	74,59	73,75	72,64
Maluku Utara	4,85	5,97	4,23	24,21	22,66	24,37	68,85	70,85	70,25
Papua Barat	1,92	2,13	1,78	23,09	21,92	23,47	64,95	61,79	62,41
Papua	1,07	1,26	0,91	37,89	35,04	35,80	80,66	79,83	80,35
<b>Indonesia</b>	<b>9,65</b>	<b>10,14</b>	<b>10,04</b>	<b>17,96</b>	<b>16,40</b>	<b>17,29</b>	<b>65,76</b>	<b>62,17</b>	<b>62,71</b>

Lampiran 9. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja  
Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2011-2012

Provinsi	1. Pertanian			2. Pertambangan			3. Industri		
	Feb 2011	Ags 2011	Feb 2012	Feb 2011	Ags 2011	Feb 2012	Feb 2011	Ags 2011	Feb 2012
N A D	47,60	48,49	50,24	0,72	0,63	0,33	6,55	3,91	4,36
Sumatera Utara	50,90	43,90	51,13	0,75	0,51	0,89	6,07	8,19	6,19
Sumatera Barat	44,14	39,30	42,35	2,43	1,44	1,86	7,60	7,39	7,19
Riau	43,65	44,80	44,80	1,16	1,55	1,11	6,14	6,01	5,99
Jambi	57,95	53,72	56,24	0,95	1,50	1,23	2,51	3,40	3,12
Sumatera Selatan	55,82	57,12	55,21	1,46	1,19	1,15	6,01	4,73	4,72
Bengkulu	62,27	52,24	58,53	1,10	1,09	0,64	3,53	2,90	3,88
Lampung	53,21	49,26	51,84	0,87	0,78	0,78	7,94	10,30	8,37
Bangka-Belitung	30,03	25,93	29,45	21,12	25,19	23,20	5,52	5,46	4,92
Kepulauan Riau	16,51	12,50	15,06	1,42	2,04	3,65	19,20	24,99	14,57
DKI Jakarta	1,97	0,66	2,21	0,31	0,33	0,42	14,08	15,06	13,62
Jawa Barat	22,02	21,06	19,96	0,84	0,75	0,89	19,23	20,46	20,58
Jawa Tengah	36,05	33,78	32,65	0,45	0,50	0,84	18,22	19,14	18,30
D I Y	24,31	23,97	24,24	0,99	0,69	0,21	14,17	14,83	15,65
Jawa Timur	42,34	39,70	40,41	0,65	0,70	0,63	13,01	14,07	13,63
Banten	18,39	13,91	15,20	0,79	1,39	1,22	18,08	25,18	21,15
Bali	28,84	25,24	28,94	0,57	0,57	0,75	13,06	13,16	12,91
Nusa Tenggara Barat	46,93	44,44	45,34	1,04	2,53	1,65	7,29	8,64	6,62
Nusa Tenggara Timur	67,30	64,89	68,16	1,26	1,13	1,29	5,12	5,95	4,31
Kalimantan Barat	63,00	60,30	63,59	1,84	3,66	3,29	3,17	4,17	3,17
Kalimantan Tengah	56,60	54,75	53,46	4,99	5,47	6,40	3,02	2,83	2,51
Kalimantan Selatan	41,66	41,45	38,20	2,93	4,07	5,67	9,72	6,42	10,38
Kalimantan Timur	29,41	28,55	28,95	9,03	10,22	9,06	5,19	5,31	4,72
Sulawesi Utara	34,93	32,41	33,98	4,15	2,50	3,55	7,14	6,66	7,20
Sulawesi Tengah	50,26	51,92	48,91	3,41	2,08	3,50	4,13	5,21	6,56
Sulawesi Selatan	46,95	43,53	43,12	0,88	0,86	1,30	6,35	6,61	6,97
Sulawesi Tenggara	45,34	45,51	44,98	3,18	3,72	3,03	6,49	5,04	5,79
Gorontalo	41,13	35,74	36,52	4,00	3,37	8,21	9,28	9,89	8,39
Sulawesi Barat	56,83	58,91	57,45	0,83	1,05	0,65	6,64	5,78	5,36
Maluku	50,43	49,45	52,25	0,54	0,91	1,61	9,05	6,97	4,74
Maluku Utara	50,97	55,12	55,04	2,94	1,74	2,70	3,82	2,46	3,50
Papua Barat	51,59	48,48	47,63	3,36	2,65	2,09	3,03	3,44	4,47
Papua	72,93	70,21	72,78	0,99	2,25	1,23	1,64	1,35	0,94
<b>Indonesia</b>	<b>38,17</b>	<b>35,86</b>	<b>36,53</b>	<b>1,22</b>	<b>1,34</b>	<b>1,44</b>	<b>12,31</b>	<b>13,26</b>	<b>12,60</b>

Lampiran 9. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja  
Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2011-2012  
(Lanjutan)

Provinsi	4. Listrik, Gas dan Air			5. Konstruksi			6. Perdagangan		
	Feb 2011	Ags 2011	Feb 2012	Feb 2011	Ags 2011	Feb 2012	Feb 2011	Ags 2011	Feb 2012
N A D	0,20	0,21	0,11	4,70	6,15	6,16	14,90	16,15	13,88
Sumatera Utara	0,15	0,19	0,12	3,16	5,63	3,95	17,62	20,45	17,54
Sumatera Barat	0,21	0,44	0,14	4,89	6,18	4,60	18,45	21,33	19,83
Riau	0,21	0,42	0,26	4,03	5,15	3,87	21,21	20,25	21,51
Jambi	0,18	0,32	0,33	2,29	4,40	3,33	17,84	16,11	15,77
Sumatera Selatan	0,15	0,17	0,11	3,77	3,51	4,48	15,78	15,72	15,16
Bengkulu	0,33	0,32	0,05	3,17	4,99	4,05	14,24	18,43	15,31
Lampung	0,10	0,10	0,21	3,61	4,68	2,86	18,35	17,40	18,89
Bangka-Belitung	0,33	0,24	0,10	4,50	4,55	3,86	22,00	18,98	21,31
Kepulauan Riau	0,25	0,58	0,63	7,48	7,64	5,13	24,25	24,80	29,56
DKI Jakarta	0,52	0,35	0,36	3,95	3,55	3,12	33,92	35,79	36,31
Jawa Barat	0,26	0,20	0,41	6,44	6,85	7,54	26,76	26,09	26,47
Jawa Tengah	0,18	0,18	0,25	5,99	6,89	6,65	20,92	21,38	22,02
D I Y	0,31	0,24	0,00	5,61	7,40	5,88	25,97	26,70	27,00
Jawa Timur	0,20	0,13	0,16	5,13	6,12	5,45	20,08	20,63	20,36
Banten	0,47	0,40	0,44	5,05	5,12	4,84	24,60	24,69	24,81
Bali	0,20	0,31	0,09	8,19	8,42	8,02	27,81	27,05	28,67
Nusa Tenggara Barat	0,31	0,13	0,20	4,99	4,55	4,86	19,87	18,87	21,17
Nusa Tenggara Timur	0,13	0,12	0,12	2,82	2,83	2,09	6,77	7,03	6,77
Kalimantan Barat	0,26	0,21	0,24	4,11	4,54	4,26	13,74	12,92	12,58
Kalimantan Tengah	0,27	0,34	0,32	3,59	4,71	4,70	13,57	14,27	13,31
Kalimantan Selatan	0,19	0,24	0,39	4,44	5,20	5,31	19,60	21,38	20,59
Kalimantan Timur	0,55	0,44	0,63	5,47	5,36	6,23	20,86	22,90	19,57
Sulawesi Utara	0,25	0,47	0,40	6,31	8,32	6,20	19,24	19,80	20,82
Sulawesi Tengah	0,16	0,14	0,13	4,49	4,56	4,55	13,17	15,10	14,66
Sulawesi Selatan	0,12	0,23	0,54	4,49	5,29	5,29	17,67	19,39	19,35
Sulawesi Tenggara	0,15	0,19	0,21	3,74	5,29	3,51	17,80	16,55	17,57
Gorontalo	0,27	0,04	0,34	3,67	6,43	5,37	14,63	14,79	13,62
Sulawesi Barat	0,37	0,23	0,48	4,14	3,87	3,46	11,57	13,47	11,87
Maluku	0,12	0,37	0,23	3,04	3,59	4,09	14,26	14,30	13,03
Maluku Utara	0,17	0,18	0,39	4,15	4,16	3,64	12,22	12,63	10,36
Papua Barat	0,34	0,07	0,19	3,90	4,82	5,46	12,37	16,73	15,77
Papua	0,16	0,20	0,10	1,99	2,46	2,22	7,89	8,86	8,77
<b>Indonesia</b>	<b>0,23</b>	<b>0,22</b>	<b>0,26</b>	<b>5,02</b>	<b>5,78</b>	<b>5,41</b>	<b>20,88</b>	<b>21,33</b>	<b>21,29</b>

Lampiran 9. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2011-2012  
(Lanjutan)

Provinsi	7. Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi			8. Lembaga Keuangan			9. Jasa Kemasyarakatan		
	Feb 2011	Ags 2011	Feb 2012	Feb 2011	Ags 2011	Feb 2012	Feb 2011	Ags 2011	Feb 2012
N A D	3,61	3,73	3,62	0,96	1,35	1,05	20,76	19,36	20,25
Sumatera Utara	5,40	4,18	4,48	1,29	2,00	1,28	14,65	14,96	14,40
Sumatera Barat	4,32	5,17	4,59	1,31	1,96	2,05	16,66	16,79	17,40
Riau	4,41	3,93	3,98	2,42	2,32	2,69	16,77	15,55	15,80
Jambi	3,74	4,01	2,97	1,14	1,59	1,85	13,39	14,96	15,17
Sumatera Selatan	3,73	3,65	3,98	1,12	1,72	1,26	12,16	12,20	13,92
Bengkulu	2,75	3,00	2,40	0,78	1,69	1,02	11,84	15,34	14,12
Lampung	3,81	3,72	3,16	0,70	1,16	1,08	11,41	12,60	12,81
Bangka-Belitung	2,15	2,24	1,49	1,41	1,90	2,53	12,95	15,51	13,13
Kepulauan Riau	9,12	6,21	6,89	2,64	3,42	2,81	19,12	17,81	21,69
DKI Jakarta	11,45	8,57	9,42	7,86	9,61	10,67	25,93	26,08	23,87
Jawa Barat	7,02	6,28	6,13	2,25	2,84	3,15	15,19	15,46	14,87
Jawa Tengah	3,78	3,54	3,80	1,24	1,66	1,90	13,17	12,92	13,59
D I Y	4,71	3,79	3,94	2,18	2,78	2,75	21,76	19,60	20,33
Jawa Timur	3,78	3,75	3,49	1,37	1,91	1,87	13,45	12,98	13,99
Banten	7,87	6,53	7,07	4,38	4,45	4,66	20,38	18,34	20,61
Bali	4,23	3,71	3,03	2,88	3,78	3,44	14,23	17,75	14,14
Nusa Tenggara Barat	5,21	4,36	4,37	0,85	1,51	1,22	13,51	14,97	14,57
Nusa Tenggara Timur	3,90	4,17	4,41	0,53	0,99	1,17	12,17	12,89	11,68
Kalimantan Barat	2,15	2,40	2,02	0,83	0,98	0,97	10,90	10,82	9,88
Kalimantan Tengah	2,80	2,66	3,08	0,78	1,30	1,18	14,38	13,68	15,03
Kalimantan Selatan	4,18	4,26	3,70	0,84	1,96	1,28	16,45	15,03	14,48
Kalimantan Timur	4,60	4,83	5,39	3,20	3,03	3,51	21,70	19,35	21,94
Sulawesi Utara	7,18	7,37	8,34	2,03	2,31	2,94	18,77	20,15	16,57
Sulawesi Tengah	4,82	3,51	3,34	0,89	1,25	0,79	18,67	16,21	17,56
Sulawesi Selatan	4,37	5,37	4,80	1,20	1,65	1,52	17,96	17,06	17,10
Sulawesi Tenggara	3,97	5,50	4,29	0,77	1,12	1,16	18,57	17,08	19,45
Gorontalo	5,83	7,77	5,34	1,27	1,44	1,76	19,91	20,53	20,46
Sulawesi Barat	4,18	2,74	3,79	0,95	0,84	1,02	14,50	13,11	15,91
Maluku	5,13	5,67	4,47	1,05	1,22	1,04	16,38	17,50	18,54
Maluku Utara	6,01	6,34	6,18	0,66	0,67	0,81	19,05	16,71	17,38
Papua Barat	5,73	5,05	5,81	1,12	1,30	1,12	18,56	17,45	17,46
Papua	2,82	3,54	3,16	0,87	1,12	0,94	10,71	10,02	9,87
<b>Indonesia</b>	<b>5,02</b>	<b>4,63</b>	<b>4,60</b>	<b>1,85</b>	<b>2,40</b>	<b>2,46</b>	<b>15,30</b>	<b>15,18</b>	<b>15,40</b>



Lampiran 10. Indikator Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang termasuk Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi, 2011-2012

Provinsi	Pekerja Paruh Waktu (dalam ribu)			Tingkat Pekerja Paruh Waktu (%)			Share Perempuan Pada Pekerja Paruh Waktu (%)		
	Feb '11	Ags '11	Feb '12	Feb '11	Ags '11	Feb '12	Feb '11	Ags '11	Feb '12
N A D	410,30	563,99	402,70	21,62	30,45	20,94	57,46	53,96	56,78
Sumatera Utara	1 251,14	1 203,04	1 264,37	21,02	20,35	20,58	61,54	57,11	60,42
Sumatera Barat	441,64	489,65	456,56	20,90	23,65	20,71	57,63	49,50	55,98
Riau	482,02	551,81	620,21	20,02	22,76	24,93	53,80	43,33	45,30
Jambi	357,01	484,57	389,84	24,31	33,77	26,09	47,22	47,08	46,59
Sumatera Selatan	836,27	948,36	802,72	23,68	26,69	21,64	52,28	48,23	53,48
Bengkulu	136,45	195,73	141,70	15,81	22,40	15,85	56,09	58,61	59,31
Lampung	658,85	893,71	817,35	18,07	25,66	21,91	56,33	45,98	50,79
Bangka-Belitung	85,19	125,02	101,95	14,50	21,20	16,98	61,28	51,06	53,10
Kepulauan Riau	76,09	76,42	108,09	9,78	9,78	12,88	56,86	53,99	54,87
DKI Jakarta	258,02	252,72	320,37	5,78	5,51	6,79	57,32	61,24	61,57
Jawa Barat	2 320,93	2 081,54	2 158,80	12,77	11,93	11,88	59,34	53,27	54,02
Jawa Tengah	2 198,32	2 967,75	2 836,88	13,62	18,65	17,60	63,91	58,44	60,74
D I Y	148,30	364,94	334,44	8,02	20,29	18,09	61,54	59,03	58,91
Jawa Timur	3 312,06	3 796,26	4 112,48	17,07	20,04	21,63	62,15	57,68	58,26
Banten	420,92	433,64	473,66	9,42	9,57	9,83	62,30	59,43	62,89
Bali	186,15	335,62	644,79	8,35	15,22	28,54	59,82	59,61	56,66
Nusa Tenggara Barat	342,24	426,10	364,48	16,63	21,72	17,63	66,57	53,36	60,43
Nusa Tenggara Timur	621,48	730,99	652,73	28,57	34,87	29,51	59,81	57,71	59,23
Kalimantan Barat	482,05	554,60	540,08	22,48	25,84	24,75	61,15	55,45	57,10
Kalimantan Tengah	213,33	257,82	182,35	19,49	23,32	16,19	58,20	55,69	64,14
Kalimantan Selatan	393,88	475,59	414,19	22,68	26,06	22,93	57,38	53,27	54,97
Kalimantan Timur	212,33	216,00	236,13	13,80	13,58	14,21	57,61	51,50	58,27
Sulawesi Utara	143,71	164,28	170,40	14,81	16,58	16,67	50,11	46,61	52,58
Sulawesi Tengah	277,40	321,65	292,33	22,18	25,51	22,45	58,69	49,68	56,92
Sulawesi Selatan	920,41	894,69	809,11	27,14	26,51	23,75	51,44	43,55	51,62
Sulawesi Tenggara	213,52	270,25	217,31	20,97	26,33	20,50	54,79	55,95	57,49
Gorontalo	102,12	92,17	93,46	23,34	20,70	20,84	59,29	51,71	47,42
Sulawesi Barat	176,91	214,80	177,24	31,68	40,07	32,25	60,27	50,56	52,67
Maluku	139,53	153,24	129,54	21,83	23,57	20,35	64,19	54,79	56,74
Maluku Utara	99,02	115,69	79,38	21,97	26,42	17,79	61,71	55,07	55,07
Papua Barat	85,32	72,59	62,70	25,33	21,57	17,47	55,93	56,84	54,67
Papua	454,91	338,79	273,22	30,36	22,95	17,68	57,48	53,50	55,95
<b>Indonesia</b>	<b>18 457,79</b>	<b>21 064,03</b>	<b>20 681,55</b>	<b>16,59</b>	<b>19,21</b>	<b>18,33</b>	<b>59,28</b>	<b>54,21</b>	<b>56,73</b>

Lampiran 11. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja, Agustus 2011 dan Februari 2012

Provinsi	0 jam*			1 - 14 jam			15 - 24 jam		
	Feb '11	Ags '11	Feb '12	Feb '11	Ags '11	Feb '12	Feb '11	Ags '11	Feb '12
N A D	1,63	4,11	8,65	6,68	8,98	7,86	15,18	20,90	15,92
Sumatera Utara	1,62	1,86	4,75	4,92	4,94	5,40	12,87	12,64	12,97
Sumatera Barat	2,40	4,07	7,40	6,88	7,88	8,25	13,09	13,94	13,62
Riau	2,02	1,37	7,46	8,01	7,66	9,12	14,52	13,77	14,35
Jambi	1,46	1,92	5,56	6,26	5,79	6,24	14,53	16,55	15,53
Sumatera Selatan	2,11	1,97	5,83	4,19	6,09	5,44	12,70	16,16	12,19
Bengkulu	1,35	2,95	5,22	3,38	5,34	5,29	8,85	11,67	11,33
Lampung	1,83	2,65	6,99	5,95	7,49	8,19	13,58	14,34	12,85
Bangka-Belitung	3,05	2,10	3,31	6,34	3,37	3,47	12,10	11,06	9,50
Kepulauan Riau	3,79	1,75	2,30	3,24	2,47	4,23	6,94	5,11	8,21
DKI Jakarta	1,86	0,93	2,29	2,25	2,36	2,25	4,23	3,69	4,09
Jawa Barat	1,92	2,53	3,90	4,20	4,06	3,66	9,11	8,91	8,38
Jawa Tengah	2,01	2,57	6,00	5,21	6,08	6,02	10,66	11,26	9,62
D I Y	2,64	2,35	6,46	6,02	6,64	7,92	7,28	8,47	7,10
Jawa Timur	1,60	1,46	6,92	6,95	6,95	7,01	12,57	12,57	13,11
Banten	1,72	1,95	3,22	3,82	3,43	3,80	7,82	7,47	7,67
Bali	1,28	0,96	4,49	4,39	4,60	8,61	7,80	8,50	13,50
Nusa Tenggara Barat	2,79	3,68	10,36	8,95	10,92	9,92	13,83	14,87	13,57
Nusa Tenggara Timur	2,59	2,29	8,88	7,13	9,37	8,08	16,72	18,15	17,02
Kalimantan Barat	1,95	1,84	5,92	6,28	6,02	6,01	19,21	16,98	15,10
Kalimantan Tengah	1,06	1,48	3,81	3,89	3,88	5,77	11,87	12,23	11,19
Kalimantan Selatan	2,89	5,00	7,17	6,41	7,09	5,35	14,09	14,34	15,52
Kalimantan Timur	2,23	2,28	3,19	4,16	3,34	4,38	7,31	7,97	8,60
Sulawesi Utara	2,80	2,38	5,39	4,18	5,56	5,88	10,20	11,01	11,65
Sulawesi Tengah	3,18	6,81	9,41	6,90	9,71	9,68	12,58	14,93	12,48
Sulawesi Selatan	3,65	5,26	11,58	8,43	11,68	10,48	14,29	15,09	13,52
Sulawesi Tenggara	3,93	6,03	10,27	8,77	10,61	9,69	12,35	14,71	14,96
Gorontalo	2,42	6,57	6,22	7,73	6,27	7,09	10,38	10,75	11,09
Sulawesi Barat	3,68	6,81	17,94	12,69	18,39	15,04	14,30	20,63	17,95
Maluku	2,42	2,81	7,47	3,94	7,31	5,06	11,74	15,68	12,45
Maluku Utara	3,22	3,23	8,02	8,34	8,17	7,33	15,13	14,60	13,72
Papua Barat	2,45	2,18	3,69	4,75	3,93	4,69	12,38	11,42	12,02
Papua	1,04	0,70	2,35	3,43	2,46	4,38	13,52	10,39	12,09
<b>Indonesia</b>	<b>2,01</b>	<b>2,40</b>	<b>5,88</b>	<b>5,54</b>	<b>6,05</b>	<b>6,08</b>	<b>11,35</b>	<b>11,75</b>	<b>11,23</b>

Lampiran 11. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja, Agustus 2011 dan Februari 2012 (Lanjutan)

Provinsi	25 - 34 jam			35 - 39 jam			40 -48 jam		
	Feb '11	Ags '11	Feb '12	Feb '11	Ags '11	Feb '12	Feb '11	Ags '11	Feb '12
N A D	19,00	19,47	20,03	12,11	11,75	13,73	23,69	18,22	22,09
Sumatera Utara	15,51	15,00	17,17	13,75	11,45	13,86	27,04	30,84	27,17
Sumatera Barat	15,87	14,64	13,58	9,99	11,36	11,20	22,64	22,06	24,93
Riau	14,11	16,26	16,78	9,27	9,97	8,58	25,37	26,10	24,26
Jambi	19,82	22,41	21,34	14,57	12,91	17,27	23,08	20,02	22,32
Sumatera Selatan	18,70	18,72	18,98	10,67	12,08	14,47	22,30	21,38	23,73
Bengkulu	13,10	15,50	13,00	12,83	13,45	13,04	27,36	23,91	29,83
Lampung	15,80	16,91	14,35	10,57	11,06	10,90	23,93	23,03	24,52
Bangka-Belitung	13,05	13,54	16,64	9,62	10,33	10,63	32,98	34,94	34,38
Kepulauan Riau	11,63	6,18	10,52	6,32	6,42	7,92	32,76	38,36	34,95
DKI Jakarta	7,05	4,91	5,52	6,17	6,00	4,62	41,31	45,46	48,98
Jawa Barat	10,48	10,95	11,05	9,60	8,67	8,48	31,63	34,32	35,38
Jawa Tengah	13,08	13,50	13,34	10,32	10,32	10,48	28,48	28,33	29,65
D I Y	10,60	12,28	11,53	9,18	10,83	10,18	30,00	31,10	32,09
Jawa Timur	14,84	14,16	15,16	10,24	9,76	9,35	24,16	27,48	25,56
Banten	9,09	8,60	8,66	6,54	7,17	6,88	38,97	41,34	43,64
Bali	9,95	10,48	18,84	8,83	8,87	8,78	22,70	28,90	23,79
Nusa Tenggara Barat	14,81	18,07	15,74	10,02	12,03	9,97	20,78	18,87	21,64
Nusa Tenggara Timur	21,92	20,23	21,34	12,88	14,07	13,37	25,71	22,59	24,86
Kalimantan Barat	16,00	16,75	19,59	11,11	11,15	11,58	24,20	24,49	25,21
Kalimantan Tengah	16,73	16,53	12,71	12,67	11,31	11,31	25,48	28,84	29,67
Kalimantan Selatan	18,75	16,90	17,55	11,50	10,65	11,84	23,80	24,42	25,63
Kalimantan Timur	11,92	11,53	10,63	11,52	10,68	12,78	27,06	26,18	26,95
Sulawesi Utara	11,74	12,79	13,24	11,82	10,82	11,38	31,54	34,14	31,15
Sulawesi Tengah	17,57	16,13	16,98	12,44	11,14	15,01	22,80	20,21	22,62
Sulawesi Selatan	16,44	14,36	15,19	12,52	10,21	12,11	20,17	20,11	21,27
Sulawesi Tenggara	17,66	14,38	15,30	10,44	9,54	13,49	19,75	18,28	21,85
Gorontalo	12,78	13,92	14,20	8,36	12,02	11,19	24,31	19,27	24,53
Sulawesi Barat	19,06	16,44	19,84	9,70	11,47	10,01	21,59	13,27	21,26
Maluku	18,00	17,74	16,67	14,11	11,58	16,20	26,95	21,16	24,35
Maluku Utara	16,22	18,90	17,98	11,21	13,58	16,73	24,63	21,07	26,09
Papua Barat	16,17	17,32	15,72	14,23	11,43	14,31	24,72	28,25	29,51
Papua	20,20	19,86	21,59	17,05	19,29	20,03	31,10	32,53	28,84
<b>Indonesia</b>	<b>13,84</b>	<b>13,74</b>	<b>14,21</b>	<b>10,41</b>	<b>10,14</b>	<b>10,45</b>	<b>27,55</b>	<b>28,85</b>	<b>29,40</b>

Lampiran 11. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja  
Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja, Agustus 2011 dan Februari 2012  
(Lanjutan)

Provinsi	49 - 59 jam			Lebih dari 60 jam		
	Feb '11	Ags '11	Feb '12	Feb '11	Ags '11	Feb '12
N A D	13,13	9,80	10,83	8,58	6,77	7,71
Sumatera Utara	10,83	11,74	10,46	13,48	11,52	11,64
Sumatera Barat	15,03	14,61	15,42	14,09	11,43	10,47
Riau	11,56	12,60	12,73	15,14	12,27	12,71
Jambi	11,53	12,47	9,61	8,75	7,93	6,51
Sumatera Selatan	16,53	13,85	14,60	12,80	9,75	9,04
Bengkulu	21,47	17,08	16,56	11,66	10,09	9,16
Lampung	18,16	15,83	18,52	10,18	8,68	8,47
Bangka-Belitung	13,11	12,94	15,93	9,76	11,72	7,79
Kepulauan Riau	17,44	18,97	17,03	17,89	20,74	15,93
DKI Jakarta	14,12	15,59	13,43	23,00	21,06	20,02
Jawa Barat	15,92	15,60	16,09	17,15	14,98	15,10
Jawa Tengah	17,19	17,08	18,05	13,05	10,87	10,66
D I Y	20,99	17,50	19,05	13,28	10,84	9,90
Jawa Timur	17,10	16,79	16,65	12,54	10,83	11,70
Banten	14,23	16,19	13,40	17,81	13,83	14,00
Bali	25,29	21,48	13,74	19,77	16,22	9,34
Nusa Tenggara Barat	14,90	12,52	16,71	13,93	9,03	10,03
Nusa Tenggara Timur	7,18	6,48	7,30	5,88	6,83	5,53
Kalimantan Barat	12,90	13,56	13,98	8,36	9,21	6,86
Kalimantan Tengah	16,99	15,46	14,21	11,32	10,26	13,64
Kalimantan Selatan	14,04	13,06	12,95	8,52	8,54	8,03
Kalimantan Timur	16,28	17,96	15,06	19,51	20,06	19,96
Sulawesi Utara	14,20	10,49	11,75	13,52	12,81	11,94
Sulawesi Tengah	13,54	11,43	11,38	10,99	9,64	8,88
Sulawesi Selatan	13,66	12,39	13,49	10,83	10,90	10,98
Sulawesi Tenggara	17,54	15,42	14,11	9,55	11,02	7,64
Gorontalo	17,39	17,74	13,99	16,64	13,46	12,52
Sulawesi Barat	12,48	8,18	8,00	6,48	4,80	3,81
Maluku	11,91	10,59	9,50	10,93	13,13	11,58
Maluku Utara	12,65	11,60	11,03	8,60	8,87	5,01
Papua Barat	10,21	12,73	10,52	15,08	12,75	10,33
Papua	7,01	7,49	6,56	6,64	7,28	5,80
<b>Indonesia</b>	<b>15,54</b>	<b>15,07</b>	<b>14,98</b>	<b>13,76</b>	<b>12,00</b>	<b>11,72</b>

Lampiran 12. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Sektor (Formal/Informal), Agustus 2011 dan Februari 2012

Provinsi	Formal			Informal		
	Feb '11	Ags '11	Feb '12	Feb '11	Ags '11	Feb '12
N A D	38,92	42,28	41,24	61,08	57,72	58,76
Sumatera Utara	39,08	44,67	39,31	60,92	55,33	60,69
Sumatera Barat	38,22	43,55	40,46	61,78	56,45	59,54
Riau	48,14	48,87	49,62	51,86	51,13	50,38
Jambi	38,56	44,28	45,65	61,44	55,72	54,35
Sumatera Selatan	34,77	37,87	35,97	65,23	62,13	64,03
Bengkulu	30,91	37,12	33,04	69,09	62,88	66,96
Lampung	31,28	36,82	32,74	68,72	63,18	67,26
Bangka-Belitung	54,14	57,19	57,64	45,86	42,81	42,36
Kepulauan Riau	69,81	76,10	68,67	30,19	23,90	31,33
DKI Jakarta	75,90	76,61	75,86	24,10	23,39	24,14
Jawa Barat	45,49	52,03	51,36	54,51	47,97	48,64
Jawa Tengah	37,79	40,98	40,46	62,21	59,02	59,54
D I Y	52,33	53,49	52,35	47,67	46,51	47,65
Jawa Timur	36,66	40,68	39,94	63,34	59,32	60,06
Banten	58,20	61,78	60,22	41,80	38,22	39,78
Bali	49,05	53,08	49,39	50,95	46,92	50,61
Nusa Tenggara Barat	29,61	32,07	30,20	70,39	67,93	69,80
Nusa Tenggara Timur	23,06	24,00	21,56	76,94	76,00	78,44
Kalimantan Barat	32,99	34,24	33,20	67,01	65,76	66,80
Kalimantan Tengah	41,93	44,41	44,31	58,07	55,59	55,69
Kalimantan Selatan	41,62	41,85	43,99	58,38	58,15	56,01
Kalimantan Timur	61,45	60,85	59,66	38,55	39,15	40,34
Sulawesi Utara	45,95	45,41	43,79	54,05	54,59	56,21
Sulawesi Tengah	34,63	35,88	36,13	65,37	64,12	63,87
Sulawesi Selatan	38,90	41,06	40,06	61,10	58,94	59,94
Sulawesi Tenggara	37,13	37,92	38,41	62,87	62,08	61,59
Gorontalo	36,50	42,81	40,86	63,50	57,19	59,14
Sulawesi Barat	35,18	30,64	32,16	64,82	69,36	67,84
Maluku	31,25	31,69	33,06	68,75	68,31	66,94
Maluku Utara	35,20	32,83	33,58	64,80	67,17	66,42
Papua Barat	38,68	42,19	42,35	61,32	57,81	57,65
Papua	21,82	22,15	21,96	78,18	77,85	78,04
<b>Indonesia</b>	<b>41,63</b>	<b>45,34</b>	<b>44,16</b>	<b>58,37</b>	<b>54,66</b>	<b>55,84</b>

Lampiran 13. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2011-2012  
(Persen)

Provinsi	Februari 2011			Agustus 2011			Februari 2012		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
N A D	7,21	9,89	8,27	6,80	8,50	7,43	7,27	8,84	7,88
Sumatera Utara	5,32	9,64	7,18	5,11	8,05	6,37	5,03	8,00	6,31
Sumatera Barat	6,21	8,50	7,14	6,15	6,94	6,45	5,83	6,85	6,25
Riau	5,21	10,58	7,17	4,05	7,84	5,32	4,05	7,44	5,17
Jambi	2,73	5,80	3,85	4,23	3,63	4,02	2,77	5,18	3,65
Sumatera Selatan	5,48	6,96	6,07	5,09	6,85	5,77	5,03	6,44	5,59
Bengkulu	3,16	3,76	3,41	2,15	2,70	2,37	2,12	2,17	2,14
Lampung	3,60	8,04	5,24	4,07	9,08	5,78	3,59	7,79	5,12
Bangka-Belitung	2,41	4,83	3,25	2,73	5,28	3,61	2,75	2,82	2,78
Kepulauan Riau	6,45	8,13	7,04	6,61	10,07	7,80	4,16	9,08	5,87
DKI Jakarta	9,67	12,71	10,83	9,42	13,00	10,80	9,34	12,86	10,72
Jawa Barat	10,11	9,32	9,84	9,68	10,11	9,83	9,59	10,16	9,78
Jawa Tengah	5,87	6,33	6,07	5,32	6,76	5,93	5,66	6,17	5,88
D I Y	6,14	4,69	5,47	3,88	4,08	3,97	5,11	2,80	4,09
Jawa Timur	4,27	4,04	4,18	3,37	5,31	4,16	4,25	3,96	4,13
Banten	12,18	15,79	13,50	11,92	15,16	13,06	11,39	9,56	10,74
Bali	2,67	3,09	2,86	1,99	2,73	2,32	2,61	1,50	2,11
Nusa Tenggara Barat	5,55	5,10	5,35	3,62	7,82	5,33	3,60	7,31	5,21
Nusa Tenggara Timur	2,50	2,88	2,67	2,46	2,99	2,69	1,88	3,01	2,39
Kalimantan Barat	4,88	5,14	4,99	3,07	5,07	3,88	3,01	3,85	3,36
Kalimantan Tengah	2,72	5,26	3,66	1,79	3,84	2,55	2,01	3,89	2,71
Kalimantan Selatan	5,28	6,17	5,62	4,34	6,59	5,23	4,21	4,49	4,32
Kalimantan Timur	10,29	10,03	10,21	9,72	10,12	9,84	9,01	9,87	9,29
Sulawesi Utara	6,03	15,42	9,19	5,41	14,67	8,62	5,72	12,97	8,32
Sulawesi Tengah	2,91	6,41	4,27	2,33	6,72	4,01	2,34	5,92	3,73
Sulawesi Selatan	5,51	8,58	6,69	5,14	8,96	6,56	5,14	8,61	6,46
Sulawesi Tenggara	3,08	6,23	4,34	2,34	4,19	3,06	2,73	3,64	3,10
Gorontalo	3,46	6,61	4,61	2,47	7,52	4,26	3,75	6,79	4,81
Sulawesi Barat	2,36	3,15	2,70	2,50	3,29	2,82	0,90	3,76	2,07
Maluku	5,82	10,44	7,72	5,41	10,25	7,38	5,39	9,74	7,11
Maluku Utara	3,48	8,99	5,62	3,77	8,58	5,55	3,03	9,13	5,31
Papua Barat	6,90	10,65	8,28	8,31	10,02	8,94	3,10	12,43	6,57
Papua	3,13	4,50	3,72	3,06	5,19	3,94	2,73	3,15	2,90
Indonesia	6,42	7,38	6,80	5,90	7,62	6,56	5,99	6,85	6,32

Lampiran 14. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2011-2012 (Persen)

Provinsi	Pendidikan Dasar Kebawah			Pendidikan Menengah			Pendidikan Tinggi		
	Feb '11	Ags '11	Feb '12	Feb '11	Ags '11	Feb '12	Feb '11	Ags '11	Feb '12
N A D	5,21	4,84	5,65	13,27	12,52	13,61	10,46	7,39	4,88
Sumatera Utara	4,14	4,11	3,73	11,75	10,02	11,32	13,59	8,74	7,04
Sumatera Barat	4,37	4,61	4,43	10,39	10,54	10,32	14,78	6,27	5,79
Riau	4,30	3,07	4,16	11,30	9,75	8,29	11,08	6,15	0,91
Jambi	2,32	3,24	1,67	6,04	6,12	8,19	10,81	4,49	6,20
Sumatera Selatan	3,84	3,26	3,65	11,60	13,05	10,44	10,07	7,16	7,12
Bengkulu	1,65	1,48	1,42	5,96	3,81	3,26	11,71	4,19	4,94
Lampung	2,77	3,84	2,97	11,70	11,88	11,96	14,16	5,32	6,09
Bangka-Belitung	2,17	2,37	1,71	4,66	7,10	5,50	8,38	2,25	2,67
Kepulauan Riau	6,94	4,84	7,70	7,42	11,05	5,12	5,85	6,81	1,34
DKI Jakarta	5,30	9,74	7,83	14,14	12,26	13,55	12,88	9,47	9,97
Jawa Barat	8,78	8,43	8,23	12,50	13,93	13,63	10,46	9,79	10,47
Jawa Tengah	4,13	4,38	5,16	12,30	10,86	8,35	10,60	9,95	6,95
D I Y	2,98	1,82	2,94	6,94	6,43	5,46	11,97	5,77	5,06
Jawa Timur	2,90	2,81	3,22	7,82	7,98	6,80	6,48	6,74	5,37
Banten	10,42	13,30	10,23	19,73	14,64	13,61	13,27	6,61	5,44
Bali	1,59	1,34	0,42	4,57	3,49	4,90	5,91	4,31	3,86
Nusa Tenggara Barat	4,43	4,71	4,94	8,20	7,26	6,24	5,87	6,14	4,86
Nusa Tenggara Timur	1,10	1,79	1,23	7,73	5,88	6,12	9,69	5,28	7,17
Kalimantan Barat	3,53	2,65	2,03	10,22	8,29	6,59	9,09	6,09	11,48
Kalimantan Tengah	2,67	1,83	2,01	4,20	4,49	5,28	10,93	3,83	2,61
Kalimantan Selatan	2,70	4,35	3,10	13,94	7,98	7,39	11,16	6,20	7,17
Kalimantan Timur	5,77	8,60	8,53	14,61	12,42	11,41	16,41	7,29	6,52
Sulawesi Utara	4,91	6,09	6,22	15,47	12,61	11,40	16,32	10,45	11,07
Sulawesi Tengah	2,90	2,87	2,26	8,42	7,27	7,62	3,89	5,03	4,90
Sulawesi Selatan	4,21	5,17	5,00	12,62	10,38	10,25	8,78	6,78	7,17
Sulawesi Tenggara	1,86	1,53	1,47	7,78	5,96	5,09	10,74	5,12	7,02
Gorontalo	1,92	3,43	4,35	16,25	6,51	7,45	4,32	6,77	3,39
Sulawesi Barat	1,67	1,51	1,11	5,11	8,80	7,11	6,64	1,89	0,00
Maluku	3,11	4,27	2,19	16,76	12,89	14,78	15,13	9,90	14,48
Maluku Utara	1,70	2,88	3,23	13,74	10,37	8,96	11,57	10,50	9,67
Papua Barat	5,41	4,33	3,02	11,55	14,01	11,68	17,01	19,53	12,20
Papua	2,02	1,95	1,49	8,62	10,33	7,94	9,84	7,68	5,55
<b>Indonesia</b>	<b>4,65</b>	<b>4,94</b>	<b>4,83</b>	<b>11,37</b>	<b>10,59</b>	<b>10,05</b>	<b>10,57</b>	<b>7,71</b>	<b>7,12</b>

Lampiran 15. Persentase Pengangguran Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2011-2012  
(Persen)

Provinsi	Pendidikan Dasar Kebawah			Pendidikan Menengah			Pendidikan Tinggi		
	Feb '11	Ags '11	Feb '12	Feb '11	Ags '11	Feb '12	Feb '11	Ags '11	Feb '12
N A D	36,59	37,83	42,02	49,11	49,98	50,36	14,30	12,19	7,62
Sumatera Utara	35,78	38,77	36,36	48,56	51,17	54,78	15,66	10,05	8,86
Sumatera Barat	37,43	44,12	42,81	42,25	45,95	46,82	20,32	9,93	10,37
Riau	35,24	35,54	47,31	50,14	54,63	51,04	14,62	9,83	1,65
Jambi	41,78	54,22	30,28	34,88	34,64	51,59	23,34	11,14	18,13
Sumatera Selatan	44,25	39,55	44,02	44,82	51,24	45,94	10,93	9,21	10,04
Bengkulu	33,19	39,76	45,44	43,08	42,94	35,18	23,73	17,30	19,38
Lampung	39,19	46,78	41,74	43,05	47,09	50,69	17,76	6,12	7,57
Bangka-Belitung	45,58	42,86	40,97	34,86	51,91	52,21	19,56	5,23	6,82
Kepulauan Riau	50,73	26,67	62,67	41,93	61,47	34,39	7,34	11,86	2,93
DKI Jakarta	16,85	35,31	25,24	58,80	49,62	52,72	24,35	15,07	22,03
Jawa Barat	60,45	59,16	55,95	31,87	33,39	35,21	7,68	7,45	8,84
Jawa Tengah	51,09	55,71	65,23	37,87	34,15	26,08	11,04	10,14	8,69
D I Y	28,07	23,65	37,49	46,80	56,57	44,29	25,13	19,79	18,21
Jawa Timur	50,10	49,07	55,56	39,02	41,01	34,44	10,88	9,91	10,01
Banten	45,86	61,04	57,81	43,41	34,09	37,13	10,72	4,87	5,06
Bali	34,17	33,84	12,13	48,02	45,98	69,85	17,80	20,18	18,02
Nusa Tenggara Barat	59,59	63,12	67,37	34,12	26,69	25,32	6,29	10,19	7,30
Nusa Tenggara Timur	32,29	50,95	40,07	47,27	35,05	36,96	20,44	14,00	22,97
Kalimantan Barat	54,68	52,09	46,44	35,26	40,19	34,22	10,05	7,72	19,34
Kalimantan Tengah	52,72	50,87	52,28	21,94	35,61	38,61	25,34	13,52	9,11
Kalimantan Selatan	34,59	60,10	50,97	50,26	31,24	34,75	15,15	8,66	14,28
Kalimantan Timur	29,58	47,12	47,28	50,71	45,38	43,52	19,71	7,50	9,21
Sulawesi Utara	32,17	40,96	44,14	51,40	47,65	44,35	16,43	11,39	11,52
Sulawesi Tengah	45,59	50,28	40,49	45,73	39,83	45,05	8,68	9,89	14,46
Sulawesi Selatan	41,12	52,13	50,32	43,97	37,02	36,08	14,91	10,85	13,60
Sulawesi Tenggara	27,23	31,63	29,20	45,16	50,24	41,65	27,61	18,13	29,15
Gorontalo	31,38	59,37	67,92	61,73	27,97	26,57	6,89	12,66	5,50
Sulawesi Barat	45,36	39,74	39,26	34,89	54,96	60,74	19,75	5,29	0,00
Maluku	26,27	34,99	18,68	57,24	51,40	58,56	16,49	13,61	22,76
Maluku Utara	19,88	33,54	39,66	60,52	47,65	41,88	19,60	18,81	18,46
Papua Barat	40,87	28,88	27,35	37,44	43,96	51,62	21,69	27,16	21,03
Papua	41,01	36,67	38,96	43,42	49,92	48,93	15,57	13,41	12,11
<b>Indonesia</b>	<b>45,88</b>	<b>50,49</b>	<b>50,50</b>	<b>41,22</b>	<b>39,93</b>	<b>39,06</b>	<b>12,90</b>	<b>9,57</b>	<b>10,44</b>



Lampiran 16. Persentase Setengah Penganggur Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2011-2012

Provinsi	Pendidikan Dasar Kebawah			Pendidikan Menengah			Pendidikan Tinggi		
	Feb '11	Ags '11	Feb '12	Feb '11	Ags '11	Feb '12	Feb '11	Ags '11	Feb '12
N A D	64,39	66,86	61,68	26,90	26,24	26,91	8,71	6,90	11,40
Sumatera Utara	60,67	63,86	66,09	29,18	29,63	26,86	10,15	6,51	7,05
Sumatera Barat	65,79	69,50	62,52	25,64	21,02	26,12	8,57	9,48	11,36
Riau	70,47	73,25	68,42	24,63	21,33	24,48	4,90	5,42	7,10
Jambi	75,32	71,24	70,86	18,80	20,55	20,29	5,88	8,21	8,84
Sumatera Selatan	72,28	75,44	66,30	23,02	18,95	25,45	4,70	5,61	8,25
Bengkulu	60,38	68,93	67,79	28,64	25,14	24,32	10,98	5,93	7,89
Lampung	77,29	73,66	80,34	16,93	19,67	15,03	5,78	6,67	4,63
Bangka-Belitung	79,16	71,47	71,54	15,02	21,86	22,34	5,82	6,68	6,12
Kepulauan Riau	52,51	68,06	69,61	34,59	24,82	20,85	12,90	7,13	9,54
DKI Jakarta	43,24	49,04	46,73	37,45	35,22	31,51	19,31	15,74	21,76
Jawa Barat	77,06	84,21	82,44	16,70	10,71	12,67	6,24	5,08	4,90
Jawa Tengah	82,71	82,78	80,18	13,21	13,00	14,06	4,08	4,22	5,76
D I Y	56,34	58,10	50,44	28,36	33,87	39,84	15,31	8,02	9,71
Jawa Timur	81,30	81,89	79,82	14,24	13,64	15,26	4,47	4,47	4,93
Banten	81,57	76,76	85,01	12,22	15,63	11,56	6,21	7,61	3,42
Bali	78,24	69,79	62,89	15,00	21,76	29,47	6,75	8,44	7,64
Nusa Tenggara Barat	74,81	75,30	71,92	19,13	17,63	20,25	6,05	7,07	7,83
Nusa Tenggara Timur	80,53	78,49	78,96	14,94	19,01	15,60	4,52	2,50	5,44
Kalimantan Barat	79,40	78,31	80,77	15,72	17,91	16,08	4,88	3,77	3,14
Kalimantan Tengah	72,96	75,71	69,88	19,36	20,68	18,38	7,68	3,62	11,74
Kalimantan Selatan	79,03	77,52	75,97	16,30	18,19	17,07	4,67	4,29	6,96
Kalimantan Timur	59,17	63,28	66,36	28,39	27,61	21,90	12,44	9,11	11,74
Sulawesi Utara	68,14	69,26	64,85	25,26	26,63	31,68	6,60	4,11	3,47
Sulawesi Tengah	68,93	77,44	68,73	19,47	18,27	24,46	11,60	4,29	6,81
Sulawesi Selatan	68,92	73,77	68,71	22,22	19,15	19,82	8,86	7,08	11,48
Sulawesi Tenggara	61,55	68,49	65,66	25,51	27,31	24,92	12,94	4,20	9,41
Gorontalo	78,66	76,90	82,18	7,51	19,91	14,85	13,83	3,19	2,96
Sulawesi Barat	67,25	77,90	77,19	24,53	18,22	17,17	8,22	3,88	5,64
Maluku	68,97	62,44	65,28	25,86	28,95	29,12	5,17	8,61	5,60
Maluku Utara	73,98	74,83	75,34	19,78	21,48	20,92	6,25	3,69	3,74
Papua Barat	56,54	72,27	76,01	32,01	21,96	18,11	11,45	5,77	5,88
Papua	63,25	79,73	85,13	25,31	16,84	12,77	11,44	3,43	2,10
<b>Indonesia</b>	<b>75,21</b>	<b>77,01</b>	<b>74,86</b>	<b>18,31</b>	<b>17,41</b>	<b>18,55</b>	<b>6,47</b>	<b>5,58</b>	<b>6,59</b>

Lampiran 17. Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang termasuk Bukan Angkatan Kerja  
Menurut Provinsi, 2011-2012  
(dalam ribuan)

Provinsi	2011		2012
	Februari	Agustus	Februari
N A D	1 035,82	1 136,27	1 082,47
Sumatera Utara	2 309,12	2 445,08	2 238,72
Sumatera Barat	1 050,73	1 130,84	1 011,54
Riau	1 200,46	1 296,74	1 297,17
Jambi	657,47	714,34	684,02
Sumatera Selatan	1 498,30	1 529,28	1 413,12
Bengkulu	309,91	317,19	307,04
Lampung	1 561,33	1 739,56	1 530,35
Bangka-Belitung	273,96	282,20	289,20
Kepulauan Riau	391,22	408,70	394,28
DKI Jakarta	2 363,58	2 271,86	2 176,21
Jawa Barat	10 673,46	11 727,53	11 199,44
Jawa Tengah	6 703,99	6 986,53	6 796,99
D I Y	756,68	850,72	807,58
Jawa Timur	8 116,52	8 678,27	8 682,90
Banten	2 426,60	2 476,14	2 384,62
Bali	629,19	695,29	672,92
Nusa Tenggara Barat	945,77	1 062,18	967,68
Nusa Tenggara Timur	741,18	849,26	764,52
Kalimantan Barat	753,65	787,64	772,81
Kalimantan Tengah	409,34	422,06	411,33
Kalimantan Selatan	763,57	701,05	762,04
Kalimantan Timur	818,77	811,24	789,44
Sulawesi Utara	582,56	575,61	553,40
Sulawesi Tengah	475,60	483,12	459,79
Sulawesi Selatan	1 956,44	2 004,29	1 999,53
Sulawesi Tenggara	405,26	423,88	402,53
Gorontalo	259,02	260,22	260,89
Sulawesi Barat	180,43	211,69	211,45
Maluku	305,02	308,39	337,83
Maluku Utara	202,34	223,68	223,56
Papua Barat	146,44	152,59	147,40
Papua	353,07	422,16	416,19
<b>Indonesia</b>	<b>51 256,76</b>	<b>54 385,59</b>	<b>52 448,92</b>

Lampiran 18. Tingkat Ketidaktifan Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2011-2012  
(Persen)

Provinsi	Februari 2011			Agustus 2011			Februari 2012		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
N A D	18,20	48,18	33,36	19,27	52,77	36,22	18,00	49,91	34,15
Sumatera Utara	15,12	37,47	26,47	16,31	39,15	27,91	13,65	36,88	25,45
Sumatera Barat	16,64	45,77	31,58	16,44	50,31	33,81	15,43	43,99	30,08
Riau	15,65	48,64	31,64	14,43	54,03	33,62	13,07	54,37	33,09
Jambi	12,95	47,95	30,09	12,81	52,67	32,33	13,64	48,29	30,60
Sumatera Selatan	14,68	42,69	28,49	13,86	44,26	28,85	12,72	40,56	26,45
Bengkulu	14,24	37,72	25,75	13,62	39,23	26,17	13,75	37,01	25,15
Lampung	12,87	45,85	28,87	13,14	52,03	32,00	11,08	45,99	28,02
Bangka-Belitung	13,58	50,19	31,08	13,88	50,87	31,57	11,57	54,07	31,89
Kepulauan Riau	13,84	50,82	31,86	13,71	52,31	32,52	11,61	50,71	30,67
DKI Jakarta	16,85	47,56	32,06	15,44	46,13	30,64	14,68	43,95	29,17
Jawa Barat	15,73	54,03	34,62	17,49	58,53	37,73	14,58	57,47	35,74
Jawa Tengah	15,93	39,76	28,06	16,82	41,19	29,23	15,22	41,14	28,42
D I Y	20,00	35,42	27,89	21,65	40,39	31,23	19,76	38,87	29,53
Jawa Timur	14,07	42,44	28,61	15,30	44,99	30,51	14,37	45,75	30,45
Banten	15,20	49,41	31,97	14,00	51,17	32,21	12,38	49,63	30,64
Bali	14,26	28,75	21,51	15,80	31,29	23,55	15,56	29,58	22,58
Nusa Tenggara Barat	16,65	42,56	30,31	17,12	48,91	33,88	17,00	43,03	30,73
Nusa Tenggara Timur	15,53	33,79	24,90	17,21	38,75	28,28	15,61	34,34	25,23
Kalimantan Barat	13,49	37,07	25,03	13,71	38,96	26,07	13,32	38,19	25,50
Kalimantan Tengah	11,89	42,61	26,49	11,95	43,84	27,11	12,06	41,83	26,21
Kalimantan Selatan	13,20	45,60	29,32	12,06	41,47	26,69	12,81	44,87	28,76
Kalimantan Timur	13,57	53,63	32,34	10,07	55,78	31,49	11,07	51,71	30,11
Sulawesi Utara	15,61	55,63	35,29	16,04	53,94	34,68	15,63	51,32	33,18
Sulawesi Tengah	12,34	41,72	26,69	11,74	42,74	26,89	10,76	40,68	25,37
Sulawesi Selatan	15,77	52,52	34,99	15,14	54,40	35,68	16,05	53,11	35,44
Sulawesi Tenggara	12,40	42,48	27,58	12,28	44,60	28,58	12,72	40,82	26,90
Gorontalo	18,15	53,82	36,10	16,78	54,72	35,88	15,51	55,52	35,64
Sulawesi Barat	12,44	35,16	23,92	13,76	41,40	27,73	13,54	40,90	27,36
Maluku	18,24	42,87	30,57	17,47	43,54	30,53	18,95	47,06	33,02
Maluku Utara	15,72	44,39	29,76	16,72	49,02	32,55	16,67	48,32	32,18
Papua Barat	15,62	43,32	28,50	16,20	44,20	29,22	15,12	42,23	27,73
Papua	11,67	26,15	18,49	12,56	31,64	21,55	12,10	30,42	20,73
<b>Indonesia</b>	<b>15,14</b>	<b>44,87</b>	<b>30,04</b>	<b>15,70</b>	<b>47,56</b>	<b>31,66</b>	<b>14,33</b>	<b>46,29</b>	<b>30,34</b>

Lampiran 19. Persentase Angkatan Kerja Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2011-2012 (Persen)

Provinsi	Pendidikan Dasar Kebawah			Pendidikan Menengah			Pendidikan Tinggi		
	Feb '11	Ags '11	Feb '12	Feb '11	Ags '11	Feb '12	Feb '11	Ags '11	Feb '12
N A D	58,10	58,05	58,58	30,59	29,68	29,13	11,31	12,27	12,29
Sumatera Utara	62,05	60,15	61,55	29,68	32,52	30,52	8,27	7,33	7,93
Sumatera Barat	61,16	61,67	60,45	29,02	28,11	28,35	9,81	10,21	11,20
Riau	58,76	61,69	58,78	31,79	29,81	31,83	9,45	8,50	9,39
Jambi	69,46	67,25	66,34	22,23	22,76	22,99	8,31	9,98	10,67
Sumatera Selatan	69,99	69,92	67,51	23,43	22,65	24,61	6,58	7,42	7,88
Bengkulu	68,47	63,50	68,44	24,62	26,71	23,16	6,91	9,80	8,40
Lampung	74,16	70,41	71,96	19,27	22,93	21,69	6,57	6,65	6,36
Bangka-Belitung	68,13	65,27	66,57	24,29	26,37	26,32	7,57	8,36	7,10
Kepulauan Riau	51,42	42,99	47,73	39,76	43,42	39,45	8,82	13,59	12,83
DKI Jakarta	34,48	39,13	34,58	45,04	43,70	41,73	20,48	17,17	23,69
Jawa Barat	67,70	68,97	66,49	25,08	23,56	25,25	7,22	7,47	8,26
Jawa Tengah	75,01	75,32	74,29	18,68	18,64	18,35	6,31	6,04	7,35
D I Y	51,61	51,52	52,13	36,89	34,88	33,15	11,50	13,60	14,72
Jawa Timur	72,14	72,53	71,38	20,84	21,35	20,91	7,02	6,11	7,71
Banten	59,39	59,95	60,70	29,70	30,42	29,30	10,91	9,63	9,99
Bali	61,35	58,54	60,15	30,05	30,59	30,02	8,61	10,87	9,84
Nusa Tenggara Barat	71,97	71,55	71,03	22,28	19,60	21,15	5,74	8,85	7,82
Nusa Tenggara Timur	78,04	76,81	77,93	16,33	16,05	14,42	5,63	7,14	7,66
Kalimantan Barat	77,27	76,28	76,94	17,21	18,80	17,41	5,52	4,92	5,65
Kalimantan Tengah	72,37	70,83	70,70	19,14	20,19	19,82	8,49	8,98	9,48
Kalimantan Selatan	72,10	72,21	71,08	20,27	20,48	20,31	7,63	7,31	8,60
Kalimantan Timur	52,32	53,91	51,47	35,42	35,96	35,41	12,26	10,12	13,12
Sulawesi Utara	60,20	58,01	58,98	30,54	32,59	32,37	9,26	9,40	8,65
Sulawesi Tengah	67,26	70,14	66,94	23,20	21,97	22,05	9,53	7,89	11,02
Sulawesi Selatan	65,34	66,10	65,02	23,31	23,40	22,73	11,36	10,50	12,25
Sulawesi Tenggara	63,61	63,32	61,76	25,22	25,82	25,38	11,17	10,86	12,86
Gorontalo	75,16	73,72	75,06	17,50	18,30	17,14	7,35	7,97	7,80
Sulawesi Barat	73,51	74,43	73,55	18,45	17,65	17,72	8,04	7,92	8,73
Maluku	65,21	60,44	60,65	26,37	29,42	28,17	8,42	10,15	11,18
Maluku Utara	65,72	64,54	65,07	24,76	25,51	24,80	9,52	9,95	10,14
Papua Barat	62,59	59,53	59,62	26,85	28,04	29,05	10,56	12,43	11,33
Papua	75,39	74,09	75,78	18,72	19,03	17,89	5,89	6,88	6,33
<b>Indonesia</b>	<b>67,06</b>	<b>67,10</b>	<b>66,14</b>	<b>24,65</b>	<b>24,75</b>	<b>24,58</b>	<b>8,30</b>	<b>8,15</b>	<b>9,28</b>

Lampiran 20. Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin, Agustus 2011 dan Februari 2012  
(Rupiah)

Lapangan Usaha	Agustus 2011			Februari 2012		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
1	1 100 895	755 865	1 027 386	1 159 007	814 646	1 087 425
2	2 873 704	2 011 852	2 822 807	3 059 372	5 259 020	3 197 048
3	1 382 772	965 441	1 224 957	1 467 250	992 353	1 300 663
4	2 192 413	1 839 248	2 139 990	2 089 835	1 701 523	2 036 025
5	1 442 480	1 436 214	1 442 207	1 505 135	2 181 707	1 526 011
6	1 352 555	1 018 075	1 224 226	1 296 124	1 092 062	1 221 410
7	1 674 076	2 046 511	1 714 909	1 682 235	1 828 309	1 697 951
8	2 173 276	2 223 956	2 187 562	2 171 189	2 113 220	2 153 826
9	2 036 702	1 473 838	1 762 710	2 057 697	1 481 862	1 772 244
<b>Total</b>	<b>1 659 546</b>	<b>1 291 753</b>	<b>1 529 161</b>	<b>1 707 229</b>	<b>1 346 733</b>	<b>1 580 882</b>

Keterangan lapangan usaha:

- 1) Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan
- 2) Pertambangan dan Penggalian
- 3) Industri
- 4) Listrik, Gas dan Air
- 5) Konstruksi
- 6) Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi
- 7) Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi
- 8) Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan & Jasa Perusahaan
- 9) Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan

Lampiran 21. Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai  
Menurut Lapangan Usaha dan Klasifikasi Daerah, Agustus 2011 dan Februari 2012  
(Rupiah)

Lapangan Usaha	Agustus 2011			Februari 2012		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
1	1 202 493	979 015	1 027 386	1 400 288	980 474	1 087 425
2	3 757 101	1 955 903	2 822 807	4 194 448	1 975 334	3 197 048
3	1 315 343	960 694	1 224 957	1 397 578	1 043 314	1 300 663
4	2 230 438	1 836 843	2 139 990	2 167 473	1 434 787	2 036 025
5	1 568 918	1 198 959	1 442 207	1 660 571	1 274 423	1 526 011
6	1 294 712	900 320	1 224 226	1 299 187	894 397	1 221 410
7	1 892 307	1 202 644	1 714 909	1 846 657	1 240 154	1 697 951
8	2 321 629	1 333 297	2 187 562	2 297 046	1 370 121	2 153 826
9	1 862 145	1 524 735	1 762 710	1 866 430	1 550 355	1 772 244
<b>Total</b>	<b>1 661 616</b>	<b>1 224 845</b>	<b>1 529 161</b>	<b>1 718 710</b>	<b>1 267 024</b>	<b>1 580 882</b>

Keterangan lapangan usaha:

- 1) Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan
- 2) Pertambangan dan Penggalian
- 3) Industri
- 4) Listrik, Gas dan Air
- 5) Konstruksi
- 6) Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi
- 7) Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi
- 8) Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan & Jasa Perusahaan
- 9) Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan

Lampiran 22. Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin,  
Agustus 2011 dan Februari 2012  
(Rupiah)

Provinsi	Agustus 2011			Februari 2012		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
N A D	1 572 186	1 427 665	1 522 588	1 629 425	1 454 936	1 567 938
Sumatera Utara	1 534 370	1 275 797	1 437 465	1 553 225	1 331 042	1 477 509
Sumatera Barat	1 703 726	1 611 682	1 668 500	1 781 490	1 623 339	1 716 548
Riau	1 903 672	1 502 456	1 781 155	1 934 943	1 542 009	1 817 708
Jambi	1 446 584	1 182 711	1 359 784	1 490 708	1 208 226	1 395 505
Sumatera Selatan	1 500 841	1 333 438	1 447 395	1 531 284	1 362 247	1 475 073
Bengkulu	1 651 061	1 398 021	1 557 309	1 688 165	1 429 159	1 587 207
Lampung	1 262 189	1 066 394	1 198 616	1 265 053	1 135 020	1 220 779
Bangka-Belitung	1 674 904	1 227 651	1 529 081	1 697 702	1 256 513	1 572 816
Kepulauan Riau	2 444 093	1 833 879	2 244 171	2 451 822	1 884 942	2 277 302
DKI Jakarta	2 281 690	1 734 315	2 076 158	2 330 764	1 796 196	2 129 674
Jawa Barat	1 636 048	1 299 944	1 526 691	1 699 969	1 397 948	1 606 107
Jawa Tengah	1 349 080	984 129	1 197 631	1 390 415	1 032 656	1 239 756
D I Y	1 541 082	1 180 743	1 394 960	1 556 348	1 195 514	1 411 850
Jawa Timur	1 352 237	1 010 097	1 223 616	1 392 158	1 052 732	1 269 162
Banten	1 922 067	1 465 094	1 764 241	1 997 147	1 562 887	1 843 011
Bali	1 706 763	1 398 781	1 589 705	1 719 477	1 407 255	1 602 365
Nusa Tenggara Barat	1 493 608	1 051 197	1 347 119	1 591 796	1 073 242	1 400 838
Nusa Tenggara Timur	1 585 389	1 467 203	1 543 582	1 610 449	1 486 758	1 565 614
Kalimantan Barat	1 516 981	1 215 385	1 429 713	1 576 674	1 249 602	1 486 738
Kalimantan Tengah	1 789 915	1 531 842	1 712 772	1 835 232	1 575 115	1 760 979
Kalimantan Selatan	1 728 658	1 357 618	1 619 964	1 775 473	1 400 164	1 669 845
Kalimantan Timur	2 346 400	1 638 544	2 164 341	2 405 047	1 708 072	2 221 001
Sulawesi Utara	1 736 237	1 768 438	1 747 201	1 749 939	1 779 680	1 760 125
Sulawesi Tengah	1 556 904	1 361 032	1 485 047	1 630 359	1 377 205	1 538 374
Sulawesi Selatan	1 682 575	1 411 535	1 582 682	1 726 176	1 433 238	1 610 834
Sulawesi Tenggara	1 784 721	1 467 137	1 679 352	1 829 328	1 471 633	1 703 358
Gorontalo	1 425 460	1 276 702	1 361 920	1 487 553	1 302 664	1 407 821
Sulawesi Barat	1 501 414	1 112 451	1 367 908	1 550 237	1 150 903	1 421 915
Maluku	1 808 928	1 708 981	1 772 207	1 864 866	1 761 395	1 828 852
Maluku Utara	1 911 290	1 658 170	1 825 619	1 939 915	1 733 946	1 871 299
Papua Barat	2 093 318	1 876 339	2 034 297	2 140 684	1 929 427	2 092 157
Papua	2 606 538	1 911 721	2 405 549	2 648 316	1 928 739	2 453 955
<b>Indonesia</b>	<b>1 659 546</b>	<b>1 291 753</b>	<b>1 529 161</b>	<b>1 707 229</b>	<b>1 346 733</b>	<b>1 580 882</b>

Lampiran 23. Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Klasifikasi Daerah,  
Agustus 2011 dan Februari 2012  
(Rupiah)

Provinsi	Agustus 2011			Februari 2012		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
N A D	1 779 626	1 325 169	1 522 588	1 793 170	1 407 832	1 567 938
Sumatera Utara	1 525 783	1 283 572	1 437 465	1 546 508	1 336 792	1 477 509
Sumatera Barat	1 819 795	1 457 258	1 668 500	1 856 770	1 529 436	1 716 548
Riau	2 130 696	1 395 852	1 781 155	2 133 247	1 431 171	1 817 708
Jambi	1 570 820	1 215 167	1 359 784	1 630 191	1 258 202	1 395 505
Sumatera Selatan	1 655 614	1 172 276	1 447 395	1 681 051	1 218 147	1 475 073
Bengkulu	1 798 848	1 339 962	1 557 309	1 820 696	1 342 708	1 587 207
Lampung	1 419 834	1 042 988	1 198 616	1 441 205	1 045 298	1 220 779
Bangka-Belitung	1 650 569	1 326 254	1 529 081	1 693 108	1 393 375	1 572 816
Kepulauan Riau	2 321 638	1 602 333	2 244 171	2 360 519	1 649 383	2 277 302
DKI Jakarta	2 076 158	-	2 076 158	2 129 674	-	2 129 674
Jawa Barat	1 622 235	1 145 680	1 526 691	1 712 180	1 173 476	1 606 107
Jawa Tengah	1 288 345	1 032 756	1 197 631	1 309 432	1 118 364	1 239 756
D I Y	1 425 954	1 276 201	1 394 960	1 448 927	1 284 696	1 411 850
Jawa Timur	1 322 314	999 142	1 223 616	1 387 907	1 013 339	1 269 162
Banten	1 883 713	1 127 107	1 764 241	1 962 882	1 207 716	1 843 011
Bali	1 676 828	1 337 727	1 589 705	1 679 620	1 408 513	1 602 365
Nusa Tenggara Barat	1 431 905	1 184 778	1 347 119	1 508 169	1 250 895	1 400 838
Nusa Tenggara Timur	1 700 711	1 397 607	1 543 582	1 720 664	1 424 516	1 565 614
Kalimantan Barat	1 555 294	1 290 640	1 429 713	1 621 466	1 332 689	1 486 738
Kalimantan Tengah	2 092 034	1 407 818	1 712 772	2 113 980	1 506 176	1 760 979
Kalimantan Selatan	1 763 073	1 428 833	1 619 964	1 797 668	1 515 680	1 669 845
Kalimantan Timur	2 257 330	1 932 748	2 164 341	2 320 944	1 945 995	2 221 001
Sulawesi Utara	1 843 384	1 589 141	1 747 201	1 852 779	1 614 977	1 760 125
Sulawesi Tengah	1 615 635	1 380 896	1 485 047	1 648 783	1 457 956	1 538 374
Sulawesi Selatan	1 785 949	1 298 518	1 582 682	1 840 444	1 310 065	1 610 834
Sulawesi Tenggara	1 939 780	1 466 370	1 679 352	1 963 986	1 478 133	1 703 358
Gorontalo	1 531 103	1 139 228	1 361 920	1 560 312	1 180 158	1 407 821
Sulawesi Barat	1 455 317	1 309 526	1 367 908	1 542 793	1 326 418	1 421 915
Maluku	1 822 478	1 683 569	1 772 207	1 908 784	1 691 364	1 828 852
Maluku Utara	2 116 371	1 574 231	1 825 619	2 132 133	1 673 063	1 871 299
Papua Barat	2 205 656	1 936 533	2 034 297	2 222 916	1 979 937	2 092 157
Papua	2 452 032	2 323 759	2 405 549	2 519 144	2 334 991	2 453 955
<b>Indonesia</b>	<b>1 661 616</b>	<b>1 224 845</b>	<b>1 529 161</b>	<b>1 718 710</b>	<b>1 267 024</b>	<b>1 580 882</b>



### Batasan Kegiatan Informal

Status Pekerjaan	Jenis Pekerjaan Utama										
	Tenaga Profesional (2)	Tenaga Kepemimpinan (3)	Pejabat Pelaksana dan Tata Usaha (4)	Tenaga Penjualan (5)	Tenaga Usaha Jasa (6)	Tenaga Usaha Pertanian (7)	Tenaga Produksi (8)	Tenaga Operasional (9)	Pekerja Kasar (10)	Lainnya (11)	
(1)											
Berusaha Sendiri	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tak Dibayar	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	INF
Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Buruh/Karyawan/Pegawai	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Pekerja Bebas di Pertanian	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Pekerja Bebas di Non Pertanian	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Pekerja Tak Dibayar	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF

Keterangan : F = Formal

INF=Informal

